



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

VII. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I **PENDAHULUAN**

Pelaksanaan APBD Kabupaten Nias Selatan harus dipertanggungjawabkan pelaksanaannya setiap tahun yaitu dengan menyusun Laporan Keuangan. Hal itu sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, mewajibkan Presiden dan Gubernur/Walikota/Bupati untuk menyampaikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang, Kabupaten Nias Selatan telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dimana Laporan Keuangan yang disusun sebanyak tujuhterdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam menyusun laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan mempunyai tujuan dan maksud sebagai berikut :

- a. Menyajikan informasi tentang kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Menyajikan informasi tentang kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyajikan informasi tentang jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil yang dicapai;
- d. Menyajikan informasi tentang bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyajikan informasi evaluasi keputusan/kebijakan yang diambil dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas terhadap anggaran.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
- c. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

- d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- g. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- h. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- n. Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 07 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022;
- t. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022;
- u. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban Serta *Monitoring* dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan;
- v. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 104 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan;
- w. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 105 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan;
- x. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 92 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- y. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 96 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 92 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- z. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 144 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 92 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022;



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Pelaporan
- 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Pengukuran Laporan Keuangan
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 5.3. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca
- 5.4. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.5. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional
- 5.6. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Arus Kas

Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan

Bab VII Penutup



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN,
DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

Dalam terminologi ekonomi, ekonomi makro mencakup perilaku perekonomian secara keseluruhan atau nasional. Cakupannya meliputi kesempatan kerja, harga dan perdagangan internasional. Perilaku perekonomian nasional selama tahun 2022 secara tidak langsung berdampak pada perilaku perekonomian regional atau perekonomian daerah. Kebijakan fiskal/keuangan yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dengan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022. Beberapa indikator ekonomi makro, fiskal/keuangan yang berpengaruh pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Tahun Anggaran 2022 antara lain Pertumbuhan Ekonomi (*economic of growth*), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Kenaikan Harga (inflasi), pendapatan per kapita, Tingkat Kesempatan Kerja dan Investasi.

Selama tahun 2022 pelaksanaan aktivitas Pemerintahan di Kabupaten Nias Selatan berjalan normal setelah pandemi Covid-19, namun semua aktivitas dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022-2027 dengan visi yaitu “*mewujudkan masyarakat yang maju, sehat, dan cerdas dengan kepemimpinan yang melayani, jujur, dan sederhana*”. Beberapa pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur, pengadaan sarana, pelayanan administrasi pemerintahan, dan kegiatan pemerintahan lainnya yang membebani anggaran belanja daerah, diharapkan memiliki efek langsung dan tidak langsung terhadap kenaikan pendapatan perkapita masyarakat. Kenaikan pendapatan perkapita akan cenderung meningkatkan konsumsi terutama konsumsi primer. Selain itu kondisi perkembangan sosial berjalan normal ditandai dengan stabilitas sosial dan politik yang cukup kondusif dan tingginya tingkat kepercayaan atau dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap kegiatan pemerintahan.

Disisi lain, tantangan yang dihadapi Pemerintah pada umumnya dan khususnya Pemerintah Kabupaten Nias Selatan yang perlu dilakukan cara untuk menghadapinya adalah: (1) upaya meningkatkan pendapatan masyarakat; (2) mengatasi pengangguran (*unemployment*) atau membuka lapangan pekerjaan; (3) penyadaran akan dampak budaya atau adat istiadat lokal yang berpengaruh pada perekonomian seseorang atau pendapatan perkapita; (4) upaya memotivasi etos kerja tinggi. Strategi yang dilakukan pemerintah daerah semuanya bertujuan supaya tercipta kehidupan yang cukup dan layak dengan selalu memperhatikan dan mempertahankan sumber daya alam. Selama tahun 2022 kondisi ekonomi makro Kabupaten Nias Selatan adalah :

a. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Nias Selatan terus mengalami pertumbuhan mulai dari tahun 2017 sebesar 4,56% menjadi 5,03% pada tahun 2019 dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 4,69% pertahun. Sedangkan pada Tahun 2020 terjadi penurunan pertumbuhan menjadi 0,61 %. Hal ini terjadi akibat pengaruh pandemi Covid-19. Sedangkan Tahun 2021 terjadi kenaikan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 2,02%. Perkembangan pertumbuhan ekonomi selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 2.1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Nias Selatan

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi
2017	4,56%
2018	5,02%
2019	5,03%
2020	0,61%
2021	2,02
2022	Sedang dalam proses perhitungan BPS

Distribusi persentase pencapaian pertumbuhan ekonomi Nias Selatan dapat dilihat pada tabel Produk Domestik Regional Bruto berikut ini.

Tabel 2.2. Distribusi PDRB Kabupaten Nias Selatan

Kategori	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,22	4,54	3,89	1,04	1,77
B	Pertambangan dan Penggalan	6,95	5,03	5,38	2,96	4,28
C	Industri Pengolahan	4,15	3,40	3,67	0,04	3,82
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,23	6,23	6,34	6,61	5,91
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,12	3,07	3,99	-2,01	-1,35
F	Konstruksi	5,65	6,18	7,49	-4,46	2,58
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,23	5,70	5,72	3,22	5,34
H	Transportasi dan Pergudangan	6,24	6,46	7,71	1,72	-1,35
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,36	5,05	5,73	0,84	-0,75
J	Informasi dan Komunikasi	5,54	5,62	5,83	3,79	7,49
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,37	4,03	3,98	3,42	2,46
L	Real Estate	4,90	5,43	5,78	1,86	0,68
M,N	Jasa Perusahaan	4,88	5,03	5,16	-0,79	2,51
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,23	4,73	5,09	-0,53	-0,21
P	Jasa Pendidikan	4,93	5,04	5,25	1,65	3,09
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,05	4,71	5,86	4,26	-0,03
R,S,T,U	Jasa lainnya	5,05	5,12	5,55	1,54	2,15
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		4,56	5,02	5,03	0,61	2,02

b. Pendapatan per Kapita

Ukuran pendapatan per kapita diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita. PDRB perkapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi nilai barang dan jasa. Angka PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi jumlah nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Jumlah penduduk Kabupaten Nias Selatan sampai dengan Desember tahun 2021 berjumlah 366.163 jiwa, dan sampai dengantahun 2022 sedang dalam proses perhitungan BPS.

PDRB per kapita dipengaruhi oleh tingkat inflasi artinya inflasi atau kenaikan harga-harga mengakibatkan daya beli masyarakat (*purchasing power*) semakin menurun, yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat kesejahteraan. Perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Nias Selatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 2.3. PDRB per Kapita Kabupaten Nias Selatan atas dasar Harga Berlaku dan atas dasar Konstan Harga Konstan 2021, 2017 – 2022

(dalam miliar rupiah)

Tahun	PDRB Perkapita	
	ADH Berlaku	ADH Konstan
2017	5.696,73	3.826,61
2018	6.247,30	4.018,74
2019	6.861,47	4.221,03
2020	7.164,27	4.246,83
2021	7.420,63	4.332,63
2022	Sedang dalam proses perhitungan BPS	Sedang dalam proses perhitungan BPS

Indeks Implisit dan laju implisit PDRB Kabupaten Nias Selatan mencerminkan kenaikan harga pada periode tertentu terhadap periode tahun dasar sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 2.4. Indeks Implisit dan Laju Implisit PDRD Seri 2010,2017 – 2022

(dalam juta rupiah)

Tahun	PDRB Perkapita	
	Indeks Implisit	Laju Implisit
2017	148,85	4,90
2018	155,45	4,44
2019	162,55	4,57
2020	168,70	3,78
2021	171,27	1,53
2022	Sedang dalam proses perhitungan BPS	Sedang dalam proses perhitungan BPS

c. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan indikator penting dalam mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM Kabupaten Nias Selatan tahun 2022 sedang dalam proses perhitungan BPS, sedangkan tahun 2019-2021 tumbuh rata-rata di atas 1,48% dengan klasifikasi sedang ($60 \leq IPM < 70$) sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Nias Selatan

UHH		EYS		MYS		Pengeluaran per Kapita		IPM	
2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
68,74	68,86	12,23	12,27	5,85	6,06	6,974	7.041	61,89	62,35

d. Angka Pengangguran

Angka pengangguran merupakan keberhasilan dalam menyediakan lapangan kerja bagi angkatan kerja. Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) penduduk usia 15 tahun ke atas pada Kabupaten Nias Selatan tahun 2021 sebesar 4,15% sedangkan untuk tahun 2022 masih dalam proses perhitungan BPS.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

e. Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan merupakan permasalahan multidimensi yang kompleks dan mencakup berbagai aspek. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan. Persentase tingkat kemiskinan pada Kabupaten Nias Selatan dari tahun 2017 – 2019 secara konsisten terus menurun, namun pada tahun 2020-2021 naik dikarenakan pengaruh pandemi Covid-19 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.6. Persentase Kemiskinan Kabupaten Nias Selatan

Tahun	Persentase Kemiskinan
2017	18,48%
2018	16,65%
2019	16,45%
2020	16,74%
2021	16,92%
2022	Sedang dalam proses perhitungan BPS

f. Gini Ratio

Gini Ratio adalah indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Distribusi pendapatan semakin merata ketika koefisien *gini ratio* mendekati nol dan sebaliknya pendapatan dikatakan semakin tidak merata ketika koefisien *gini ratio* mendekati satu. *Gini Ratio* pada Kabupaten Nias Selatan dari tahun 2016 – 2019 pemerataan pendapatan Nias Selatan lebih merata, namun tahun 2020-2021 tingkat ketimpangan pendapatan naik, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.7. Gini Ratio Kabupaten Nias Selatan

Tahun	Gini Ratio
2016	0,2136
2017	0,2694
2018	0,3295
2019	0,3190
2020	0,2865
2021	0,2865
2022	Sedang dalam proses perhitungan BPS

2.1. Kebijakan Keuangan

Penyerahan sumber keuangan daerah baik berupa pajak daerah dan retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah yang diselenggarakan berdasarkan asas otonomi. Untuk menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, daerah harus memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di daerahnya.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, kepada daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi, dan pemberian bagi hasil penerimaan serta bantuan keuangan atau dikenal sebagai dana perimbangan.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

Transparansi dan akuntabilitas merupakan wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap pelaksanaan anggaran, sedangkan disiplin anggaran ditunjukkan untuk tercapainya keseimbangan antara pendapatan dan belanja. Prinsip lain yang dilaksanakan adalah prinsip partisipatif untuk mengakomodir aspirasi dan kebutuhan masyarakat serta prinsip anggaran kinerja yang didasarkan pada indikator-indikator yang jelas dan terukur.

Sumber-sumber pembiayaan daerah yang utama dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal meliputi :

a. Pendapatan Asli Daerah

Salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Kewenangan daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan undang-undang, daerah diberikan kewenangan untuk memungut 11 jenis pajak dan 28 jenis retribusi. Penetapan jenis pajak dan retribusi daerah tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa jenis pajak dan retribusi daerah tersebut secara umum dipungut hampir di semua daerah dan merupakan jenis pungutan yang potensial.

Pengaturan pengelolaan pendapatan asli daerah pemerintah Kabupaten Nias Selatan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah;
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

Kebijakan peningkatan pendapatan, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan diarahkan pada :

- 1) Optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah dengan menitikberatkan pada: (a) potensi dari pada jumlah atau jenis pungutan yang banyak; (b) tidak memberatkan masyarakat; (c) tidak merusak lingkungan; (d) mudah diterapkan dan dilaksanakan; (e) penyesuaian pendapatan baik mengenai tarif maupun materinya serta optimalisasi aset dan kekayaan Pemerintah Kabupaten. Kebijakan pengelolaan keuangan ini diharapkan dapat memberikan akuntabilitas yang objektif dan proposional pada kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan serta meningkatkan akselerasi aktivitas ekonomi dengan memfasilitasi kegiatan ekonomi yang memprioritaskan pada perdagangan dan jasa;
- 2) Peningkatan koordinasi dan melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berhubungan dengan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan regulasi perundang/kebijakan yang berlaku serta mengacu pada perencanaan yang telah ditetapkan.

b. Dana Perimbangan

- 1) Bagian daerah dalam bentuk bagi hasil penerimaan (*revenue sharing*)
Untuk menambah pendapatan daerah dalam rangka pembiayaan pelaksanaan fungsi yang menjadi kewenangan dilakukan dengan pola bagi hasil penerimaan pajak dan bukan pajak (sumber daya alam) antara pusat dan



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

- daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- 2) Dana Alokasi Umum
Implikasi langsung dari kewenangan/fungsi yang diserahkan kepada daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah kebutuhan dana yang cukup besar, oleh karenanya diperlukan bantuan dana dari Pemerintah Pusat dalam bentuk dana perimbangan. Untuk mengurangi ketimpangan kebutuhan pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah telah diatasi dengan adanya perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dengan perimbangan tersebut, khususnya dari Dana Alokasi Umum (DAU) akan memberikan kepastian bagi daerah dalam memperoleh sumber-sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya;
 - 3) Dana Alokasi Khusus
Pada hakikatnya pengertian Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus. Pengalokasian DAK ditentukan dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN.

Kebijakan belanja daerah yang dianggarkan diarahkan untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja langsung merupakan belanja yang terkait dengan kegiatan. Pada belanja langsung dialokasikan untuk:

- a. Pada belanja pegawai untuk mendanai honorarium yang terkait langsung dengan kegiatan baik kegiatan fisik maupun non fisik;
- b. Belanja barang dan jasa, digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya/kurang dari 12 bulan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah;
- c. Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilaksanakan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah dianggarkan pada OPD berkenaan.

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan, namun merupakan belanja tetap pemerintah. Secara umum, belanja tidak langsung adalah:

- a. Pengoptimalan belanja pegawai diarahkan untuk:
 - 1) Kenaikan gaji pokok (rata-rata 10%);
 - 2) Pemberian gaji bulan ke 13 dan 14;
 - 3) Tambahan penghasilan bagi aparatur pemerintah.
- b. Pemberian hibah dalam rangka mendukung pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan, dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat dengan mempertimbangkan kemampuan daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

- c. Pemberian bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah yang dilakukan secara selektif untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Penetapan belanja hibah dan bantuan sosial mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 1.2_279 Tahun 2021 tentang Penetapan Penerima dan Besar Nominal Belanja Hibah dan Nomor 1.2_306 Tahun 2021 tentang Penetapan Nama-nama Penerima dan Besaran Bantuan Sosial Berupa uang untuk Beasiswa Kategori kurang mampu/miskin di Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022.

Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah, tepat waktu sesuai tahapan dan jadwal, transparan, partisipatif, memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya, maka kebijakan belanja daerah pada tahun 2022 diarahkan untuk:

- a. Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari empat urusan;
- b. Belanja daerah disusun sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2022 yang tertuang dalam RKPD 2022 dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Nias Selatan yaitu “*mewujudkan masyarakat yang maju, sehat, dan cerdas dengan kepemimpinan yang melayani, jujur, dan sederhana*”.

Kebijakan pembiayaan merupakan langkah-langkah yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dalam rangka mencukupi kebutuhan belanja daerah. Dalam Perubahan APBD Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022, terdapat kelebihan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya yang berasal dari selisih antara realisasi penerimaan dan realisasi pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Selain kebijakan tersebut diatas, kondisi pandemi Covid-19 mengakibatkan kondisi ekonomi dan kesehatan menjadi tidak stabil sehingga memaksa pemerintah pusat dan daerah menanganinya secara serius untuk memulihkannya dengan cara *refocusing* dan realokasi anggaran dengan melakukan penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2022. Pemerintah Kabupaten Nias Selatan telah melakukannya dengandasar pelaksanaan *Refocusing* Kegiatan dan Realokasi Anggaran serta Penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut.

1. Perubahan Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19 dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus *Disease* 2019 (COVID-19);
3. Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19;



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

4. Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus *Disease* 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
5. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Pananganan Corona Virus *Disease* 2019 (COVID-19);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus *Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 19/PMK.7/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan DBH, DAU, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan COVID-19;
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas PMK Nomor 205/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus *Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Masyarakat;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus *Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 6/KM.7/2020 tentang Penyaluran DAK Fisik Bidang Kesehatan dan BOK Dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan COVID-19;
13. Surat Menteri Keuangan Nomor S-247/MK.07/2020 tanggal 27 Maret 2020 perihal Penghentian Proses Pengadaan Barang/Jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA. 2020;
14. Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-126/PK/2020, Hal: Penghentian Proses Penyediaan Barang/Jasa DAK Fisik Tahun Anggaran 2020;
15. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 tentang Penanggulangan Dampak COVID-19 di Desa;
16. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Corona Virus *Disease* 2019 (COVID-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
17. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus *Disease* 2019 (COVID-19) Daerah;
18. Seruan Gubernur Sumatera Utara Nomor 440/3085 tanggal 2 April 2020 tentang Percepatan Penanganan COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara;



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

19. Surat Bupati Nias Selatan Nomor 045/5639/DINSOS/2020 tanggal 01 April 2020 Perihal Penyaluran Program Sembako di Masa Tanggap Darurat;
20. Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 5.5_140 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Wabah Corona Virus *Disease* 2019 di Kabupaten Nias Selatan;
21. Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 5.5_144 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Bencana Non Alam Wabah Corona Virus *Disease* 2019 di Kabupaten Nias Selatan;

Sedangkan penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2022 telah dilakukan beberapa perubahan Peraturan Bupati Nias Selatan sebagai berikut.

1. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 96 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 92 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
2. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 144 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 92 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022;

2.2. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

1. Capaian Kinerja Keuangan Berbasis LRA

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022, menunjukkan bahwa pendapatan daerah sebesar Rp1.357.339.845.820,03 atau 97,43% dari target pendapatan tahun anggaran 2022 sebesar Rp1.393.155.009.075,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun anggaran 2021 sebesar Rp1.401.145.247.615,16 maka mengalami penurunan sebesar Rp43.805.401.795,13 atau 3,12%.

Realisasi belanja daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp1.286.145.493.191,83 atau 94,17% dari target belanja tahun anggaran 2022 sebesar Rp1.391.469.802.328,00. Apabila dibandingkan dengan belanja daerah tahun anggaran 2021 sebesar Rp1.411.390.331.005,25 mengalami Penurunan sebesar Rp125.244.837.813,42 atau 8,87%. Dengan demikian dari realisasi pendapatan dan belanja tahun 2022 tersebut diperoleh surplus APBD sebesar Rp71.194.352.628,20. Dalam realisasi pendapatan dan belanja daerah tahun 2022 telah termasuk pendapatandan belanja yang bersumber dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Biaya Operasional Sekolah (BOS).

Pembiayaan tahun anggaran 2022 menghasilkan pembiayaan netto sebesar Rp2.056.423.241,86 yang diperoleh dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp2.056.423.241,86 dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0,00 dikurangi dengan surplus sebesar Rp71.194.352.628,20 sehingga diperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran per 31 Desember 2022 sebesar Rp73.250.775.870,06.

2. Capaian Kinerja Keuangan Berbasis LO

Laporan operasional Pemerintah Kabupaten Nias Selatan tahun 2022 menunjukkan bahwa pendapatan daerah sebesar Rp1.028.888.581.236,85 dan beban tahun 2022 sebesar Rp847.309.874.923,71, dengan demikian diperoleh surplus dari operasi sebesar Rp181.578.706.313,14.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

a. Pendapatan

Dalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 144 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 92 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022, dianggarkan pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, pendapatan dana transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp1.393.155.009.075,00. Realisasi pendapatan daerah yang telah masuk ke rekening kas umum daerah selama tahun anggaran 2022 sebesar Rp1.357.339.845.820,03 sehingga terjadi pencapaian target di bawah anggaran atau terealisasi 97,43% dari jumlah anggaran pendapatan. Ikhtisar realisasi pendapatan daerah dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.1. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah TA 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Asli Daerah	56.500.000.000,00	39.084.921.881,03	69,18
2	Pendapatan Transfer	1.336.655.009.075,00	1.318.254.923.939,00	98,62
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00
Jumlah		1.393.155.009.075,00	1.357.339.845.820,03	97,43

b. Belanja Daerah

Dalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 144 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 92 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan mengalokasikan anggaran belanja daerah sebesar Rp1.391.469.802.328,00. Selama Tahun Anggaran 2022 belanja daerah terealisasi sebesar Rp1.286.145.493.191,83. Dibandingkan dengan alokasi anggarannya, terjadi penyerapan anggaran belanja daerah mencapai 92,43%. Ikhtisar realisasi belanja daerah dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.2. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah T.A 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Operasi	733,724,025,294.80	654,207,605,050.60	89.16
2	Belanja Modal	210,082,331,871.20	191,302,931,909.23	91.06
3	Belanja Tak Terduga	4,688,470,306.00	2,264,106,500.00	48.29
4	Transfer	442,974,974,856.00	438,370,849,732.00	98.96
Jumlah		1,391,469,802,328.00	1,286,145,493,191.83	92.43



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Hambatan dan kendala umum yang dihadapi dalam rangka pencapaian target anggaran pendapatan dan belanja daerah yang telah ditetapkan adalah:

a. Pendapatan Daerah

- 1) Realisasi kondisi lapangan yang kurang sesuai dengan potensi PAD;
- 2) Kurangnya kesadaran wajib pajak dan/atau wajib retribusi untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- 3) Kurang optimalnya petugas dalam menagih dan memotivasi wajib pajak dan retribusi;
- 4) Kondisi Covid-19 menyebabkan adanya pembatasan jumlah wisatawan sehingga mempengaruhi jumlah pengunjung di beberapa tempat wisata.

b. Belanja Daerah

- 1) Anggaran yang telah direncanakan mengalami perubahan akibat kebijakan *refocusing* anggaran;
- 2) Terjadinya cuaca yang kurang mendukung seperti hujan yang terus menerus saat pekerjaan sedang dilaksanakan seperti pembangunan jalan, jembatan, irigasi, dan jaringan;
- 3) Adanya sifat sangat kehati-hatian oleh aparatur pemerintah dalam melaksanakan kegiatan akibat kurang memahami teknis dan aturan yang dituntut oleh kegiatan.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan yang menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan. Pemerintah Kabupaten Nias Selatan beralamat di Jalan Arah Sorake KM 5 Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara.

Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan, pada Tahun Anggaran 2022 jumlah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Nias Selatan sebanyak 63 OPD dengan rincian seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1. Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2022

Nomor	Organisasi Perangkat Daerah
1	Dinas Pendidikan
2	Dinas Kesehatan
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6	Dinas Perhubungan
7	Dinas Lingkungan Hidup
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10	Dinas Sosial
11	Dinas Tenaga Kerja
12	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
13	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Kepemudaan Olahraga
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
15	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
16	Sekretariat Daerah
17	Sekretariat DPRD
18	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah
19	Inspektorat
20	Badan Kepegawaian Daerah
21	Kantor Camat Teluk Dalam



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

Nomor	Organisasi Perangkat Daerah
22	Kantor Camat Lahusa
23	Kantor Camat Amandraya
24	Kantor Camat Lolowau
25	Kantor Camat Lolomatua
26	Kantor Camat Gomo
27	Kantor Camat PP.Batu
28	Kantor Camat Hibala
29	Kantor Camat Susua
30	Kantor Camat Maniamolo
31	Kantor Camat Hilimegai
32	Kantor Camat Toma
33	Kantor Camat Mazino
34	Kantor Camat Umbunasi
35	Kantor Camat Aramo
36	Kantor Camat Pulau-Pulau Batu timur
37	Kantor Camat Mazo
38	Kantor Camat Fanayama
39	Kantor Camat Ulunoyo
40	Kantor Camat Huruna
41	Kantor Camat O'Ou
42	Kantor Camat Onohazumba
43	Kantor Camat Hilisalawa'ahe
44	Kantor Camat Ulususua
45	Kantor Camat Sidua'ori
46	Kantor Camat Somambawa
47	Kantor Camat Boronadu
48	Kantor Camat Simuk
49	Kantor Camat PP.Batu Barat
50	Kantor Camat PP.Batu Utara
51	Kantor Camat Tanah Masa
52	Kantor Camat LuahagundreManiamolo
53	Kantor Camat Ulu Idanotae
54	Kantor Camat Idanotae
55	Kantor Camat Onolalu
56	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
57	Dinas Ketahanan Pangan
58	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
59	Dinas Komunikasi dan Informatika
60	Dinas Perpustakaan
61	Dinas Pertanian
62	Dinas Kelautan dan Perikanan
63	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dalam menyusun Laporan Keuangan adalah basis akrual yang menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

keuangan pemerintah daerah, tanpa atau bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

4.2.1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan–LO

1. Pendapatan–LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu di bayar kembali;
2. Pengakuan Pendapatan–LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau saat pendapatan direalisasikan yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*);
3. Pengukuran Pendapatan–LO menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima.

4.2.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan–LRA

1. Pendapatan–LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu di bayar kembali oleh pemerintah. Transfer Masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi;
2. Pengakuan Pendapatan–LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan saat pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
3. Pengukuran Pendapatan–LRA menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai kas yang diterima dan atau akan diterima.

4.2.3. Kebijakan Akuntansi Beban

1. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban;
2. Pengakuan beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, saat terjadinya konsumsi aset dan aset terjadinya penurunan manfaat atau potensi jasa;
3. Pengukuran beban menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang yang dikeluarkan dari kas daerah.

4.2.4. Kebijakan Akuntansi Belanja

1. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah Kabupaten Nias Selatan yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah;
2. Pengakuan belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah Kabupaten Nias Selatan. Khusus pengeluaran yang dilakukan melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggung jawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan;
3. Pengukuran belanja menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang yang dikeluarkan dari kas daerah Kabupaten Nias Selatan.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

4.2.5. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

1. Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan pemerintah baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran;
2. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah Kabupaten Nias Selatan yang antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, dan pencairan dana cadangan. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netto;
3. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening kas umum daerah Kabupaten Nias Selatan antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan merupakan penambah dana cadangan dan dicatat dalam pendapatan asli daerah lainnya;
4. Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu;
5. Pengakuan penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada kas daerah Kabupaten Nias Selatan. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan dengan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netto. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas umum daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam SiLPA/SiKPA;
6. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan dikeluarkan.

4.2.6. Kebijakan Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai dan dapat diukur dengan satuan uang. Aset terdiri dari aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Aset lancar adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat kurang dari 12 (dua belas) bulan (satu periode akuntansi).

1. Aset Lancar

a. Kas di Kas Daerah

Kas di kas daerah adalah saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan atau ditunjuk oleh Bupati Nias Selatan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran daerah. Kas disajikan di neraca sebesar nilai nominal;

b. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang berada pada bendahara pengeluaran setiap SKPD yang merupakan sisa uang muka kerja (uang persediaan/tambahan uang persediaan) yang sampai per 31



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

- Desember belum disetorkan ke kas daerah. Kas di bendahara pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada bendahara pengeluaran. Kas dicatat sebesar nilai nominal;
- c. Kas di Bendahara Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
Kas di bendahara FKTP merupakan kas yang berada pada bendahara di setiap puskesmas sebagai penerima dana kapitasi jaminan kesehatan nasional. Sisa kas di bendahara FKTP berasal dari pengelolaan dana kapitasi yang diterima dikurangi dengan belanja atas pelayanan yang mencakup kas yang ada di bank (rekening bendahara FKTP) dan kas tunai. Kas di catat sebesar nilai nominal;
 - d. Kas di Bendahara Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS)
Kas di Bendahara dana BOS merupakan kas yang berada pada bendahara di setiap SD Negeri dan SMP Negeri sebagai penerima dana BOS. Sisa kas di bendahara dana BOS berasal dari pengelolaan dana BOS yang diterima dikurangi dengan belanja atas Biaya Operasional Sekolah yang mencakup kas yang ada di bank (rekening bendahara dana BOS) dan kas tunai. Kas di catat sebesar nilai nominal;
 - e. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran
Kas lainnya yang berada pada Bendahara Pengeluaran merupakan kas tunai hasil pemotongan pajak seperti Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan atas transaksi dengan mekanisme uang persediaan, ganti uang persediaan, tambahan uang persediaan yang sampai per 31 Desember belum disetorkan ke kas negara. Kas di catat sebesar nilai nominal;
 - f. Kas di Bendahara Penerimaan
Kas di bendahara penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai yang berada pada tanggungjawab bendahara penerimaan. Kas tersebut bersumber dari pungutan yang telah diterima oleh bendahara penerimaan seperti penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang sampai per 31 Desember belum disetorkan ke kas daerah;
 - g. Investasi Jangka Pendek
Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 bulan atau kurang. Jenis investasi jangka pendek ini yaitu deposito berjangka, pembelian surat utang negara pemerintah jangka pendek;
 - h. Piutang
Piutang adalah hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. Piutang dapat berupa tagihan hasil penjualan barang dan kewajiban kepada pihak ketiga yang belum dilunasi, seperti pajak/retribusi. Piutang diakui pada saat timbulnya hak atas piutang tersebut. Piutang pajak/retribusi diakui sebagai piutang apabila telah diterbitkan dasar ketetapan pajak/retribusi yaitu Surat Ketetapan Pajak Daerah/Surat Keputusan Retribusi Daerah;



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

- i. **Persediaan**
Persediaan adalah barang yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan/atau untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan pada akhir periode akuntansi di catat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*opname*) persediaan;
 - j. **Investasi Jangka Panjang**
Investasi jangka panjang menurut sifat penanamannya yaitu investasi permanen dan non permanen. Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjual belikan tetapi untuk mendapatkan dividen dan atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi permanen dapat berupa penyertaan modal pemerintah pada perusahaan negara atau daerah. Investasi pemerintah dinilai dengan menggunakan metode biaya dan atau metode ekuitas berdasarkan besarnya kepemilikan saham.
2. **Aset Tetap**
Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah dan/atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 151 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencatatan Kapitalisasi Dan Penyusutan Asset Tetap Barang Milik Daerah Kabupaten Nias Selatan, dimana nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah:
- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang sama dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per unit;
 - b. Pengeluaran untuk perbaikan gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran untuk perbaikan Jalan Irigasi dan Jaringan yang sama atau lebih dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); dan
 - d. Pengeluaran untuk Instalasi Listrik berupa meteran listrik yang sama atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian dan kontruksi dalam pengerjaan. Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan ditambah dengan biaya (biaya yang dapat diatribusikan) yang terkait untuk memperoleh aset tetap. Khusus aset tetap yang pengerjaannya melebihi dan atau melewati suatu periode Tahun Anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut di golongkan dan disajikan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dinilai dalam neraca sebesar realisasi biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut. Nilai tercatat aset tetap adalah nilai buku aset yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

3. Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset selain aset lancar, investasi jangka panjang dan aset tetap. Termasuk dalam aset lainnya adalah Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.

Tuntutan Perbendaharaan merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh daerah, sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh daerah sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai negeri tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban.

Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Ketetapan Tuntutan Perbendaharaan dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas daerah. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas daerah. Aset tak berwujud meliputi *software* komputer, dan dinilai di neraca sebesar nilai perolehan.

4.2.7. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban jangka pendek adalah kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal.

Jenis kewajiban jangka pendek antara lain:

1. Utang kepada pihak ketiga

Utang kepada pihak ketiga berasal dari kontrak atau perolehan barang/jasa yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar;

2. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang kepada pemerintah yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran Askes, Taspen, dan Taperum;

3. Utang Jangka Pendek Lainnya

Termasuk di dalam utang jangka pendek lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang/jasa oleh pemerintah kepada pihak lain, utang yang timbul terkait penerimaan jasa yang belum di bayar sampai dengan tanggal penyusunan laporan keuangan dan dana yang berasal dari SPM LS kepada Bendahara Pengeluaran yang belum seluruhnya diserahkan kepada yang berhak per tanggal neraca.

4.2.8. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas berasal dari



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh surplus/defisit-LO, SiLPA/SiKPA, penutupan saldo perubahan SAL dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi aset tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam laporan perubahan ekuitas.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Beberapa informasi penting yang perlu disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini adalah sebagai berikut.

1. Penyusunan Neraca Pemerintah Kabupaten Nias Selatan menganut prinsip substansi mengungguli bentuk formalnya, artinya informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai substansi dan realitas ekonomi;
2. Basis akuntansi yang digunakan adalah basis kas dan basis akrual yaitu:
 - a. Basis kas digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Basis akrual digunakan untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca dan pengakuan pendapatan dan beban dalam Laporan Operasional;
3. Periode akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan adalah periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Prinsip-prinsip kebijakan dan sistem akuntansi yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan yaitu diatur dalam Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 104 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan dan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 105 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. PENJELASAN ATAS POS-POSLAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.1. Pendapatan	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
	1.357.339.845.820,03	1.401.145.247.615,16

Realisasi pendapatan daerah selama Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.357.339.845.820,03 dibandingkan dengan anggaran pendapatan daerah sebesar Rp1.393.155.009.075,00 maka terjadi realisasi di bawah anggaran atau 97,43% terealisasi dari anggaran. Komposisi realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.1. Rincian Pendapatan Daerah

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Pendapatan Asli Daerah	56.500.000.000,00	39.084.921.881,03	69,18	32.822.654.372,16
	Pajak Daerah	9.780.436.978,00	10.119.323.120,50	103,46	8.806.322.592,62
	Retribusi Daerah	335.024.224,00	176.771.625,00	52,76	168.732.630,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	25.384.538.798,00	5.350.484.156,00	21,08	5.697.181.857,00
	Lain-lain PAD yang Sah	21.000.000.000,00	23.438.342.979,53	111,61	18.150.417.292,54
2.	Pendapatan Transfer	1.336.655.009.075,00	1.318.254.923.939,00	98,62	1.295.553.732.105,00
	Dana Bagi Hasil (DBH)	21.364.478.000,00	30.178.258.826,00	141,25	24.130.045.034,00
	Dana Alokasi Umum	568.966.627.033,00	568.966.577.033,00	100,00	617.556.640.000,00
	Dana Alokasi Khusus	326.007.641.000,00	300.737.826.353,00	92,25	266.809.493.501,00
	Dana Desa	375.606.997.000,00	371.959.764.729,00	99,03	346.976.287.528,00
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	41.209.266.042,00	43.015.327.745,00	104,38	40.081.266.042,00
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	3.500.000.000,00	3.397.169.253,00	97,06	0,00
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	0,00	0,00	0	72.768.861.138,00
	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0	72.768.861.138,00
	Jumlah	1.393.155.009.075,00	1.357.339.845.820,03	97,43	1.401.145.247.615,16

Rincian realisasi pendapatan per OPD dapat dilihat pada lampiran V.1

5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
	39.084.921.881,03	32.822.654.372,16

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Nias Selatan berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan. PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah,



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Realisasi PAD selama Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp39.084.921.881,03 dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp56.500.000.000,00 terjadi realisasi di bawah anggaran atau 69,18%.

5.1.1.1.1. Pajak Daerah

Tahun 2022	Tahun 2021
(Rp)	(Rp)
10.119.323.120,50	8.806.322.592,62

Realisasi pendapatan pajak daerah selama Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp10.119.323.120,50 dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp9.780.436.978,00 terjadi realisasi di atas anggaran atau 103,46%. Rincian realisasi pendapatan pajak daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.2. Rincian Pendapatan Pajak Daerah

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Pajak Hotel	200.000.000,00	359.507.893,00	179,75	3.025.000,00
2	Pajak Restoran	2.070.668.000,00	3.984.603.993,49	192,43	3.766.620.454,82
3	Pajak Hiburan	34.850.000,00	23.375.000,00	67,07	1.125.000,00
4	Pajak Reklame	493.447.510,00	450.170.269,00	91,23	176.793.242,00
5	Pajak Penerangan Jalan	2.500.000.000,00	3.461.401.572,00	138,46	2.707.747.429,00
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	3.235.930.150,00	1.096.358.618,01	33,88	1.453.760.469,80
7	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	895.541.318,00	405.454.832,00	45,27	307.563.270,00
8	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	350.000.000,00	338.450.943,00	96,70	389.687.727,00
Jumlah		9.780.436.978,00	10.119.323.120,50	103,46	8.806.322.592,62

5.1.1.1.2. Retribusi Daerah

Tahun 2022	Tahun 2021
(Rp)	(Rp)
176.771.625,00	168.732.630,00

Realisasi pendapatan retribusi daerah selama tahun anggaran 2022 sebesar Rp176.771.625,00 dibandingkan dengan anggarannya yaitu sebesar Rp335.024.224,00 terjadi realisasi di bawah anggaran atau 52,76%. Rincian realisasi pendapatan retribusi daerah diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.3. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	20.000.000,00	17.734.000,00	88,67	15.668.500,00
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Retribusi Pelayanan Pasar	122.300.000,00	56.778.000,00	46,43	55.893.500,00
4	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	134.724.224,00	81.900.000,00	60,79	42.000.000,00
5	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	20.000.000,00	6.500.000,00	32,50	36.186.000,00
6	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	20.000.000,00	13.859.625,00	69,30	18.984.630,00
7	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		335.024.224,00	176.771.625,00	52,76	168.732.630,00



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

5.1.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
	5.350.484.156,00	5.697.181.857,00

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berupa pendapatan dividen dan pembagian laba yang diperoleh dari penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Nias Selatan. Dividen diperoleh atas penyertaan modal pada PT Bank Sumut Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp5.350.484.156,00.

Pemerintah Kabupaten Nias Selatan telah membentuk Badan Usaha Milik Daerah dengan nama PT Bumi Nisel Cerlang, dan selama Tahun Anggaran 2012 telah dilakukan penyertaan modal pada PT Bumi Nisel Cerlang sebesar Rp15.000.000.000,00, tahun 2013 dilakukan penambahan penyertaan modal sebesar Rp15.000.000.000,00, tahun 2015 sebesar Rp24.000.000.000,00, dan pada tahun 2017 dilakukan penambahan modal sebesar Rp2.500.000.000,00. Hasil dari penyertaan modal tersebut akan diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dalam bentuk pembagian laba, dan sampai dengan 31 Desember 2022 Pemerintah Kabupaten Nias Selatan belum mendapatkan laba yang diperoleh karena posisi rugi.

Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan selama Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp5.350.484.156,00 dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp25.384.538.798,00 maka terjadi realisasi di bawah anggaran sebesar 21,08%. Rincian realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.4. Rincian Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD Bank Sumut.	25.384.538.798,00	5.350.484.156,00	21,08	5.697.181.857,00
Jumlah		25.384.538.798,00	5.350.484.156,00	21,08	5.697.181.857,00

5.1.1.1.4. Lain-lain PAD yang Sah	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
	23.438.342.979,53	18.150.417.292,54

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah selama tahun anggaran 2022 sebesar Rp23.438.342.979,53 dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp21.000.000.000,00 terjadi realisasi di bawah anggaran atau 111,61%. Rincian realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah diuraikan sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 5.5. Rincian Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang tidak Dipisahkan	0,00	4.688.389.687,00	0,00	821.317.621,00
2	Jasa Giro Kas Daerah	4.500.000.000,00	1.775.705.061,23	39,46	1.990.809.671,00
3	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	7.090.773.683,30	0,00	4.593.085.678,54
4	Penerimaan Komisi, Potongan atau bentuk lain	0,00	101.335.579,00	0,00	22.681.821,00
5	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	52.765.819,00	0,00	15.021.424,00
6	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	16.500.000.000,00	9.729.373.150,00	58,97	10.707.501.077,00
Jumlah		21.000.000.000,00	23.438.342.979,53	111,61	18.150.417.292,54

Rincian realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah pada hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan dapat dilihat pada lampiran V.1a

Penjelasan poin no.6 pada tabel 5.5 berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, pasal 6 ayat 4 (empat) yang menyatakan bahwa Rekening dana kapitasi JKN pada Fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) merupakan bagian dari rekening Bendahara Umum Daerah (BUD). Sehingga seluruh kas masuk ke rekening FKTP dari dana kapitasi diakui dan dicatat sebagai pendapatan daerah.

Tabel 5.6. Realisasi Pendapatan JKN pada FKTP Tahun 2022

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Dana JKN pada FKTP Dinas Kesehatan (Puskesmas)	9.729.373.150,00	10.707.501.077,00
Jumlah		9.729.373.150,00	10.707.501.077,00

5.1.1.2 Pendapatan Transfer	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
	<hr style="width: 100%;"/>	<hr style="width: 100%;"/>
	1.318.254.923.939,00	1.295.553.732.105,00

Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Realisasi pendapatan transfer selama Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.318.254.923.939,00 dibandingkan dengan alokasi anggarannya sebesar Rp1.336.655.009.075,00 terjadi realisasi di bawah anggaran atau 98,62%.

Tabel 5.7. Rincian Realisasi Pendapatan Transfer

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	1,291,945,743,033.00	1,271,842,426,941.00	98.44	1,255,472,466,063.00
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah - LRA	44,709,266,042.00	46,412,496,998.00	103.81	40,081,266,042.00
Jumlah		1,336,655,009,075.00	1,318,254,923,939.00	98.62	1,295,553,732,105.00



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

5.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	<u>899.882.662,212,00</u>	<u>908.496.178.535,00</u>

Realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat selama tahun anggaran 2022 sebesar Rp899.882.662,212,00 dibandingkan dengan alokasi anggarannya sebesar Rp916.338.746.033,00 terjadi realisasi di bawah anggaran atau terealisasi 98,20%. Rincian realisasi Transfer Pemerintah Pusat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.8. Rincian Realisasi Transfer Pemerintah Pusat

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Dana Bagi Hasil (DBH)	21.364.478.000,00	30.178.258.826,00	141,25	24.130.045.034,00
2	Dana Alokasi Umum (DAU)	568.966.627.033,00	568.966.577.033,00	100,00	617.556.640.000,00
3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	326.007.641.000,00	300.737.826.353,00	92,25	266.809.493.501,00
Jumlah		916.338.746.033,00	899.882.662.212,00	98,20	908.496.178.535,00

Rincian realisasi per bulan DBH, DAU, DAK dan PAD sebagaimana terlampir pada lampiran V.2

5.1.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat– Lainnya	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	<u>371.959.764.729,00</u>	<u>346.976.287.528,00</u>

Anggaran Dana Desa sebesar Rp375.606.997.000,00 terealisasi ke RKUD sebesar Rp371.959.764.729,00 terdapat selisih tidak terealisasi dari pusat sebesar Rp3.647.232.271,00 yang disebabkan oleh adanya kurang salur dari pusat pada tabel 5.9.

Tabel 5.9. Realisasi Pendapatan Dana Desa Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Kurang Salur (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Dana Desa	375.606.997.000,00	3.647.232.271,00	371.959.764.729,00
Jumlah		375.606.997.000,00	3.647.232.271,00	371.959.764.729,00

Dijelaskan bahwa pada Tahun 2022 terdapat pemotongan DAU TA.2022 dari Kementerian Keuangan untuk Pembayaran Dana Desa yang belum disalurkan ke desa oleh Pemda Nias Selatan pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 sebesar Rp47.662.782.967,00 sebagaimana pada tabel 5.10.

Tabel 5.10. Uraian Pemotongan Dana Desa dari Pusat Tahun 2022

No	Uraian	Jumlah yang Dipotong (Rp)	Keterangan
1	Dana Desa Tahun 2015	47.641.961.655,00	DD. Tahun 2015
2	Utang Dana Desa Tahun 2016	20.821.312,00	Sisa Dana Desa
Jumlah		47.662.782.967,00	*



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

5.1.1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	46.412.496.998,00	40.081.266.042,00

Realisasi pendapatan transfer Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selama Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp46.412.496.998,00 dibandingkan dengan alokasi anggarannya sebesar Rp44.709.266.042,00 terjadi realisasi di atas anggaran atau terealisasi 103,81%. Rincian realisasi pendapatan transfer pemerintah provinsi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.11. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
I	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	41,209,266,042.00	43,015,327,745.00	104.38	40,081,266,042.00
1	Kendaraan Bermotor	8,897,248,487.00	8,897,248,487.00	100.00	16,525,627,864.00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	4,370,331,957.00	4,370,331,957.00	100.00	4,885,356,671.00
3	Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	5,873,996,775.00	5,873,996,775.00	100.00	2,834,862,967.00
4	Pengambilan & Pemanfaatan Air Permukaan	178,130,087.00	178,130,087.00	100.00	125,693,511.00
5	Pajak Rokok	21,889,558,736.00	23,695,620,439.00	104.38	15,709,725,029.00
II	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	3,500,000,000.00	3,397,169,253.00	97.06	0.00
1	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	3,500,000,000.00	3,397,169,253.00	97.06	0.00
Jumlah		44,709,266,042.00	46,412,496,998.00	103.81	40,081,266,042.00

5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan yang Sah	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	0,00	72.768.861.138,00

Lain-lain pendapatan yang sah merupakan pendapatan selain dari pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Jenis pendapatan ini yaitu pendapatan hibah, dana darurat, dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Selama Tahun Anggaran 2022 terdapat realisasi Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp0,00. Dijelaskan bahwa akun lain-lain pendapatan yang Sah pada Tahun 2021 terdiri dari penerimaan dari Dana BOS, namun pada Tahun 2022 pencatatannya disajikan pada penerimaan DAK Non Fisik.

5.1.2. Belanja Daerah	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	1.286.145.493.191,83	1.411.390.331.005,25

Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 144 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 92 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022, jumlah Belanja Daerah yang dianggarkan sebesar Rp1.391.194.802.328,00. Realisasi Belanja Daerah selama Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.286.145.493.191,83. Dibandingkan dengan alokasi anggarannya terjadi realisasi di bawah anggaran atau 92,45%. Rincian realisasi Belanja Daerah diuraikan di bawah ini.

Tabel 5.12. Rincian Realisasi Belanja Daerah

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Belanja Daerah	1,391,469,802,328.00	1,286,145,493,191.83	92.43	1,411,390,331,005.25
1.1.	Belanja Operasi	733,724,025,294.80	654,207,605,050.60	89.16	687,216,771,606.08
1.1.1.	Belanja Pegawai	402,472,902,369.30	365,005,664,573.00	90.69	366,078,209,392.00
1.1.2.	Belanja Barang	295,688,642,502.50	264,828,304,494.60	89.56	298,935,202,417.08
1.1.3.	Belanja Subsidi	2,051,760,000.00	2,051,730,000.00	100.00	3,203,700,000.00
1.1.4.	Belanja Hibah	8,193,880,227.00	2,735,493,340.00	33.38	14,987,498,266.00
1.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	25,316,840,196.00	19,586,412,643.00	77.37	4,012,161,531.00
1.2.	Belanja Modal	210,082,331,871.20	191,302,931,909.23	91.06	245,107,576,769.17
1.2.1.	Belanja Tanah	160,000,000.00	159,082,000.00	99.43	0.00
1.2.2.	Belanja Peralatan dan Mesin	38,814,823,590.20	37,113,220,044.00	95.62	44,732,853,314.00
1.2.3.	Belanja Gedung dan Bangunan	92,770,047,269.00	90,793,400,619.44	97.87	99,210,146,287.79
1.2.4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	77,658,890,858.00	62,560,184,274.79	80.56	98,819,290,526.38
1.2.5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	403,570,154.00	402,874,971.00	99.83	2,345,286,641.00
1.2.6.	Belanja Aset Lainnya	275,000,000.00	274,170,000.00	99.70	0.00
1.3.	Belanja Tak Terduga	4,688,470,306.00	2,264,106,500.00	48.29	161,396,530.00
1.3.1.	Belanja Tak Terduga	4,688,470,306.00	2,264,106,500.00	48.29	161,396,530.00
1.4.	Transfer/Bagi Hasil Ke Desa	442,974,974,856.00	438,370,849,732.00	98.96	478,904,586,100.00
1.4.1.	Bagi Hasil Pajak	744,502,420.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2.	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	442,230,472,436.00	438,370,849,732.00	99.13	478,904,586,100.00

Rincian Realisasi Belanja per OPD dapat dilihat pada lampiran V.3

5.1.2.1. Belanja Operasi	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
	654.207.605.050,60	687.216.771.606,08

Realisasi belanja operasi selama Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp654.207.605.050,60. Dibandingkan dengan alokasi anggarannya sebesar Rp733.724.025.294,80 terjadi realisasi di bawah anggaran atau terealisasi 89,16% dari jumlah anggaran.

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
	365.005.664.573,00	366.078.209.392,00

Belanja pegawai merupakan belanja untuk pegawai, baik yang terkait kegiatan secara langsung maupun tidak terkait dengan kegiatan. Belanja pegawai diterima oleh aparatur pemerintah, yaitu kepala daerah dan wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, aparat sipil negara, dan pegawai tidak tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan. Belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan,



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

penerimaan lainnya, dan pegawai BOS. Realisasi belanja pegawai selama Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp365.005.664.573,00. Dibandingkan dengan alokasi anggarannya sebesar Rp402.472.902.369,30 terjadi realisasi di bawah anggaran atau terealisasi 90,69% dari jumlah anggaran. Rincian realisasi belanja pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.13. Realisasi Belanja Pegawai

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	258.694.429.553,00	232.356.965.500,00	89,82	226.221.703.321,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	35.359.215.911,30	32.822.445.723,00	92,83	48.438.364.814,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	66.061.965.909,00	58.152.037.428,00	88,03	55.481.331.177,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	16.957.191.234,00	16.824.560.742,00	99,22	16.821.000.431,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	185.356.399,00	166.328.620,00	89,73	126.196.164,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	571.285.073,00	431.380.560,00	75,51	359.863.416,00
7	Belanja Pegawai BOS	24.643.458.290,00	24.251.946.000,00	0,00	18.629.750.069,00
Jumlah		402.472.902.369,30	365.005.664.573,00	90,69	366.078.209.392,00

5.1.2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
		264.828.304.494,60	298.935.202.417,08

Realisasi belanja barang dan jasa selama Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp264.828.304.494,60. Dibandingkan dengan alokasi anggarannya sebesar Rp295.688.642.502,50 terjadi realisasi di bawah anggaran atau 89,56% dari jumlah anggaran. Rincian belanja barang dan jasa dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.14. Realisasi Belanja Barang dan Jasa

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Belanja Barang Pakai Habis	77.642.828.733,50	69.866.151.347,00	89,98	66.319.925.430,00
2	Belanja Jasa Kantor	66.071.388.335,00	54.506.743.986,00	82,50	76.022.644.773,00
3	Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi	5.259.804.144,00	4.108.513.135,00	78,11	3.117.452.200,00
4	Belanja Sewa Tanah	38.500.000,00	38.500.000,00	100,00	239.300.000,00
5	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.260.713.000,00	1931208.000,00	85,42	1.355.250.000,00
6	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang	513.000.000,00	422.850.000,00	81,95	485.135.000,00
7	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	538.620.000,00	511.546.600,00	94,97	831.450.000,00
8	Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi	503.427.000,00	479.496.280,00	95,25	4.047.243.184,00
9	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	560.261.000,00	436.515.118,00	77,91	1.051.969.000,00
10	Belanja Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00	0,00	72.800.000,00
11	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.045.595.795,00	4.021.338.661,00	79,70	3.868.013.545,00
12	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.424.834.800,00	2.404.911.896,00	99,18	1.648.793.930,83
13	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.401.628.845,00	1.357.691.180,00	96,87	528.470.000,00
14	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	6.875.000,00	6.825.000,00	99,27	62.919.725,00
15	Belanja Perjalanan Dinas	79.829.299.781,00	75.610.228.653,00	94,71	84.908.664.106,00
16	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat	7.451.959.284,00	5.597.616.133,00	75,12	7.479.720.968,00
17	Belanja Barang dan Jasa BOS	46.136.901.785,00	43.528.163.505,60	94,35	41.931.714.442,00
18	Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ Masyarakat	0,00	0,00	0,00	4.963.736.113,25
Jumlah		295.688.642.502,50	264.828.304.494,60	89,56	298.935.202.417,08



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

5.1.2.1.3 Belanja Subsidi	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
	2.051.730.000,00	3.203.700.000,00

Belanja subsidi merupakan belanja untuk subsidi angkutan laut sesuai dengan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Belanja Subsidi Angkutan Laut, Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan dengan PT. RIUS TONE FAST Nomor 550/17258/MOU/SETDA/2022 dan Nomor 20/PT.RTF/X/2022 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Umum di bidang Transportasi Laut Rute Teluk Dalam - Pulau Tello - Hibala (Pergi Pulang) Tahun Anggaran 2022, dan Perubahan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dengan PT. Rius Tone Fast Nomor 550/399/DISHUB/2022 dan Nomor 011/ PT.RTF/X/2022 tentang pemberian Subsidi untuk kegiatan penyediaan dan penyelenggaraan angkutan laut cepat rute penyeberangan antara Teluk Dalam - Pulau Tello (Pergi Pulang) TA.2022, dan Perubahan kedua Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dengan PT Rius Tone Fast Nomor 550/683/DISHUB/2022 dan Nomor 20/PT.RTF/X/2022 tentang pemberian Subsidi untuk kegiatan penyediaan dan penyelenggaraan angkutan laut cepat rute penyeberangan antara Teluk Dalam-Pulau Tello (Pergi Pulang) TA.2022. Belanja subsidi terealisasi sebesar Rp2.051.730.000,00. Dibandingkan dengan alokasi anggarannya sebesar Rp2.051.760.000,00 terjadi realisasi di bawah anggaran atau 99,99% dari jumlah anggaran. Rincian realisasi belanja subsidi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.15. Realisasi Belanja Subsidi Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Subsidi	2.051.760.000,00	2.051.730.000,00	99,99	3.203.700.000,00
Jumlah		2.051.760.000,00	2.051.730.000,00	99,99	3.203.700.000,00

5.1.2.1.4 Belanja Hibah	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
	2.735.493.340,00	14.987.498.266,00

Belanja hibah merupakan belanja hibah kepada instansi vertikal, badan/ lembaga/ organisasi swasta. Realisasi belanja hibah selama Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.735.493.340,00. Dibandingkan dengan alokasi anggarannya sebesar Rp8.193.880.227,00 terjadi realisasi dibawah anggaran atau 33,38% dari jumlah anggaran. Rincian realisasi belanja hibah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 5.16. Realisasi Belanja Hibah

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1,455,500,000.00	1,435,500,000.00	98.63	4,000,000,000.00
2	Belanja Hibah Dana BOS	5,438,380,227.00	-	0.00	9,543,678,700.00
3	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1,300,000,000.00	1,299,993,340.00	100.00	1,443,819,566.00
Jumlah		8,193,880,227.00	2,735,493,340.00	33.38	14,987,498,266.00

Daftar Penerima Hibah dapat dilihat pada lampiran V.4

5.1.2.1.5. Belanja Bantuan Sosial	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
	19.586.412.643,00	4.012.161.531,00

Belanja bantuan sosial merupakan belanja bantuan sosial yang dapat diberikan kepada perorangan, kelompok organisasi masyarakat. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta *monitoring* dan evaluasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Nias Selatan telah diatur dalam Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 37 Tahun 2021. Realisasi belanja bantuan sosial selama Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp19.586.412.643,00. Dibandingkan dengan alokasi anggarannya sebesar Rp25.316.840.196,00 terjadi realisasi di bawah anggaran atau 77,37% dari jumlah anggaran. Rincian realisasi belanja bantuan sosial dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.17. Realisasi Belanja Bantuan Sosial

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Kemasyarakatan	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00	100.00	0.00
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00
3	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan, dan Bidang Lainnya)	23,716,840,196.00	17,986,412,643.00	75.84	3,862,161,531.00
JUMLAH		25,316,840,196.00	19,586,412,643.00	77.37	4,012,161,531.00

Daftar Penerima Bantuan Sosial dapat dilihat pada lampiran V.5

5.1.2.2 Belanja Modal	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
	191.302.931.909,23	245.107.576.769,17

Belanja modal merupakan pengeluaran belanja untuk memperoleh aset tetap atau aset lainnya untuk keperluan kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah dan atau dimanfaatkan untuk masyarakat umum. Belanja modal meliputi nilai kontrak ditambah seluruh biaya yang terkait untuk memperoleh aset tetap seperti biaya administrasi umum, jasa konsultan. Realisasi belanja modal selama tahun anggaran 2022 sebesar Rp191.302.931.909,23 atau terealisasi



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

91,06% dari jumlah alokasi anggarannya sebesar Rp210.082.331.871,20
 Komposisi realisasi belanja modal dapat diuraikan di bawah ini.

Tabel 5.18. Realisasi Belanja Modal Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Tanah	160,000,000.00	159,082,000.00	99.43	0.00
2	Peralatan dan Mesin	38,814,823,590.20	37,113,220,044.00	95.62	44,732,853,314.00
3	Gedung dan Bangunan	92,770,047,269.00	90,793,400,619.44	97.87	99,210,146,287.79
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	77,658,890,858.00	62,560,184,274.79	80.56	98,819,290,526.38
5	Aset Tetap Lainnya	403,570,154.00	402,872,971.00	99.83	2,045,756,641.00
6	Aset Lainnya	275,000,000.00	274,170,000.00	99.70	299,530,000.00
Jumlah		210,082,331,871.20	191,302,929,909.23	91.06	245,107,576,769.17

5.1.2.2.1 Belanja Tanah

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
	159.082.000,00	0,00

Belanja tanah merupakan belanja pemerintah untuk memperoleh tanah yang digunakan untuk keperluan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan. Belanja tanah meliputi harga perolehan dan ditambah biaya lainnya seperti biaya jasa penilai harga tanah. Realisasi belanja modal tanah selama Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp159.082.000,00. Dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp160.000.000,00 terjadi realisasi di bawah anggaran atau 99,43%.

Tabel 5.19. Realisasi Belanja Tanah Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pengadaan Tanah untuk Lapangan	160,000,000.00	159,082,000.00	99.43	0.00
Jumlah		160,000,000.00	159,082,000.00	99.43	0.00

5.1.2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
	37.113.220.044,00	44.732.853.314,00

Belanja peralatan dan mesin merupakan belanja Pemerintah untuk memperoleh aset tetap berupa peralatan dan mesin yang dapat digunakan untuk kegiatan operasional Pemerintahan dan menunjang pelayanan kepada masyarakat. Realisasi belanja peralatan dan mesin selama tahun anggaran 2022 sebesar Rp37.113.220.044,00. Dibandingkan dengan alokasi anggarannya sebesar Rp38.814.823.590,20 terjadi realisasi di bawah anggaran atau terealisasi 95,62% dari jumlah anggaran. Rincian realisasi belanja peralatan dan mesin dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 5.20. Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Alat Besar Darat	35.640.000,00	35.640.000,00	100	0,00
2	Alat Bantu	31.536.019,00	29.955.000,00	94,99	276.293.100,00
3	Alat Angkutan Darat Bermotor	4.219.381.000,00	3.685.620.028,00	87,35	6.261.504.410,00
4	Alat Angkutan Apung Bermotor	180.800.000,00	180.440.000,00	99,80	0,00
5	Alat Bengkel Tak bermesin	0,00	0,00	0,00	13.400.000,00
6	Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	14.399.000,00
7	Alat Kantor	100.000.000,00	99.900.000,00	99,90	51.729.100,00
8	Alat Rumah Tangga	1.715.817.173,75	1.381.109.317,00	80,49	13.447.790.446,00
9	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	609.588.279,25	500.401.071,00	82,09	731.622.546,00
10	Alat Studio	368.024.440,00	328.925.000,00	89,38	25.480.400,00
11	Alat Komunikasi	73.000.000,00	52.510.000,00	71,93	597.443.500,00
12	Alat Kedokteran	0,00	0,00	0,00	5.135.083.650,00
13	Alat Kesehatan umum	9.332.798.000,00	9.206.938.384,00	98,65	5.795.468.759,00
14	Alat Peraga/Praktek Sekolah	13.845.721.915,00	13.839.531.915,00	99,96	5.590.996.850,00
15	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	17.240.000,00	0,00	0,00	0,00
16	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	0,00	0,00	0,00	9.060.000,00
17	Komputer Unit	7.225.730.201,20	6.889.025.827,00	95,34	5.806.518.048,00
18	Peralatan Komputer	751.766.142,00	642.289.504,00	85,44	0,00
19	Alat Eksplorasi Topografi	79.960.000,00	69.960.000,00	87,49	0,00
20	Alat Eksplorasi Geofisika	131.200.020,00	74.949.998,00	57,13	70.670.916,00
21	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	96.620.000,00	96.024.000,00	99,38	0,00
22	Sumur Pemboran	0,00	0,00	0,00	99.875.773,00
23	Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	597.995.016,00
24	Alat Pelindung	0,00	0,00	0,00	180.946.000,00
25	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00
26	Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	22.875.800,00
	Jumlah	38.814.823.590,20	37.113.220.044,00	95,62	44.732.853.314,00

5.1.2.2.3 Belanja Bangunan dan Gedung

Tahun 2022
(Rp)

Tahun 2021
(Rp)

90.793.400.619,44

99.210.146.287,79

Belanja modal bangunan dan gedung merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk pembangunan gedung dan rehabilitasi gedung, yang dapat



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintah dan oleh masyarakat umum. Realisasi belanja modal bangunan dan gedung untuk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp90.793.400.619,44. Dibandingkan dengan alokasi anggarannya sebesar Rp92.770.047.269,00 terjadi realisasi di bawah anggaran atau terealisasi 97,87%. Rincian realisasi belanja bangunan dan gedung sebagai berikut.

Tabel 5.21. Realisasi Belanja Bangunan dan Gedung

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	92.095.610.494,00	90.119.779.844,44	97,85	114.881.559.263,00
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0,00	0,00	0,00	230.626.720,00
3	Bangunan Menara Perambuan	568.836.775,00	568.836.775,00	100,00	1.755.000.000,00
4	Bangunan Tugu Titik Kontrol/ Pasti	105.600.000,00	104.784.000,00	99,23	823.712.394,00
Jumlah		92.770.047.269,00	90.793.400.619,44	97,87	117.690.898.377,00

5.1.2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	62.560.184.274,79	98.819.290.526,38

Belanja jalan, irigasi dan jaringan merupakan pengeluaran pemerintah untuk pembangunan jalan, pembukaan badan jalan, pengaspalan jalan, rehabilitasi jalan, pembangunan jembatan, rehabilitasi jembatan, pembangunan *duikerplat*, pembangunan bronjong, pembangunan drainase, pembangunan irigasi, pembangunan sarana air bersih, pembangunan air minum, dan instalasi yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pemerintahan dan masyarakat umum. Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan TA.2022 sebesar Rp62.560.184.274,79. Dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp77.658.890.858,00 realisasi di bawah anggaran atau terealisasi 80,56%. Rincian realisasi belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.22. Realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Jalan	51.330.099.319,00	39.522.823.490,79	77,00	53.133.245.013,58
2	Jembatan	7.423.916.882,00	6.007.340.827,00	80,92	6.884.378.877,80
3	Bangunan Air Irigasi	962.534.201,00	962.534.201,00	100,00	6.539.238.340,00
4	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	4.592.098.661,00	4.388.700.568,00	95,57	11.237.108.773,00
5	Bangunan Air Bersih/Baku	0,00	0,00	0,00	540.725.900,00
6	Instalasi Air Kotor	0,00	0,00	0,00	12.158.678.760,00
7	Instalasi Pengolahan Sampah	0,00	0,00	0,00	244.067.100,00



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
8	Instalasi Pembangkit Listrik	0,00	0,00	0,00	1.600.763.900,00
9	Jaringan Air Minum	13.050.241.795,00	11.379.098.774,00	87,19	6.325.192.522,00
10	Jaringan Listrik	300.000.000,00	299.686.414,00	99,90	155.891.340,00
Jumlah		77.658.890.858,00	62.560.184.274,79	80,56	96.064.519.841,71

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	402.874.971,00	2.045.756.641,00

Belanja modal aset tetap lainnya merupakan belanja pemerintah untuk perolehan buku dan kepustakaan, barang bercorak kebudayaan dan renovasi. Realisasi belanja modal aset tetap lainnya selama tahun anggaran 2022 sebesar Rp402.874.971,00. Dibandingkan dengan alokasi anggarannya sebesar Rp403.570.154,00 terjadi realisasi di bawah anggaran atau realisasi 99,83% dari jumlah anggaran. Rincian realisasi belanja modal aset tetap lainnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.23. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Bahan Perpustakaan Tercetak	403.570.154,00	402.874.971,00	99,83	1.591.766.391,00
2	Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	0,00	0,00	0,00	405.790.250,00
3	Karya Grafika (Graphic Material)	0,00	0,00	0,00	700.000,00
4	Barang Bercorak Kesenian	0,00	0,00	0,00	47.500.000,00
Jumlah		403.570.154,00	402.874.971,00	99,83	2.045.756.641,00

5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	274.170.000,00	299.530.000,00

Belanja modal aset lainnya merupakan belanja pemerintah untuk perolehan aset tidak berwujud. Realisasi belanja modal aset lainnya selama tahun anggaran 2022 sebesar Rp274.170.000,00. Dibandingkan dengan alokasi anggarannya sebesar Rp275.000.000,00 terjadi realisasi di bawah anggaran atau realisasi 99,70% dari jumlah anggaran. Rincian realisasi belanja modal aset tetap lainnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.24. Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Aset Tidak Berwujud	275.000.000,00	274.170.000,00	99,70	299.530.000,00
Jumlah		275.000.000,00	274.170.000,00	99,70	299.530.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

5.1.2.3 Belanja Tak Terduga	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	2.264.106.500,00	161.396.530,00

Belanja tak terduga merupakan belanja untuk mendanai keadaan penanganan keadaan darurat akibat bencana alam atau peristiwa yang tidak biasa dan tidak diduga. Belanja tak terduga pada tahun 2022 digunakan untuk Pembayaran Sisa Dana BOS Tahun Anggaran 2011 pada BPKPAD Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan SK Direktur Jendral Perimbangan Keuangan Nomor KEP-20/PK/2022 Tentang Rincian Sisa Dana Bantuan Operasional Sekolah TA 2011. Realisasi belanja Tak Terduga selama tahun anggaran 2022 sebesar Rp2.264.106.500,00. Dibandingkan dengan alokasi anggarannya sebesar Rp4.688.470.306,00 terjadi realisasi di bawah anggaran atau realisasi 48,29%.

5.1.2.2 Belanja Transfer	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	438.370.849.732,00	478.904.586.100,00

Belanja transfer merupakan belanja Pemerintah Kabupaten Nias Selatan kepada Pemerintah Desa berupa bagi hasil pajak dan retribusi dan bantuan keuangan kepada desa. Realisasi belanja transfer bantuan keuangan ke desa tahun 2022 sebesar Rp438.370.849.732,00 merupakan transfer dana desa sebesar Rp371.959.764.729,00, penyaluran sisa dana desa TA.2015-2018 sebesar Rp1.342.382.852,00 dan alokasi dana desa sebesar Rp65.068.702.151,00. Alokasi Dana Desa Tahun 2022 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 39 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nias Selatan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022 dan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022 diatur dalam PMK 201/PMK.07/2022. Jumlah penerima dana desa sebanyak 459 desa dari 35 kecamatan. Realisasi belanja transfer selama Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp438.370.849.732,00 dibandingkan dengan alokasi anggarannya sebesar Rp442.974.974.856,00 terjadi realisasi di bawah anggaran atau 98,96%. Rincian realisasi transfer dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.25. Realisasi Transfer TA. 2022

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Bagi Hasil Pajak	744,502,420.00	0.00	0.00	0.00
2	Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/ Kota kepada Desa	442,230,472,436.00	438,370,849,732.00	99.13	478,904,586,100.00
	Dana Desa	376,965,492,434.00	371,959,764,729.00	98.67	346,976,287,528.00
	Penyaluran Sisa DD TA.2015-2018	0.00	1,342,382,852.00	0.00	0.00
	Alokasi Dana Desa	65,264,980,002.00	65,068,702,151.00	99.70	131,928,298,572.00
	Jumlah	442,974,974,856.00	438,370,849,732.00	98.96	478,904,586,100.00

Rincian dan realisasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dapat dilihat pada lampiran V.6



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

5.1.2.3 Surplus/Defisit	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	<u>71.194.352.628,20</u>	<u>(10.245.083.390,09)</u>

Surplus/Defisit adalah selisih antara pendapatan setelah dikurangi dengan belanja dan transfer. Pada tahun anggaran 2022 terdapat surplus sebesar Rp71.194.352.628,20, dibandingkan dengan alokasi anggaran surplus sebesar Rp1.685.206.747,00.

5.1.3. Pembiayaan Netto	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	<u>2.056.423.241,86</u>	<u>13.193.319.817,95</u>

Pembiayaan adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan digunakan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran entitas. Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan. Realisasi pembiayaan netto tahun anggaran 2022 sebesar Rp2.056.423.241,86 dibandingkan dengan alokasi anggaran pembiayaan netto sebesar (Rp1.685.206.747,00) terjadi realisasi di bawah anggaran atau 0,00%.

5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	<u>2.056.423.241,86</u>	<u>13.193.319.817,95</u>

Penerimaan pembiayaan tahun 2022 merupakan penerimaan atas Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun sebelumnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.056.423.241,86

5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	<u>0,00</u>	<u>891.813.186,00</u>

Pengeluaran pembiayaan merupakan transaksi pengeluaran yang bertujuan untuk memanfaatkan surplus anggaran. Pada tahun anggaran 2022 pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp3.741.629.989,00 dan terealisasi 0,00 atau terjadi realisasi 0,00%. Realisasi pengeluaran pembiayaan diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.26. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Penyertaan Modal pada BUMD PT. Bank Sumut	3,741,629,989.00	0.00	0.00%	891,813,186.00
	Jumlah	3,741,629,989.00	0.00	0.00%	891,813,186.00



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

Dijelaskan pada Tahun 2022 pencatatan penerimaan Dividen dari PT. Bank Sumut ditempatkan pada akun Pendapatan Asli Daerah (bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas penyertaan modal pada BUMD sebesar Rp5.350.484.156,00 sebagaimana telah dijelaskan pada tabel 5.4 diatas).

5.1.4 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	<u>73.250.775.870,06</u>	<u>2.056.423.241,86</u>

Dari realisasi pendapatan dan belanja pemerintah Kabupaten Nias Selatan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 diperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp73.250.775.870,06. SiLPA tersebut diperoleh dari hasil perhitungan sebagai berikut :

Tabel 5.27. Uraian Hasil Perhitungan SiLPA Tahun 2022

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021(Rp)
1.	Dana Alokasi Umum	55.320.224.215,00	44.864.838.802,44
2.	DBH CHT	0,00	39.635.926,00
	DBH Cukai Hasil Tembakau	0,00	39.635.926,00
3.	Dak Fisik Reguler	3.903.118.705,00	25.502.752,39
	Reguler Pendidikan	5.234.926,00	25.502.752,39
	Sub Bidang Sanitasi	20.190.064,00	0,00
	Sub Bidang Air Minum	728.265.145,00	0,00
	Farmasi Dinas Kesehatan	2.894.428.570,00	0,00
	Sub Bidang Pengendalian Penyakit	255.000.000,00	0,00
4.	DAK Non Fisik	5.499.768.106,00	108.593.138,00
	Pertanian	30.728.990,00	2.400.000,00
	Adminduk	42.030.401,00	38.880.401,00
	KapasitasKoperasi dan UKM	2.192.612,00	2.539.120,00
	Penanaman Modal	0,00	27.861.000,00
	BO KB	1.720.179.440,00	50.000,00
	BOK	2.638.690.999,00	36.862.617,00
	TKG	431.847.500,00	0,00
	TPG	359.808.500,00	0,00
	Tamsil	242.600.000,00	0,00
	Kepariwisata	31.689.664,00	0,00
5.	Bantuan Keuangan Provinsi	613.507.773,00	0,00
6.	Rekening Pengembalian Kasda	1.834.403,00	0,00
7.	Rekening Pengeluaran Dana Desa	7.527.137.006,74	550.903.045,47
8.	Dana JKN	157.855,00	456.769,00
9.	Dana BOS	373.085.590,40	1.282.491.611,00
10.	Kas di Bendahara Pengeluaran	10.186.150,00	9.840.000,00
11.	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.756.065,92	0,00
	Saldo Anggaran Lebih Akhir	73.250.775.870,06	2.056.423.241,86



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

5.2. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	<u>2.056.423.241,86</u>	<u>13.193.699.252,95</u>

Saldo anggaran lebih awal adalah gabungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo anggaran lebih awal pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp2.056.423.241,86.

5.2.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	<u>2.056.423.241,86</u>	<u>13.193.319.817,95</u>

Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp2.056.423.241,86.

5.2.3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	<u>73.250.775.870,06</u>	<u>2.056.423.481,86</u>

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) per 31 Desember 2022 sebesar Rp73.250.775.870,06.

5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	<u>0,00</u>	<u>(379.435,00)</u>

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.

5.2.5. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	<u>73.250.775.870,06</u>	<u>2.056.423.241,86</u>

Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2022 sebesar Rp73.250.775.870,06. Perbandingan Saldo Anggaran Lebih Akhir diuraikan sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 5.28. Laporan Saldo Anggaran Lebih Akhir

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
I.	Saldo Anggaran Lebih Awal	2.056.423.241,86	13.193.699.252,95
1.	Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	2.056.423.241,86	13.193.319.817,95
	Sub Total	0,00	379.435,00
2.	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	73.250.775.870,06	2.056.423.241,86
	Sub Total	73.250.775.870,06	2.056.802.676,86
3.	Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	0,00	(379.435,00)
II.	Saldo Anggaran Lebih Akhir	73.250.775.870,06	2.056.423.241,86

Rincian Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2022 sebesar Rp73.250.775.870,06, sebagaimana telah disajikan pada tabel 5.27 diatas.

5.3. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

5.3.1. ASET	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	<u>2.143.204.851.797,39</u>	<u>2.162.068.625.234,97</u>

Saldo Aset Pemerintah Kabupaten Nias Selatan per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.143.204.851.797,39 yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp90.794.648.143,07, investasi jangka panjang sebesar Rp64.563.963.659,00 aset tetap sebesar Rp1.966.840.801.895,69 dan aset lainnya sebesar Rp21.005.438.099,63.

5.3.1.1 Aset Lancar	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	<u>90.794.648.143,07</u>	<u>29.385.074.005,66</u>

Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Nias Selatan per 31 Desember 2022 sebesar Rp90.794.648.143,07, terdiri dari Kas di Kas Daerah sebesar Rp72.867.346.274,66, Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp391.914.810,00, Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp10.186.150,00, Kas di Bendahara Dana BOS Rp373.085.590,40, Kas di Bendahara FKTP sebesar Rp157.855,00, Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp197.331.799,00, Piutang Pajak Daerah sebesar Rp12.609.961.086,00, Piutang Retribusi sebesar Rp0,00, Piutang Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp604.565,76, Piutang Transfer Pusat Rp2.881.916.284,00, Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp0,00, Penyisihan Piutang (Rp9.226.933.805,75), Piutang Lainnya sebesar Rp0,00 dan Persediaan sebesar Rp10.689.077.534,00.

5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	<u>72.867.346.274,66</u>	<u>763.634.861,86</u>



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

Jumlah kas di kas daerah merupakan saldo kas rekening Bendahara Umum Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp72.867.346.274,66 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.29. Kas di Kas Daerah

No	Bank	Nomor Rekening	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	PT Bank Sumut Cabang Teluk Dalam	271.01.02.000307.0	1.834.403,00	0,00
2	PT Bank Sumut Cabang Teluk Dalam	271.01.02.000308.0	65.336.618.799,69	212.731.816,39
3	PT Bank Sumut Cabang Teluk Dalam	271.01.02.000309.0	0,00	0,00
4	PT Bank BRI Cabang Teluk Dalam	2036-01-000552-30-1	7.527.137.006,47	550.903.045,47
5	PT Bank Sumut Cabang Teluk Dalam	271.01.02.000321.0	0,00	0,00
Jumlah Saldo Kas			72.865.590.209,16	763.634.861,86

Dijelaskan bahwa terdapat perbedaan antara buku kas penerimaan dan pengeluaran BUD dengan Rekening koran sebesar Rp1.756.065,50. Hal ini disebabkan oleh potongan Pajak yang dipungut melalui SP2D dicatat pada kolom informasi sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran kepada penerima. Dijelaskan bahwa kelebihan pembayaran tersebut telah disetor ke kas daerah pada tanggal 03 Maret 2023 sebesar Rp80.065,00 dan sebesar Rp587.140,00 oleh Sekretariat Daerah, pada tanggal 03 Maret 2023 sebesar Rp936.104,00 oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, pada tanggal 07 Maret 2023 sebesar Rp121.000,00 dan sebesar Rp31.757,00 oleh Kecamatan Mazino, sehingga jumlah keseluruhan Kas di Kas Daerah adalah sebesar Rp72.867.346.274,66 (Rp72.865.590.209,16 + Rp1.756.065,50).

Informasi lainnya adalah pada kas di kas daerah terdapat uang sebesar Rp645.762.000,00 yang berasal dari setoran beberapa orang yang menguasai 17 aset kendaraan roda empat sebagaimana data terlampir pada lampiran V.1, berdasarkan proses lelang aset dari pemerintah daerah yang sampai saat ini proses lelang tersebut tidak diakui oleh pejabat lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang Sidempuan. Pendapatan dimaksud tidak bisa dicatat pada akun pendapatan hasil penjualan aset dikarenakan proses lelang aset dimaksud sedang ditangani oleh aparat penegak hukum dan pada Neraca Pemerintah Kabupaten Nias Selatan sampai dengan tahun 2022 aset kendaraan roda empat dimaksud belum dilakukan penghapusan.

5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	391.914.810,00	0,00

Kas di bendahara penerimaan merupakan kas yang ada pada bendahara penerimaan yang bersumber dari potongan pajak makan dan minum atau pungutan Pajak Asli Daerah yang belum disetor ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp391.914.810,00, namun sampai dengan 27 April 2023 telah di setor ke kas daerah dengan rincian sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 5.30. Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

No.	Nama OPD	Kas di Bendahara Penerimaan	PHR TA. 2022 Disetor s/d Tanggal 27 April 2023		Sisa Pajak Mami Yang Belum Disetor s/d Tanggal 27 April 2023	Keterangan
		31 Desember 2022	TGL	Jumlah (Rp)		
1	Dinas Kesehatan	168,461,237.00		Terdiri dari beberapa tanggal transaksi	168,461,237.00	-
2	Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Pemukiman	136,080.00	12/1/2023		136,080.00	-
3	Dinas Lingkungan Hidup	4,497,300.00	8/2/2023		4,497,300.00	-
4	Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil Menengah	126,000.00	5/1/2023		126,000.00	-
5	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	195,631,160.00	1/2/2023		195,631,160.00	-
6	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	1,486,000.00	2/17/2023		1,486,000.00	-
7	Inspektorat	403,600.00	5/1/2023		405,000.00	-1,400.00 Lebih setor Rp1.400,-
8	Badan Kepegawaian Daerah	277,200.00	2/17/2023		277,200.00	-
9	Kantor Camat Telukdalam	2,416,500.00	12/01/2023; 23/02/2023		2,416,500.00	-
10	Kantor Camat Pulau-Pulau Batu	112,200.00	9/2/2023		112,200.00	-
11	Kantor Camat Hilimegai	2,451,731.00	13/01/2023		2,451,731.00	-
12	Kantor Camat Mazo	938,000.00	4/1/2023		938,000.00	-
13	Kantor Camat OOU	165,000.00	31/01/2023		165,000.00	-
14	Kantor Camat Siduaori	320,000.00	17/01/2023		320,000.00	-
15	Kantor Camat Boronadu	2,224,000.00	06/01/2023; 30/01/2023		2,224,400.00	-400.00 Lebih setor Rp400,-
16	Kantor Camat Simuk	500	9/2/2023		500	-
17	Kantor Camat Pulau-Pulau Batu Barat	15,500.00	5/1/2023		15,500.00	-
18	Kantor Camat Pulau-Pulau Batu Utara	4,212,470.00	11/01/2023; 01/02/2023; 20/03/2023		4,212,470.00	-
19	Kantor Camat Luahagundre Maniamolo	3,242,800.00	27/04/2022		3,242,800.00	-
20	Kantor Camat Idanotae	1,400,000.00	13/01/2023		1,400,000.00	-
21	Dinas Ketahan Pangan	3,310,880.00	12/1/2023		3,310,880.00	-
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	86,652.00	4/1/2023		86,652.00	-
TOTAL		391,914,810.00	***		391,916,610.00	-1,800.00 Total lebih setor Rp1.800,-

5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

**Tahun 2022
(Rp)**

**Tahun 2021
(Rp)**

10.186.150,00

9.840.000,00

Kas di bendahara pengeluaran merupakan kas di bendahara pengeluaran tahun 2022 dan tahun sebelumnya yang berasal dari sisa uang persediaan dan tambahan uang persediaan dan sampai per 31 Desember 2022 belum disetor ke kas daerah. Saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 sebesar Rp10.186.150,00. Rincian saldo kas di bendahara pengeluaran sampai per 31 Desember 2022 seperti diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.31. Rincian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Per OPD

No.	OPD	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
1	Kantor Camat Pulau Pulau Batu Utara	10.186.150,00	9.840.000,00
Jumlah		10.186.150,00	9.840.000,00

Dijelaskan bahwa kas dibendahara pengeluaran sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp10.186.150,00 telah disetor ke rekening kas umum daerah Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 12 Januari 2023, namun ada kelebihan setor sebesar Rp500,00 sehingga total penyetoran sebesar Rp10.186.650,00.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

5.3.1.1.4 Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	<u>197.331.799,00</u>	<u>197.044.463,00</u>

Kas lainnya di bendahara pengeluaran merupakan kas yang ada di bendahara pengeluaran yang bersumber dari pungutan pajak (PPN dan PPh) atas transaksi belanja yang sampai per 31 Desember 2022 belum disetor ke kas negara sebesar Rp197.331.799,00. Rincian kas lainnya di bendahara pengeluaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.32. Rincian Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Per OPD

No.	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	149.820.233,00	149.820.233,00
2	Dinas Kesehatan	0,00	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum	10.575.230,00	10.575.230,00
4	Badan Kepegawaian Daerah	35.798.000,00	35.798.000,00
5	Kantor Camat Somambawa	0,00	851.000,00
6	Kantor Camat PP Batu Utara	612.427,00	0,00
7	Kantor Camat Teluk Dalam	525.909,00	0,00
JUMLAH		197.331.799,00	197.044.463,00

Dijelaskan bahwa kas lainnya di Bendahara Pengeluaran :

1. Pada Badan Kepegawaian Daerah telah disetor pajak (PPN dan PPh) sebesar Rp35.798.000,00 pada tanggal 08 Februari 2023;
2. Pada Kantor Camat Teluk Dalam telah disetor pajak (PPN dan PPh) sebesar Rp525.909,00 pada tanggal 06 Januari 2023.

5.3.1.1.5. Kas di Bendahara FKTP	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	<u>157.855,00</u>	<u>456.769,00</u>

Saldo kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2022 menurut buku kas umum masing-masing FKTP sebesar Rp157.855,00, merupakan sisa kas dari pengelolaan dana kapitasi TA.2022 yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar dimuka kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Sedangkan FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan atau pelayanan kesehatan lainnya. Jumlah kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2022 dengan rincian sebagaimana pada Tabel 5.33 berikut ini.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 5.33. Rincian Saldo Kas di Bendahara FKTP

No	Nama FKTP	Per 31 Des 2022 (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)
1	UPTD Puskesmas Teluk Dalam	0,00	0,00
2	UPTD Puskesmas Luahagundre Maniamolo	0,00	318.739,00
3	UPTD Puskesmas Bawomataluo	126.695,00	50,00
4	UPTD Puskesmas Hilisimaetano	191,00	222,00
5	UPTD Puskesmas Hilisataro	15.654,00	22,00
6	UPTD Puskesmas Hilizalootano	0,00	0,00
7	UPTD Puskesmas Lahusa	11,00	1,00
8	UPTD Puskesmas Onolalu	30,00	280,00
9	UPTD Puskesmas Lolomatua	4.192,00	198,00
10	UPTD Puskesmas Lolowau	142,00	0,00
11	UPTD Puskesmas Hilimegai	1.017,00	765,00
12	UPTD Puskesmas Aramo	462,00	44,00
13	UPTD Puskesmas Amandraya	335,00	309,00
14	UPTD Puskesmas Susua	300,00	180,00
15	UPTD Puskesmas Ulususua	0,00	0,00
16	UPTD Puskesmas O'Ou	0,00	60.400,00
17	UPTD Puskesmas Hilisalawa'ahe	117,00	47,00
18	UPTD Puskesmas Onohazumba	349,00	340,00
19	UPTD Puskesmas Huruna	3.219,00	73.180,00
20	UPTD Puskesmas Ulunoyo	319,00	13,00
21	UPTD Puskesmas Somambawa	0,00	0,00
22	UPTD Puskesmas Siduaori	0,00	0,00
23	UPTD Puskesmas Gomo	0,00	0,00
24	UPTD Puskesmas Boronadu	234,00	95,00
25	UPTD Puskesmas Idanotae	1.278,00	90,00
26	UPTD Puskesmas Ulu Idanotae	505,00	175,00
27	UPTD Puskesmas Mazo	381,00	226,00
28	UPTD Puskesmas Umbunasi	41,00	221,00
29	UPTD Puskesmas Pulau Tello	316,00	258,00
30	UPTD Puskesmas Simuk	20,00	84,00
31	UPTD Puskesmas PP. Batu Barat	142,00	5,00
32	UPTD Puskesmas PP. Batu Utara	815,00	135,00
33	UPTD Puskesmas PP. Batu Timur (Labuhan Hiu)	130,00	300,00
34	UPTD Puskesmas Tanah Masa	321,00	70,00
35	UPTD Puskesmas Hibala	429,00	235,00
36	UPTD Puskesmas Hilianombasela Hibala	210,00	85,00
Jumlah		157.855,00	456.769,00

Uraian rinci mutasi saldo kas di Bendahara FKTP dapat dilihat pada lampiran V.7

5.3.1.1.6. Kas di Bendahara Dana	Tahun 2022	Tahun 2021
BOS	(Rp)	(Rp)
	<u>373.085.590,40</u>	<u>1.282.491.611,00</u>

Saldo kas di bendahara dana Biaya Operasional Sekolah (BOS), Biaya Operasional PAUD dan Kesetaraan per 31 Desember 2022 sebesar Rp373.085.590,40, merupakan sisa kas yang belum digunakan oleh sekolah negeri (SD dan SMP), dan sekolah swasta (BOP PAUD dan Kesetaraan). Jumlah pendapatan dana yang diterima oleh sekolah sebesar Rp73.038.857.991, dan belanja sebesar Rp68.643.567.951. Dijelaskan bahwa sumber pendapatan dana yang diterima oleh sekolah terdiri dari Dana BOS



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

(BOS Reguler, Afirmasi, dan Kinerja yang bersumber dari Pusat), BOP PAUD dan Kesetaraan, Bunga Bank dan Dana Lain, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 5.34 berikut ini.

Tabel 5.34. Rincian Saldo Kas di Bendahara Dana BOS Tahun 2022

Sekolah	Saldo Akhir Tahun 2022	Jumlah Penerimaan	Jumlah Pengeluaran	Sisa Kas
PAUD	0,00	5.364.987.000,00	5.304.696.060,00	60.290.940,00
SD	1.059.663.215,00	42.529.946.791,00	43.292.582.362,60	297.027.643,40
SMP	222.828.396,00	24.632.524.200,00	24.839.585.589,00	15.767.007,00
KESETARAAN	0,00	511.400.000,00	511.400.000,00	0,00
TOTAL	1.282.491.611,00	73.038.857.991,00	68.643.567.951,60	373.085.590,40

Rincian kas di Bendahara Dana BOS setiap Sekolah dapat dilihat pada lampiran V.8a, V.8b, dan V.8c

Dijelaskan adanya selisih sebesar Rp9.279.371,20 antara saldo kas di bendahara Dana BOS TA.2022 sebesar Rp.373.085.590,40 dengan saldo riil di rekening koran sebesar Rp382.364.961,60. Hal ini disebabkan saldo kas di bendahara Dana BOS tidak mencatat penerimaan dana lainnya seperti bunga bank dan dana lainnya. Kemudian tidak mencatat pengeluaran lainnya seperti pajak dan biaya ADM. Berikut rincian penjelasan selisih tersebut:

Tabel 5.35. Rincian Penjelasan Selisih Dana BOS TA. 2022

Dana Masuk Selain Dana BOS:	
Bunga Bank PAUD	382,259.00
Bunga Bank SD, SMP	3,158,415.00
Dana Lainnya SD, SMP	20,446,536.00
Total Dana Masuk	23,987,210.00
Dana Keluar Selain Dana BOS:	
Pajak PAUD	57,175.00
Pajak SD, SMP	207,642.00
ADM SD, SMP	9,474,329.60
Croscek / Koreksi Thn sebelumnya SD, SMP	4,968,692.20
Total Dana Keluar	14,707,838.80
Selisih Dana Masuk vs Dana Keluar	9,279,371.20

5.3.1.1.7 Piutang Pajak Daerah	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
	<u>12.609.961.086,00</u>	<u>12.529.285.262,00</u>

Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp12.609.961.086,00. Piutang Pajak Daerah merupakan pajak daerah yang telah ditetapkan nilainya dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah dan sampai dengan 31 Desember 2022 belum ada terealisasi dari pihak wajib pajak sebesar Rp12.609.961.086,00. Selama tahun 2022 telah ada pelunasan piutang Pajak Daerah sebesar Rp1.854.289.521,00 dan dari Surat Ketetapan Pajak



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

Daerah terdapat piutang pajak daerah yang bertambah sebesar Rp1.934.964.743,00. Mutasi piutang pajak daerah diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.36. Mutasi Piutang Pajak Daerah Tahun 2022

No	Uraian	Saldo Awal 2022	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir 2022
1	Pajak Losmen/ Penginapan	1,321,343,000.00	314,169,000.00	11,450,000.00	1,624,062,000.00
2	Pajak Restoran	496,774,600.00	98,059,000.00	1,985,000.00	592,848,600.00
3	Pajak Reklame	3,414,525,717.00	682,214,730.00	84,998,314.00	4,011,742,133.00
4	Pajak Hiburan	139,440,000.00	51,250,000.00	0.00	190,690,000.00
5	PBB	4,557,280,768.00	789,272,013.00	145,317,722.00	5,201,235,059.00
6	PBB-P2 Limpahan dari KPP Sibolga Tahun 2002- 2013	2,599,921,779.00	0.00	1,610,538,485.00	989,383,294.00
Jumlah		12,529,285,864.00	1,934,964,743.00	1,854,289,521.00	12,609,961,086.00

5.3.1.1.8. Piutang Lain-Lain	Tahun 2022	Tahun 2021
PAD yang Sah	(Rp)	(Rp)
	604.565,76	0,00

Dijelaskan bahwa Dana *Transfer Treasury Deposit Facility* (TDF) - Remunerasi DBH/DAU sebesar Rp604.565,76 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 10/KM.5/2022 tentang Pembentukan dan Pengelolaan *Treasury Deposit Facility* dalam Rangka Penyaluran Dana Bagi Hasil TA.2022 Dalam Bentuk Non Tunai. Selanjutnya pencatatan pelaporannya disesuaikan berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.14.1/7481/Keuda, tanggal 15 Maret 2023, Hal: Pengelolaan DBH dan/atau DAU melalui Fasilitas TDF.

5.3.1.1.9. Piutang Transfer	Tahun 2022	Tahun 2021
Pemerintah Pusat	(Rp)	(Rp)
	2.881.916.284,00	2.881.916.284,00

Saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.881.916.284,00. Piutang Transfer Pemerintah Pusat yang belum ditransfer ke rekening kas umum daerah Kabupaten Nias Selatan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp2.881.916.284,00. Mutasi Piutang Transfer Pemerintah Pusat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.37. Mutasi Piutang Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2022

Uraian	Saldo Tahun 2019	Berkurang Tahun 2020 (diterima)	Saldo Akhir Tahun 2020	Berkurang Tahun 2021 (diterima)	Saldo Akhir Tahun 2021	Berkurang Tahun 2022 (diterima)	Saldo Akhir Tahun 2022
Piutang Transfer dari Pemerintah Pusat TA. 2019	5,644,887,837	1,257,291,528	4,387,596,309	1,505,680,025	2,881,916,284	-	2,881,916,284

Dijelaskan bahwa Piutang Transfer Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2020 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada TA. 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.07/2020 tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

Bayar Dana Bagi Hasil TA. 2019 dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19.

5.3.1.1.10 Piutang Transfer Antar Daerah	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
	0,00	11.394.074.628,00

Saldo Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00. Piutang Transfer Antar Daerah merupakan Alokasi Kurang Salur Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 sebesar Rp0,00. Saldo Piutang Transfer Antar Daerah TA. 2021 telah tersalurkan ke RKUD sebesar Rp11.394.074.628,00.

5.3.1.1.11 Penyisihan Piutang	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
	(9.226.933.805,75)	(9.783.569.037,20)

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2022 sebesar Rp(9.226.933.805,75). Penyisihan piutang merupakan nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih atau diperoleh Pemerintah Kabupaten Nias Selatan pada Tahun 2022. Penyisihan piutang diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.38. Penyisihan Piutang Pajak

No	Uraian	Nilai Penyisihan Piutang 2022	Nilai Penyisihan Piutang 2021
1	Pajak Hotel	597,758,550.00	31,721,000.00
2	Pajak Restoran	265,207,950.00	151,078,350.00
3	Pajak Reklame	2,399,951,269.00	266,276,450.00
4	Pajak Hiburan	69,826,500.00	1,818,265,792.10
5	PBB	4,453,231,394.75	5,505,565,571.70
6	Transfer Pemerintah Pusat	1,440,958,142.00	1,440,958,142.00
7	Transfer Pemerintah Antar Daerah	0.00	569,703,731.40
Jumlah		9,226,933,805.75	9,783,569,037.20

Rincian penyisihan piutang per jenis pajak dapat dilihat pada lampiran V.9

5.3.1.1.12 Persediaan	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
	10.689.077.534,00	10.109.899.164,00

Jumlah persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp10.689.077.534,00. Persediaan adalah barang pakai habis yang diperoleh dengan tujuan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat umum. Berdasarkan Kebijakan Akuntansi Kabupaten Nias Selatan dalam Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 05.2_55 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 104 Tahun 2015 persediaan diakui berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

Rekapitulasi Nilai persediaan per 31 Desember 2022 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.39. Rekapitulasi Nilai Persediaan

No	Jenis Persediaan	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Bahan Pakai Habis, Bahan Material, Bahan Cetak dan Pengandaan dan Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga	172.781.975,00	224.658.550,00
2	Obat / Alkon	10.516.295.559,00	9.885.240.614,00
Jumlah		10.689.077.534,00	10.109.899.164,00

Rincian saldo persediaan per OPD dapat di lihat pada lampiran V.10

5.3.1.2. Investasi Jangka Panjang	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
	64.563.963.659,00	64.601.028.167,00

Saldo investasi jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Nias Selatan per 31 Desember 2022 sebesar Rp64.563.963.659,00, mengalami penurunan sebesar Rp37.064.508,00. Penurunan nilai investasi jangka panjang disebabkan oleh adanya rugi pada BUMD PT. Bumi Nisel Cerlang.

5.3.1.2.1 Penyertaan Modal	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
	64.563.963.659,00	64.601.028.167,00

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Nias Selatan merupakan investasi di suatu entitas bisnis pada lembaga yang dipertahankan dalam jangka panjang dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomis dan/atau manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Penyertaan modal pada PT. Bumi Nisel Cerlang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Bumi Nisel Cerlang (BNC) Kabupaten Nias Selatan dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Bumi Nisel Cerlang (BNC) Kabupaten Nias Selatan dan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 41 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012. Selanjutnya Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 09 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan pada PT. Bank Sumut. Realisasi penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Nias Selatan sampai per 31 Desember 2022 sebesar Rp64.563.963.659,00. Rincian penyertaan modal dapat diuraikan sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 5.40. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nias Selatan

No	Uraian	Tahun Penyetoran	Jumlah (Rp)
I	PT. Bank Sumut Tbk		21.100.730.000,00
1	Setoran Pertama	2005	277.834.000,00
2	Setoran Kedua	2006	277.834.000,00
3	Setoran Ketiga	2007	750.000.000,00
4	Pembayaran Premi Saham	2007	(116.408.000,00)
5	Setoran Keempat	2011	2.000.000.000,00
6	Setoran Kelima	2012	1.200.000.000,00
7	Setoran Keenam	2013	2.000.000.000,00
8	Setoran Ketujuh	2017	5.000.000.000,00
9	Setoran Kedelapan	2018	2.000.000.000,00
10	Setoran Kesembilan	2019	6.819.654.530,00
11	Setoran Kesepuluh	2021	891.813.186,00
12	Koreksi Penyesuaian Sesuai Hasil RUPS	2022	2.284,00
II	BUMD (PT. Bumi Nisel Cerlang)		56.500.000.000,00
1	Setoran Pertama	2012	15.000.000.000,00
2	Setoran Kedua	2013	15.000.000.000,00
3	Setoran Ketiga	2015	24.000.000.000,00
4	Setoran Keempat	2017	2.500.000.000,00
Jumlah I + II			77.600.730.000,00

Jumlah investasi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan di PT. Bank Sumut per 31 Desember 2022 sebesar Rp21.100.730.000,00. Berdasarkan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 104 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, menyatakan bahwa kepemilikan saham kurang dari 20% maka menggunakan metode biaya untuk penilaian investasi. Jumlah kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Nias Selatan di PT Bank Sumut kurang dari 20%, sehingga dalam penilaian investasi menggunakan metode biaya. Apabila menggunakan metode biaya maka nilai investasi sebesar harga perolehan, sehingga nilai investasi saham Pemerintah Kabupaten Nias Selatan di PT Bank Sumut per 31 Desember 2022 sebesar Rp21.100.730.000,00.

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Nias Selatan di Badan Usaha Milik Daerah PT Bumi Nisel Cerlang sampai per 31 Desember 2022 sebesar Rp56.500.000.000,00. Terhadap modal PT Bumi Nisel Cerlang seluruhnya merupakan investasi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, sehingga kepemilikan sahamnya lebih dari 50%. Berdasarkan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 104 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, menyatakan bahwa metode ekuitas digunakan jika kepemilikan lebih 50%. Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah.

Penilaian investasi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan di PT. Bumi Nisel Cerlang dilakukan dengan metode ekuitas. Penyajian nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan berdasarkan Laporan Keuangan BUMD PT. Bumi Nisel Cerlang Unaudited atau belum diaudit



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

oleh Kantor Akuntan Publik, sehingga diperoleh kondisi keuangan pada laporan perubahan ekuitas hingga per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.41. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nias Selatan pada BUMD PT Bumi Nisel Cerlang

Tahun	Modal Disetor	Laba (Rugi)	Saldo Investasi
2012	15.000.000.000,00	(771.674.485,00)	14.228.325.515,00
2013	15.000.000.000,00	(1.446.158.109,00)	27.782.167.406,00
2014	0,00	(1.595.007.105,00)	26.187.160.301,00
2015	24.000.000.000,00	(4.217.097.375,00)	45.970.062.926,00
2016	0,00	(723.091.186,00)	45.246.971.740,00
2017	2.500.000.000,00	(2.705.395.837,00)	45.041.575.903,00
2018	0,00	(920.776.800,00)	44.120.799.103,00
2019	0,00	(338.166.262,00)	43.782.632.841,00
2020	0,00	(254.134.565,00)	43.528.498.276,00
2021	0,00	(28.197.825,00)	43.500.300.451,00
2022	0,00	(37.066.792,00)	43.463.233.659,00

Berdasarkan kondisi laporan perubahan ekuitas PT BNC per 31 Desember 2022, maka nilai investasi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan di PT BNC per 31 Desember 2022 sebesar Rp43.463.233.659,00. Dari uraian penyertaan modal pada PT. Bank Sumut dan laba/rugi pada BUMD PT. BNC, maka saldo investasi jangka panjang Pemerintah Kabupaten Nias Selatan per 31 Desember 2022 sebesar Rp64.563.963.659,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.42. Saldo Investasi Jangka Panjang

Uraian	Penyertaan Modal (Rp)	Saldo Laba (Rugi) (Rp)	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)
PT Bumi Nisel Cerlang			
Saldo 31 Desember 2022	56.500.000.000,00	(13.036.766.341,00)	43.463.233.659,00
PT Bank Sumut			
Saldo 31 Desember 2022	21.100.730.000,00	0,00	21.100.730.000,00
Jumlah	77.600.730.000,00	(13.036.766.341,00)	64.563.963.659,00

5.3.1.3. Aset Tetap

Tahun 2022
(Rp)

1.966.840.801.895,69

Tahun 2021
(Rp)

2.023.707.571.666,41

Saldo Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Nias Selatan per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.966.840.801.895,69 merupakan nilai buku aset tetap dengan nilai perolehan sebesar Rp3.025.637.739.584,45 dan akumulasi penyusutan per 31 Desember 2022 sebesar (Rp1.058.796.937.688,76) Rekapitulasi mutasi aset tetap per 31 Desember 2022 berdasarkan harga perolehan dapat dirinci pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.43. Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap Tahun 2022

No	Uraian	Saldo Per 31-12-2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31-12-2022 (Rp)
1.	Tanah	232.472.499.354,51	2.927.536.516,01	0,00	235.400.035.870,52
2.	Peralatan dan Mesin	302.719.434.025,60	48.874.211.226,62	13.457.143.561,91	338.136.501.690,31
3.	Gedung dan Bangunan	980.306.119.638,25	106.291.014.215,43	24.057.166.595,97	1.062.539.967.257,71



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	Saldo Per 31-12-2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31-12-2022 (Rp)
4.	Jalan Irigasi dan Jaringan	1.235.989.017.908,75	85.368.987.507,57	278.29.374.276,97	1.293.528.631.139,35
5.	Aset Tetap Lainnya	59.663.987.109,98	402.874.971,00	0,00	60.066.862.080,98
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	48.101.565.905,17	3.690.449.579,38	15.826.273.938,97	35.965.741.545,58
7.	Jumlah Nilai Perolehan	2.859.252.623.942,26	247.555.074.016,01	81.169.965.465,10	3.025.637.739.584,45
8.	Akumulasi Penyusutan	(835.545.052.275,85)	0,00	0,00	(1.058.796.937.688,76)

5.3.1.3.1 Tanah	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
	235.400.035.870,52	232.472.499.354,51

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2022 sebesar Rp235.400.035.870,52 yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Tabel 5.44. Rekapitulasi Nilai Aset Tetap Tanah Tahun 2022

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Tanah Persil	120.785.943.822,47
2	Tanah Non Persil	13.749.980,00
3	Tanah Lapangan	114.600.342.068,05
	Jumlah	235.400.035.870,52

Rekapitulasi Nilai Aset Tetap Tanah tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 5.45. Rincian Rekapitulasi Nilai Aset Tetap Tanah Tahun 2022

No	Uraian	Jlh Persil	Nilai Perolehan (Rp)
I	Tanah Persil		
	Tanah Bangunan Perumahan Tempat Tinggal	18	1.062.813.597,83
	Tanah Bangunan Perumahan Tempat Perdagangan	63	2.153.328.991,00
	Tanah Bangunan Tempat Kerja	794	117.369.801.233,65
	Tanah Bangunan Sarana Olah Raga	1	200.000.000,00
	Jumlah Tanah Persil	876	120.785.943.822,48
II	Tanah Non Persil		
	Tanah Basah	1	1.200.000,00
	Tanah Pertanian	4	12.549.980,00
Jumlah Tanah Non Persil	5	13.749.980,00	
III	Tanah Lapangan		
	Tanah Lapangan Olahraga	4	216.253.120,00
	Tanah Lapangan Parkir	5	815.740.000,00
	Tanah Lapangan Penimbunan Barang/Sampah	2	5.454.942.416,00
	Tanah Lapangan Terbang	10	33.363.168.584,00
	Tanah Untuk Jalan	253	73.954.822.522,64
	Tanah Bangunan Air	50	692.852.924,40
	Tanah Lainnya	1	102.562.500,00
	Jumlah Tanah Lapangan	325	114.600.342.067,04
	Jumlah I + II + III	1.206	235.400.035.869,52

Pada tahun 2022 saldo tanah terjadi kenaikan atau pertambahan dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp 2.927.536.516,01 dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Tabel 5.46. Mutasi Saldo Tanah Tahun 2022

Saldo Awal per 31 Desember 2021	Rp	232.472.499.354,52
Penambahan :		
Belanja Modal	Rp	159.082.000,00
Reklasifikasi dari Belanja Modal Gedung	Rp	853.839.000,00
Pemberian nilai	Rp	1.045.667.616,00



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

Hibah barang	Rp	868.947.900,00
Jumlah Pertambahan	Rp	2.927.536.516,00
Pengurangan		
Jumlah Pengurangan	Rp	0,00
Penambahan	Rp	2.927.536.516,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2022	Rp	235.400.035.870,52

Rincian mutasi aset tetap tanah per OPD dapat dilihat pada lampiran V.11

- Pemerintah Kabupaten Nias Selatan di dalam daftar barang tanah, memiliki tanah sebanyak 1.206 persil. Dari sejumlah tersebut telah bersertifikat sebanyak 215 persil. Dalam sertifikat tersebut masih terdapat sertifikat yang penggunaan tanahnya untuk pertapakan SMK/SMA sebanyak 5 persil.
- Reklasifikasi dari belanja modal gedung merupakan belanja modal gedung dan bangunan, dimana di dalam kontraknya terdapat pekerjaan yang bersifat menambah nilai tanah, sehingga aset tersebut diklasifikasikan pada aset tanah.

Tabel 5.47. Reklasifikasi Belanja Modal Gedung Tahun 2022

No	Nama Spesifik	Lokasi	Harga Perolehan	OPD
1	Tanah Bangunan Rumah Sakit	RSUD Nias Selatan	853.839.000,00	Dinas Kesehatan
			853.839.000,00	

- Penilaian merupakan pemberian nilai terhadap aset tanah yang belum ada nilai perolehan. Dengan mempedomani PSAP nomor 7 paragraf 20 yang menyatakan bahwa Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Selanjutnya dalam buletin teknis nomor 02 tentang penyusunan neraca awal pemerintah daerah, disebutkan bahwa apabila tidak terdapat nilai pasar, entitas dapat menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) terakhir. Penilaian tanah pada tahun inidilakukan dengan menggunakan NJOP Tahun 2015. Pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021, terkait pengelolaan aset tetap yang belum memadai, dimana Aset Tetap khususnya tanah, terdapat tanah yang telah bersertifikat dan bernilai Rp0,00 belum dicatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB).

Pada tahun ini aset tetap tanah tersebut telah diberikan nilai dan dicatat pada KIB dengan uraian sebagai berikut :

- Tanah yang bersertifikat telah dicatat di KIB

Tabel. 5.48. Tanah yang Bersertifikat telah dicatat di KIB

No	Nama Spesifik Barang	Lokasi	Luas (M2)	Nomor Sertifikat	Nilai (Rp)
1	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	SDN 071205 Hoya	2.459	02.22.03.05.4.00002	60.000.000,00
2	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	SMPN 1 Siduaori	18.998	02.22.03.08.4.00001	25.000.000,00
3	Tanah Bangunan	SMPN 2	10.000	02.22.03.08.4.00005	3.500.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

No	Nama Spesifik Barang	Lokasi	Luas (M ²)	Nomor Sertifikat	Nilai (Rp)
	Pendidikan dan Latihan	Siduaori			
4	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	SDN 071206 Taluzusua	2.000	02.22.03.15.4.00001	100.000.000,00
5	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	SDN 078524 Bukit Gabungan	4.800	02.22.03.05.4.00001	55.000.000,00
6	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	SDN 077302 Golambanua I	2.500	02.22.03.04.4.00002	60.000.000,00
7	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	SDN 078532 Hoya Fana	3.900	02.22.03.01.4.00001	8.750.000,00
8	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	SDN 075100 Hilidohona	2.049	02.22.03.06.4.00001	50.000.000,00
9	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pertapakan Tanah Kantor Camat Maniamolo	1.698	02.23.10.01.2.00006	193.250.000

b. Tanah yang bernilai Rp0,00 telah dicatat di KIB

Tabel. 5.49. Tanah yang bernilai Rp0 telah dicatat di KIB

No	Nama Spesifik Barang	Lokasi	Luas (M ²)	Nomor Sertifikat	Harga Perolehan
1	Tanah Rumdis Guru SD	Sd Negeri 071201 Lolowau	609	02.23.08.16.4.00009	16.443.000,00
2	Tanah Rumah Dinas Guru	Sd Negeri 071122 Teluk Dalam	49	02.23.21.07.4.00002	16.415.000,00
3	Tanah Rumah Dinas Guru	Sd Negeri 071122 Teluk Dalam	64	02.22.06.08.4.00021	21.440.000,00
4	Tanah Sekolah	Smp Negeri 2 Oou	49	02.23.21.07.4.00002	83.300,00
5	Tanah Perkantoran	Dinas Pendidikan	1.345	02.23.07.32.4.00007	13.450.000,00
6	Tanah Kantor Korwil OOU	Dinas Pendidikan	133	02.23.21.03.4.00002	325.850,00
7	Tanah SD Negeri 071202 Helezalulu	Sd Negeri 071202 Helezalulu	2.829	02.22.03.03.4.00005	5.658.000,00
8	Tanah SD Negeri 071202 Helezalulu	Sd Negeri 071202 Helezalulu	6.001	02.22.03.03.4.00007	12.002.000,00
9	Tanah Sekolah	Smp Negeri 3 Siduaori	629	02.23.25.02.4.00002	2.895.916,00
10	Tanah Sekolah	Dinas Pendidikan	962	02.22.08.16.4.00002	98.415.000,00
11	Tanah Sekolah	Dinas Pendidikan	962	02.22.08.16.4.00004	25.974.000,00
12	Tanah Sekolah	Dinas Pendidikan	17.847	02.22.08.16.4.00003	481.869.000,00
13	Tanah Sekolah	Dinas Pendidikan	10.060	02.22.26.11.4.00001	24.647.000,00
14	Tanah Sekolah	Dinas Pendidikan	7.159	02.22.03.02.4.00002	17.539.550,00
15	Tanah Sekolah	Dinas Pendidikan	2.400	02.22.03.08.4.00006	8.400.000,00
16	Tanah Sekolah	Dinas Pendidikan	11.800	02.22.03.07.4.00003	28.910.000,00
17	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Sekretariat Daerah	13.560	02.23.18.19.00003	271.200.000,00
					1.045.667.616,00

Hibah barang merupakan barang milik daerah yang diterima secara hibah dari masyarakat perorangan. Hibah tersebut adalah hibah barang milik



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

daerah berupa tanah yang kemudian diberikan nilai berdasarkan NJOP. Rekapitulasi penerimaan hibah barang milik daerah diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.50. Rekapitulasi Penerimaan Hibah Barang Milik Daerah

No	Nama Spesifik Barang	Jumlah (Persil)	Luas	Nilai (Rp)	Peruntukan
1	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	1	3,547	709,400,000.00	Tanah Puskesmas Teluk Dalam - Baloho
2	Tanah Bangunan Perkantoran Pemerintah	17	24,284	128,816,500.00	Bangunan di Bidang Kepariwisata
3	Tanah untuk Bangunan Tower	15	5,857	30,731,400.00	Bangunan Menara/Lower
TOTAL		33		868,947,900.00	

■ P

ada Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021, terkait pengelolaan aset tetap yang belum memadai, dimana terhadap tanah yang tercatat di KIB PUPR seluas ± 256.000 m² belum dilakukan pengamanan fisik dan hukum. Pengamanan ini dilakukan sehubungan dengan adanya Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor 1469.K/Pdt/2017 tanggal 27 Juli 2017 yang menyatakan bahwa saudara PM dan keluarganya merupakan pemilik atas tanah di kawasan yang dikenal dengan Nuja atau Nuza. Lokasi kawasan Nuja ini terletak di kompleks Kawasan Terpadu Ibukota Kabupaten Nias Selatan sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 05 Tahun 2013. Dalam kawasan tersebut telah ada pembangunan Gedung Kantor Pemerintahan dan penimbunan tanah, dimana tanah tersebut diperoleh secara hibah dari saudara FAD pada tanggal 9 Desember 2013, yang diduga sebagian masuk dalam keputusan Mahkamah Agung tersebut. Tindak lanjut atas permasalahan ini, Kepala Dinas PUPR telah menindaklanjuti dengan surat Nomor 600/501.1/PUPR/A.1/XII/2022, yang menyatakan bahwa pengamanan fisik aset tetap tanah dalam bentuk pembuatan pilar atau patok batas dan pensertifikatan tanah, akan dianggarkan pada Perubahan APBD 2023.

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
	338.136.501.690,31	302.719.434.025,60

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 sebesar Rp338.136.501.690,31 dengan rincian berdasarkan rincian objek sebagai berikut :

Tabel 5.51. Rekapitulasi Nilai Peralatan dan Mesin Tahun 2022

No	Uraian	Saldo	
		Per 31 - 12 - 2022	Per 31 - 12 - 2021
1	Alat Besar	20.452.293.014,72	20.887.810.337,72
2	Alat Angkutan	101.602.824.671,90	98.338.717.742,71
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.440.124.644,82	1.329.154.244,82
4	Alat Pertanian	244.969.486,00	78.170.800,00



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	Saldo	
		Per 31 - 12 - 2022	Per 31 - 12 - 2021
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	53.257.430.617,84	45.123.284.416,11
6	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	8.301.550.134,07	8.197.214.068,28
7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	57.475.595.455,48	50.163.981.254,31
8	Alat Laboratorium	27.606.075.430,67	25.168.613.633,43
9	Alat Persenjataan	339.256.202,16	569.527.670,00
10	Komputer	64.180.722.193,51	49.690.475.683,01
11	Alat Eksplorasi	47.248.941,77	48.692.111,77
12	Alat Pegeboran	-	-
13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	21.508.640,44	36.508.640,44
14	Alat Bantu Eksplorasi	-	-
15	Alat Keselamatan Kerja	240.162.500,00	287.761.000,00
16	Alat Peraga	33.192.453,42	33.192.453,42
17	Pelatan Proses/Produksi	-	-
18	Rambu-Rambu	2.251.424.203,97	2.155.400.204,04
19	Peralatan Olahraga	642.123.099,54	610.929.765,54
	Jumlah	338.136.501.690,31	302.719.434.025,60

Mutasi saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5.52. Mutasi Saldo Peralatan dan Mesin Tahun 2022

Saldo per 31 Desember 2021	Rp	302.719.434.025,60
Pertambahan :		
Belanja modal	Rp	37.113.220.044,00
Reklasifikasi antar aset tetap dari belanja modal gedung dan bangunan	Rp	3.239.822.772,93
Penerimaan Hibah Barang	Rp	2.486.047.854,36
Pemberian nilai barang	Rp	5.880.341.955,00
Kapitalisasi dari belanja barang dan jasa	Rp	138.378.600,00
Mutasi dari OPD	Rp	16.400.000,00
Koreksi pencatatan tahun sebelumnya	Rp	0,33
Jumlah Penambahan	Rp	48.874.211.226,62
Pengurangan :		
Pemberian hibah barang	Rp	2.017.550.456,70
Penghapusan	Rp	6.474.442.332,38
Mutasi antar OPD	Rp	241.428.000,00
Reklasifikasi ke belanja barang jasa	Rp	35.640.000,00
Reklasifikasi ke barang Ekstrakomptabel	Rp	4.688.082.772,83
Jumlah Pengurangan	Rp	13.457.143.561,91
Saldo akhir per 31 Desember 2022	Rp	338.136.501.690,31

Rincian mutasi aset tetap peralatan dan mesin per OPD dapat dilihat pada lampiran V.12

- Pembelian peralatan dan mesin merupakan perolehan peralatan dan mesin dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa yang anggarannya tertuang dalam APBD. Biaya pembelian meliputi harga beli ditambah seluruh biaya administrasi umum hingga Barang Milik Daerah (BMD) tersebut siap untuk digunakan dalam operasional pemerintahan.
- Reklasifikasi antar aset tetap dari belanja modal gedung dan bangunan merupakan aset tetap yang diperoleh dari belanja modal gedung dan bangunan. Namun setelah dilakukan pemeriksaan kontrak dan dokumen serah terima, terdapat barang berupa peralatan dan mesin dalam kontrak tersebut, sehingga dilakukan pengelompokan pencatatan. Jenis barang



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

yang direklasifikasi dari aset tetap belanja modal gedung berupa alat kantor dan rumah tangga, seperti meja, kursi, perlengkapan rumah dinas guru.

- Penerimaan hibah barang merupakan barang milik daerah yang diperoleh secara hibah dari Pemerintahan Pusat dan Provinsi Sumatera Utara, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.53. Penerimaan Hibah Tahun 2022

No	Nama Spesifik Barang	Jumlah (Unit)	Nilai (Rp)	Sumber Hibah
1	Lampu Jalan PJU	154	2.371.247.854,36	Kementerian ESDM, Naskah Hibah No.72/NH/ BN.07/KPB 2022, tanggal 22 Maret 2022.
2	Peralatan Personal Komputer, Printer dan Kamera E-KTP	6	114.800.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara, BAST No. 027/19.E/I/2022, 7 Januari 2022.
Jumlah		160	2.486.047.854,36	

- Kapitalisasi dari belanja barang dan jasa yaitu pembelian BMD berupa peralatan dan mesin yang perolehannya pada anggaran belanja barang dan jasa atau belanja operasi, sehingga pada pencatatan bmd dikelompokkan pada peralatan dan mesin sesuai dengan fisiknya. Jenis bmd yang dikapitalisasi dari belanja barang dan jasa berupa kursi plastik dan papan merek (terbuat dari besi).
- Mutasi dari OPD yaitu perpindahan aset tetap dari OPD ke OPD lain.
- Pemberian nilai barang merupakan upaya pemberian nilai BMD berupa peralatan dan mesin yang nilainya Rp0. Pemberian nilai barang ini dilakukan dengan cara pendekatan, membandingkan jenis bmd (aset tetap) yang mendekati sama pada daftar barang OPD atau pada OPD lain, dan informasi harga barang dari internet. Harga yang dicantumkan merupakan harga perolehan tanpa melakukan penyesuaian atas bmd yang sejenis atau memiliki type yang hampir sama. Pada LHP atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021, terkait pengelolaan aset tetap yang belum memadai, dimana Aset Tetap khususnya peralatan dan mesin sebanyak 2.884 unit masih terdapat yang bernilai Rp0,00. Untuk menindak lanjuti hal tersebut, maka OPD telah melakukan inventarisasi atas barang dan telah memberikan nilai barang dan masih ada yang belum dapat memberikan nilai karena barang tidak dapat ditemukan atau ditelusuri, jenis barang kurang tepat dikategorikan aset tetap. Rekapitulasi aset tetap peralatan dan mesin yang bernilai Rp0,00 telah dicatat pada KIB sebagai berikut :

Tabel 5.54. Rekapitulasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang bernilai Rp0 yang sudah dicatat di KIB

No	OPD	Jlh Unit (Rp 0)	Jlh dicatat di KIB	Nilai Perolehan (Rp)
1	Bappeda	9	9	205.901.805,00
2	BKD	2	2	43.275.500,00
3	Dinas Lingkungan Hidup	4	4	360.000.000,00
4	Dinas Perpustakaan	1	1	1.000.000,00
5	Dinas Sosial	15	15	7.033.000,00
6	Dinas Kominfo	29	29	42.781.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

No	OPD	Jlh Unit (Rp 0)	Jlh dicatat di KIB	Nilai Perolehan (Rp)
7	DPM Desa	2	2	192.891.000,00
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	23	23	321.050.000,00
9	Satpol PP	5	5	34.329.640,00
10	Sekretariat Daerah	9	9	1.886.449.725,00
11	Sekretariat DPRD	30	30	157.564.000,00
12	Dinas Perhubungan	5	5	2.514.427.153,00
13	Kecamatan Aramo	20	20	7.950.000,00
14	Kecamatan Maniamolo	33	33	38.408.632,00
15	Kecamatan Mazo	3	3	60.120.000,00
16	Kecamatan Toma	5	5	6.966.000,00
Jumlah		195	195	5.880.147.455,00

Sedangkan rekapitulasi aset tetap peralatan dan mesin bernilai Rp 0,00 yang belum dicatat di KIB, dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5.55. Rekapitulasi Aset Tetap Peralatan Dan Mesin yang bernilai Rp0 yang belum dicatat di KIB

No	OPD	Jlh Unit (Rp 0)	Keterangan
1	BPBD	110	1) Sebanyak 30 unit barangnya tidak diketahui/ tidak ada, sebanyak 80 unit barangnya ada. 2) Dari sebanyak 80 unit merupakan barang perlengkapan bencana yang kurang tepat dicatat aset tetap
2	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	Barang berupa kendaraan R-2 Yamaha Scorpio Tahun 2006, BB 2168 W, berada di Gudang BPKPAD telah dihapuskan dengan penjualan secara lelang
3	Dinas Kesehatan	293	1) Sebanyak 282 unit tidak jelas informasi barangnya sehingga sulit ditelusuri 2) Sebanyak 9 unit tidak masuk kategori aset tetap 3) 2 unit kendaraan R-2 belum jelas identitasnya (nomor plat)
4	Dinas Pendidikan	2.281	1) Sebanyak 530 unit barang tidak jelas informasi dan tidak memenuhi kriteria ase tetap 2) Sebanyak 1.483 unit akan dilakukan pemberian nilai 3) Sebanyak 268 unit barang tidak jelas tahun perolehannya
5	Inspektorat	2	Hasil inventarisasi barang tidak diketahui
6	Kecamatan Gomo	2	Barang 1 unit kendaraan telah diserahkan di BPKPAD, dan 1 unit Gong/Aramba tidak ada
7	Kecamatan Lolomatua	2	Barang 2 unit kendaraan telah diserahkan di BPKPAD

Daftar aset tetap yang bernilai Rp.0 yang belum dicatat di KIB dapat dilihat pada lampiran V13 s/d V19.

- Pemberian hibah barang merupakan barang milik daerah yang setelah pengadaannya diserahkan penggunaan dan pemeliharaannya kepada Sekolah Swasta. Adapun penerima hibah barang tersebut dirinci sebagai berikut :

Tabel 5.56. Penerima Hibah pada Sekolah Swasta Tahun 2022

No	Sekolah Penerima Hibah BMD	BMD Yang Diterima	Jumlah	Nilai (Rp)
1	TK K Asisi Togizita	Pengadaan alat edukatif (ape) paud	1 Paket	29.136.810,00
2	TK K Harapan Nias	Pengadaan alat edukatif (ape) paud	1 Paket	29.136.810,00
3	TK K Kalvari	Pengadaan alat edukatif (ape) paud	1 Paket	29.136.810,00
4	TK K Kristen Nafiri Kasih	Pengadaan alat edukatif (ape) paud	1 Paket	29.136.810,00



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

No	Sekolah Penerima Hibah BMD	BMD Yang Diterima	Jumlah	Nilai (Rp)
5	SMP S Imanuel Teluk Dalam	Pengadaan peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (ipa) biologi	1 Paket	28.526.825,00
6	SMP S Bintang Harapan Uλουςua	Pengadaan peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (ipa) biologi	1 Paket	28.526.825,00
7	SMP S Imanuel Teluk Dalam	Pengadaan peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (ipa) fisika	1 Paket	30.243.188,64
8	SMP S Bintang Harapan Uλουςua	Pengadaan peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (ipa) fisika	1 Paket	30.243.188,64
9	SMP S Amal Mas 1 Lahusa	Pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi (tik) tingkat smp	1 Paket	128.094.256,25
10	SMP S Bintang Harapan Uλουςua	Pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi (tik) tingkat smp	1 Paket	128.094.256,25
11	SMP S Fajar Mas	Pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi (tik) tingkat smp	1 Paket	128.094.256,25
12	SMP S Fanayama Hilimaenamolo	Pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi (tik) tingkat smp	1 Paket	128.094.256,25
13	SMP S Hoya Sejahtera	Pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi (tik) tingkat smp	1 Paket	128.094.256,25
14	SMP S Imanuel Teluk Dalam	Pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi (tik) tingkat smp	1 Paket	128.094.256,25
15	SMP S Kristen BNKP Hilisimaetano	Pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi (tik) tingkat smp	1 Paket	128.094.256,25
16	SMP S Kristen BNKP Mazino	Pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi (tik) tingkat smp	1 Paket	128.094.256,25
17	SMP S Mitra Kasih BKPN	Pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi (tik) tingkat smp	1 Paket	128.094.256,25
18	SMP S Senora	Pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi (tik) tingkat smp	1 Paket	128.094.256,25
19	SD S Harapan Nias	Pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi (tik)	1 Paket	125.630.156,73
20	SD S PKMI Teluk Dalam	Pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi (tik)	1 Paket	125.630.156,73
21	SD S Bintang Laut	Pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi (tik)	1 Paket	125.630.156,73
22	SD S Imanuel Teluk Dalam	Pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi (tik)	1 Paket	125.630.156,73
Jumlah				2.017.550.456,70

- Penghapusan aset tetap dari daftar barang pengguna barang dan pengelola barang merupakan penghapusan karena pemindahtanganan aset tetap dengan mekanisme penjualan secara lelang. Usulan penghapusan dari OPD didasarkan atas pertimbangan kondisi bmd yang rusak berat dan secara ekonomis tidak menguntungkan jika dilakukan pemeliharaan. Barang yang dijual dengan cara lelang dengan perantaraan KPKNL Padang Sidimpuan adalah kendaraan roda 2, 3, 4 dan 6, alat-alat berat, tiang pancang pelabuhan dan bongkaran bangunan, baik dalam bentuk kendaraan atau besi tua atau *scrab*. Jumlah unit bmd yang telah dihapuskan sebanyak 60 unit, dengan nilai limit sebesar Rp 1.170.474.000,00. Setelah dilakukan proses lelang, telah terjual dengan



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

harga sebesar Rp 4.688.389.687,00. Penghapusan ini telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Pengeloa Barang Nomor 900/17833/5396/BPKPAD/2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Barang. Jumlah nilai perolehan barang yang telah dihapuskan dari KIB Pengguna Barang dan Daftar Barang Pengelola Barang sebesar Rp 6.474.442.332,38.

- Kepemilikan BPKB atas kendaraan bermotor sebanyak 841 buah, terdapat sebanyak 45 BPKB yang belum tercatat di Kartu Inventaris Barang. Rincian daftar BPKB kendaraan yang belum di catat di KIB dapat dilihat pada *lampiran V.20*.
- Reklasifikasi ke barang Ekstrakomptabel merupakan aset tetap yang nilainya dibawah nilai kapitalisasi minimum. Dalam Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 151 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencatatan Kapitalisasi dan Penyusutan Aset Tetap Barang Milik Daerah Kabupaten Nias Selatan, bab VIII pasal 10 ayat 1 (satu) menyatakan bahwa nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk pengeluaran per satuan peralatan dan mesin sebesar Rp1.000.000 terbilang satu juta rupiah. Memperhatikan Buletin Teknis Akuntansi Nomor 15 Tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua, pada Bab III Akuntansi Peralatan dan Mesin yang menyatakan bahwa, pengakuan peralatan dan mesin harus memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika biaya perolehan per satuan peralatan dan mesin kurang dari nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap, maka entitas mengakui/mencatat perolehan peralatan dan mesin sebagai beban operasional dan tidak menyajikannya pada lembar muka neraca, sehingga nilai aset tetap peralatan dan mesin yang tampil pada lembar muka neraca hanya aset tetap Intrakomptabel. Jumlah nilai pertambahan barang Ekstrakomptabel tahun ini sebesar Rp 4.688.082.772,83, sehingga nilai buku aset tetap Ekstrakomptabel per 31 Desember 2022 sebesar 12.807.788.320,20. Rekapitulasi nilai aset tetap Ekstrakomptabel dapat dilihat pada rincian mutasi aset tetap peralatan dan mesin.

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	1.062.539.967.257,71	980.306.119.638,25

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.062.539.967.257,71 yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Tabel 5.57. Rekapitulasi Nilai Gedung dan Bangunan Tahun 2022

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2021 (Rp)
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.051.286.566.872,36	972.831.492.616,84
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	3.513.902.410,00	3.697.497.455,83
3	Bangunan Menara/Monumen	107.325.000,00	0,00
4	Bangunan Tugu/Titik Kontrol/Pagar	7.632.172.975,35	3.777.129.565,58
	Jumlah	1.062.539.967.257,71	980.306.119.638,25

Mutasi saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 5.58. Rekapitulasi Mutasi Saldo Gedung dan Bangunan Tahun 2022

Saldo awal Per 31 Desember 2021			Rp	980.306.119.638,25
Penambahan :				
Belanja Modal	Rp	90.793.400.619,44		
Perolehan aset dari utang	Rp	126.642.384,00		
Kapitalisasi dari belanja barang jasa	Rp	2.331.400.516,16		
Reklasifikasi dari KDP tahun lalu	Rp	13.039.570.695,83		
Jumlah Penambahan			Rp	106.291.014.215,43
Pengurangan :				
Pemberian hibah barang	Rp	2.799.470.065,10		
Reklasifikasi ke aset tetap tanah	Rp	853.839.000,00		
Reklasifikasi ke aset tetap peralatan	Rp	3.239.822.772,93		
Reklasifikasi ke aset tetap JII	Rp	15.884.697.519,82		
Reklasifikasi ke aset tetap KDP	Rp	261.622.930,00		
Pelunasan utang atas pengakuan aset	Rp	847.030.645,00		
Reklas ke aset lain-lain	Rp	170.683.663,12		
Jumlah Pengurangan			Rp	24.057.166.595,97
Saldo Akhir Per 31 Desember 2022			Rp	1.062.539.967.257,71

Rincian mutasi aset gedung dan bangunan per OPD dapat dilihat pada lampiran V.21

- Perolehan gedung pada tahun 2022 meliputi pembangunan gedung baru seperti kantor camat, ruang kelas baru (RKB), rumah dinas guru, gedung perpustakaan, jamban siswa, lanjutan pembangunan rumah dinas, pembangunan puskesmas, rehabilitasi ruang kelas dan rehabilitasi gedung kantor. Biaya perolehan meliputi biaya kontrak dan ditambah dengan seluruh biaya pendukung untuk menghasilkan gedung tersebut. Dalam pencatatan aset gedung, pengeluaran setelah pembangunan awal berupa rehabilitasi/renovasi dikapitalisasi pada aset induknya.
- Reklasifikasi dari belanja barang dan jasa merupakan belanja pemeliharaan/renovasi gedung yang penganggarnya dan realisasinya pada belanja barang dan jasa. Mengingat pekerjaan fisik yang dilakukan menambah manfaat ekonomi dan kapasitas gedung dimasa yang akan datang maka belanja tersebut di reklasifikasi dengan kapitalisasi ke aset tetap gedung induk.
- Reklasifikasi dari KDP merupakan gedung yang tahun lalu dalam proses pengerjaan dan tahun anggaran 2022 pekerjaan dilanjutkan dan telah selesai hingga gedung siap untuk dimanfaatkan. Sehingga pencatatannya beralih ke aset tetap gedung.
- Perolehan aset dari utang merupakan pengakuan aset tetap dari belanja modal gedung yang pekerjaannya secara fisik telah selesai walaupun belum seluruhnya di bayarkan sesuai dengan kontrak.
- Pemberian hibah ke sekolah swasta merupakan barang milik daerah yang penggunaannya dan pemeliharannya diserahkan kepada sekolah. Adapun sekolah penerima hibah barang diuraikan sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 5.59. Hibah BMD Gedung dan Bangunan Kepada Sekolah Swasta Tahun 2022

No	Sekolah Penerima Hibah BMD	BMD Yang Diterima	Jumlah	Nilai (Rp)
1	PAUD Orahua hili	Gedung/Ruang kelas/Ruang Guru	1 Paket	334.655.240,32
2	PAUD Orahua Uluzoi	Gedung/Ruang kelas/Ruang Guru	1 Paket	331.086.714,71
3	PAUD Filadepia Kasih Filadelfia Golambanua I	Gedung/Ruang kelas/Ruang Guru	1 Paket	281.433.298,16
4	Tk K Kristen Nafiri Kasih	Gedung Area Bermain Beserta Ape Luar Ruangan dan Pembangunan Toilet	1 Paket	348.527.843,80
5	TK K Kalvari	Gedung Ruang Guru dan Kepala Sekolah	1 Paket	149.717.612,48
6	TK K Senora	Gedung Ruang Guru dan Kepala Sekolah	1 Paket	126.844.490,00
7	Tk K Asisi Togizita	Gedung Area Bermain Beserta Ape Luar Ruangan	1 Paket	212.918.525,38
8	TK K Harapan Nias	Gedung Area Bermain Beserta APE Luar Ruangan	1 Paket	204.190.818,75
9	SMP Swasta Hoya Sejahtera	Gedung Ruang Tata Usaha dan UKS	1 Paket	810.095.521,50
Jumlah				2.799.470.065,10

5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	1.293.528.631.139,35	1.235.989.017.908,75

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.293.528.631.139,35 yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Tabel 5.60.
Rekapitulasi Nilai Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun 2022

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2021 (Rp)
1	Jalan	787.590.018.213,33	760.820.263.524,66
2	Jembatan	170.393.446.573,49	160.167.351.498,67
3	Bangunan Air/Irigasi	218.450.513.996,39	217.758.582.404,44
4	Instalasi	64.097.732.385,83	42.152.320.463,81
5	Jaringan	52.996.919.970,31	55.090.500.017,17
Jumlah		1.293.528.631.139,35	1.235.989.017.908,75
6	Akumulasi Penyusutan	(638.997.367.999,57)	(507.413.339.977,75)
7	Nilai Buku	654.531.255.339,74	728.575.677.931,00

Mutasi saldo Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5.61. Mutasi Saldo Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun 2022

Saldo Awal 31 Desember 2021	Rp	1.235.989.017.908,75
Penambahan :	Rp	
Belanja modal	Rp	62.734.603.564,47
Reklasifikasi dari belanja modal gedung	Rp	15.758.055.135,82
Perolehan aset tetap dari utang	Rp	2.819.343.653,60
Reklasifikasi dari KDP tahun lalu	Rp	2.612.291.044,74
Kapitalisasi dari belanja barang jasa	Rp	105.000.000,00
Pembayaran utang tahun lalu dengan	Rp	1.338.401.200,21



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

diperpotong pada SPM/SP2D		
Pemberian nilai barang	Rp	1.300.000,00
Jumlah Penambahan	Rp	85.368.994.598,84
Pengurangan :	Rp	
Reklasifikasi ke KDP	Rp	3.428.826.649,40
Pembayaran utang tahun lalu dan aset tetap telah diakui tahun lalu	Rp	22.576.998.402,79
Pembayaran utang tahun lalu dengan diperpotong pada SPM/SP2D	Rp	1.338.401.200,21
Reklasifikasi ke barang dan jasa	Rp	31.556.236,00
Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain (kurang volume pekerjaan)		453.598.879,84
Jumlah Pengurangan	Rp	27.829.381.368,24
Saldo Akhir 31 Desember 2022	Rp	1.293.528.631.139,35

Rincian mutasi aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per OPD dapat dilihat pada lampiran V.22

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
	60.066.862.080,98	59.663.987.109,98

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp60.066.862.080,98 yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Tabel 5.62. Rekapitulasi Nilai Aset Tetap Lainnya Tahun 2022

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2021 (Rp)
1	Bahan Perpustakaan	58.280.548.829,98	57.877.673.858,98
2	Barang Bercorak Kesenian/Budaya	1.742.848.251,00	1.742.848.251,00
3	Hewan	43.465.000,00	43.465.000,00
	Jumlah	60.066.862.080,98	59.663.987.109,98

Mutasi saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo Awal Per 31 Desember 2021	Rp	59.663.987.109,98
Penambahan :		
Belanja modal	Rp	402.874.971,00
Jumlah Penambahan	Rp	402.874.971,00
Pengurangan :		
Jumlah Pengurangan	Rp	0,00
Saldo Akhir Per 31 Desember 2022	Rp	60.066.862.080,98

Rincian Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per OPD dapat dilihat pada lampiran V.23

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
	35.965.741.545,58	48.101.565.905,17

Saldo aset tetap Kontruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp35.965.741.545,58 dengan rincian sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel. 5.63. Rekapitulasi Nilai Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2021 (Rp)
1	Gedung dan Bangunan	30.550.339.431,83	43.328.287.197,67
2	Jalan	2.966.938.583,89	3.783.704.850,04
3	Jembatan	565.174.364,00	350.194.361,00
4	Irigasi	0,00	141.800.744,00
5	Instalasi	1.761.274.853,00	122.014.312,86
6	Jaringan	122.014.312,86	375.564.439,60
	Jumlah	35.965.741.545,58	48.101.565.905,17

Mutasi saldo Kontruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 diuraikan sebagai berikut :

Saldo Awal Per 31 Desember 2021	Rp	48.101.565.905,17
Penambahan :		
Belanja Modal	Rp	3.516.037.381,00
Jumlah Penambahan	Rp	3.516.037.381,00
Pengurangan :		
Reklasifikasi ke aset tetap	Rp	15.651.861.740,57
Jumlah Pengurangan	Rp	15.651.861.740,57
Saldo Per 31 Desember 2022	Rp	35.965.741.545,58

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per OPD dapat dilihat pada lampiran V. 24

- Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah pekerjaan kontrak konstruksi yang sedang dalam proses pengerjaan yang sampai per tanggal pelaporan belum selesai dan siap pakai. Pekerjaan yang masuk dalam kategori kostruksi dalam pengerjaan dilakukan dengan kontrak konstruksi dan swakelola. Biaya konstruksi dalam pengerjaan meliputi pembayaran termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor atau tim swakelola sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan. Suatu konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap apabila konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan dan dapat memberikan manfaat atau jasa sesuai dengan tujuan perolehan. Dijelaskan bahwa terdapat BMD dalam KDP yang dihentikan sementara pekerjaannya karena belum direncanakan lebih lanjut pembangunannya yaitu Gedung Pusat Perkantoran Pemerintah Terpadu yang berlokasi di Kompleks Kawasan Terpadu Ibukota Kabupaten Nias Selatan di jalan Saonigehe KM 3,5 Kecamatan Teluk Dalam. Sedangkan Kantor Camat O'O'U, Kantor Camat Tanah Masa, Kantor Camat Ulu Idanotae, dan Kantor Camat Boronadu dihentikan pelaksanaannya sementara karena *refocusing* anggaran karena COVID-19.
- Nilai KDP adalah sebesar nilai pembayaran atas progres atau kemajuan pekerjaan dan kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima namun belum dibayar seluruhnya.

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
	1.058.796.937.688,76	(835.545.052.275,85)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebesar (Rp1.058.796.937.688,76) merupakan pengakuan akumulasi penyusutan sampai dengan 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 5.64. Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2022

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2021 (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	(234.921.151.623,26)	(195.944.602.129,14)
2	Gedung dan Bangunan	(184.878.416.648,41)	(132.187.110.168,96)
3	Jalan Irigasi dan Jaringan	(638.997.367.999,57)	(507.413.339.977,75)
	Jumlah	(1.058.796.937.688,76)	(835.545.052.275,85)

Mutasi saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.65. Mutasi Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2022

No	Uraian	Saldo Per 31 - 12 -2021 (Rp)	Hitung Ulang Akumulasi Penyusutan Tahun Sebelumnya	Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan Tahun 2022	Saldo Per 31 - 12 -2022 (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	195,944,602,129.14	194,186,392,771.95	(1,758,209,357.19)	40,734,758,851.31	234,921,151,623.26
2	Gedung dan Bangunan	132,187,110,168.96	164,085,161,919.00	31,898,051,750.04	20,793,254,729.40	184,878,416,648.40
3	Jalan Irigasi dan Jaringan	507,413,339,977.75	574,220,096,863.10	66,806,756,885.35	64,777,272,554.00	638,997,369,417.10
	Jumlah	835,545,052,275.85	932,491,651,554.05	96,946,599,278.20	126,305,286,134.71	1,058,796,937,688.76

- Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan dicatat pada akun Beban Penyusutan dengan lawan akun Akumulasi Penyusutan.
- Penyusutan Barang Milik Daerah dilakukan dengan metode garis lurus, dengan formula yaitu nilai yang dapat disusutkan dibagi dengan masa manfaat. Perhitungan penyusutan aset tetap dilakukan secara tahunan sejak aset tetap diperoleh hingga berakhirnya masa manfaat.
- Perhitungan ulang akumulasi penyusutan tahun sebelumnya, hal ini dilakukan karena kurang cermat melakukan perhitungan yang sebagian dihitung secara manual, lalu disesuaikan di dalam sistem aplikasi dan penginputan kembali aset tetap dalam sistem yang sifatnya dikapitalisasi seperti gedung dan jalan. Selain itu adanya penghapusan akumulasi penyusutan sebagai akibat penghapusan aset tetap karena pemindahtanganan. Atas selisih perhitungan ulang ini, maka dilakukan koreksi yaitu dengan pembetulan akun akumulasi penyusutan dengan lawan akun koreksi ekuitas.

5.3.1.4 Aset Lainnya

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
	21.005.438.099,63	44.374.951.395,90

Saldo aset lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp21.005.438.099,63 dibandingkan dengan saldo aset lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp44.374.951.395,90 terjadi penurunan sebesar Rp23.369.513.296,27. Rekapitulasi mutasi aset lainnya dapat diuraikan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 5.66. Rekapitulasi Mutasi Aset Lainnya

No	Uraian	Saldo			Saldo 31 Desember 2022 (Rp)
		31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	12,630,793,904.64	0.00	575,731,321.90	12,055,062,582.34
2	Aset Tidak Berwujud Lainnya	27,909,400.00	274,170,000.00	0.00	302,079,400.00
3	Aset Lain-lain	31,736,702,791.26	624,282,542.97	26,125,669,773.94	6,235,315,560.29
4	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(20,454,700.00)	(59,306,820.00)	0.00	(79,761,520.00)
5	Dana <i>Transfer Treasury Deposit Facility</i> (TDF) - Pokok DBH/DAU	0.00	2,492,742,077.00	0.00	2,492,742,077.00
Jumlah		44,374,951,395.90	3,331,887,799.97	26,701,401,095.84	21,005,438,099.63

Dijelaskan bahwa Dana *Transfer Treasury Deposit Facility* (TDF) - Pokok DBH/DAU sebesar Rp2.492.742.077,00 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 10/KM.5/2022 tentang Pembentukan dan Pengelolaan *Treasury Deposit Facility* dalam Rangka Penyaluran Dana Bagi Hasil TA.2022 Dalam Bentuk Non Tunai. Selanjutnya pencatatan pelaporannya disesuaikan berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.14.1/7481/Keuda, tanggal 15 Maret 2023, Hal: Pengelolaan DBH dan/atau DAU melalui Fasilitas TDF.

5.3.1.4.1 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	12.055.062.582,34	12.630.793.904,64

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah merupakan bagian dari Tagihan Jangka Panjang. Saldo Tuntutan Kerugian Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp12.055.062.582,34 dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp12.630.793.904,64 terjadi penurunan sebesar Rp575.731.321,90 atau 4,56%.

Tabel 5.67. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

No	Tahun	Sisa Per 31 Desember 2021 (Rp)	Tindak Lanjut		Koreksi Lebih / Kurang Saji (Rp)	Sisa Per 31 Desember 2022 (Rp)
			Penambahan	Pengurangan		
1	2005-2007	1,930,629,393.00	0.00	0.00	0.00	1,930,629,393.00
2	2016	4,858,847,111.94	0.00	202,137,649.45	511.45	4,656,708,951.04
3	2017	754,195,544.14	0.00	0.00	0.00	754,195,544.14
4	2018	3,423,080,342.68	0.00	372,014,672.65	(511.25)	3,051,066,181.28
5	2006-2014 (aset lain-lain)	1,664,041,512.88	0.00	1,579,000.00	0.00	1,662,462,512.88
Jumlah		12,630,793,904.64	0.00	575,731,322.10	0.20	12,055,062,582.34

Rincian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dapat dilihat pada lampiran V.25a, V.25b, V.25c, V.25d.

Dijelaskan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebagai berikut:

1. Rincian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tahun 2005-2007 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.68



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

Rincian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tahun 2005-2007

No.	Nama	SALDO PER 31 DESEMBER 2021	Tindak Lanjut s.d. 31 Desember 2022		KETERANGAN
			DISETOR (Rp)	SISA YANG BELUM DIBAYAR	
1	Hotmaria Tampubolon	271,350,863.00	-	271,350,863.00	Sekretariat Daerah (BUD periode 2004 dan 2005)
2	Selamat Manao	49,991,383.00	-	49,991,383.00	Sekretariat Daerah (BUD periode 1 Januari 2006 s.d. 31 Juni 2006)
3	Saferinus Garamba	964,944,263.00	-	964,944,263.00	Sekretariat Daerah (Bendahara Pengeluaran periode 2006)
4	Gooziduhu Telaumbanua	644,342,884.00	-	644,342,884.00	Kuasa BUD tahun 2007
TOTAL PENGEMBALIAN KE KAS DAERAH		1,930,629,393.00	-	1,930,629,393.00	

2. Rincian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah pada Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.69
Rincian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tahun 2016

NO. URUT	NAMA OPD	SALDO PER 31 DESEMBER 2021	KOREKSI DI TAHUN 2022 ATAS LEBIH SAJI DI TAHUN 2021		TINDAKLANJUT 01 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2022		KETERANGAN
			TELAH DISETOR	SISA YANG BELUM DIBAYAR	DISETOR (Rp)	SISA YANG BELUM DIBAYAR	
1	BKPAD	339,741,749.84	-	339,741,749.84	55,302,750.00	284,438,999.84	Pegawai
2	DINAS PENDIDIKAN	21,320,000.00	-	21,320,000.00	-	21,320,000.00	Pegawai
3	DINAS PENDIDIKAN	1,85,971,510.00	-	1,85,971,510.00	5,500,000.00	1,80,471,510.00	Bendahara Pengeluaran
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	1,623,463,336.15	42,021,113.27	1,581,442,222.88	30,961,162.18	1,550,481,060.70	Pihak Ketiga
5	DINAS PEKERJAAN UMUM	509,768,874.19	-	509,768,874.19	-	509,768,874.19	Pihak Ketiga
6	DINAS PEKERJAAN UMUM	312,162,582.48	-	312,162,582.48	970,788.00	311,191,794.48	KSM
7	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	-	-	-	-	Pegawai
8	INSPEKTORAT	-	-	-	-	-	Pegawai
9	SEKRETARIAT DAERAH	48,896,908.00	-	48,896,908.00	32,224,960.00	16,671,948.00	Pegawai
10	SEKRETARIAT DAERAH	575,645,000.00	-	575,645,000.00	15,645,000.00	560,000,000.00	Bendahara Pengeluaran
11	KANTOR LINGKUNGAN HDUP	8,611,997.00	-	8,611,997.00	-	8,611,997.00	Pegawai
12	DINAS PERTANIAN	-	-	-	-	-	Pegawai
13	SEKWAN	60,228,745.00	-	60,228,745.00	7,686,576.00	52,542,169.00	DPRD / Pegawai
14	SEKWAN	8,050,000.00	-	8,050,000.00	-	8,050,000.00	PPTK
15	DINKES	-	-	-	-	-	Bendahara Pengeluaran
16	DINKES	133,885,897.83	-	133,885,897.83	-	133,885,897.83	Pihak Ketiga
17	SATPOL PP	31,100,000.00	-	31,100,000.00	11,825,300.00	19,274,700.00	Bendahara Pengeluaran
TOTAL PENGEMBALIAN KE KAS DAERAH		4,858,846,600.49	42,021,113.27	4,816,825,487.22	160,116,536.18	4,656,708,951.04	

Koreksi di tahun 2022 atas lebih saji di tahun 2021 sebesar Rp42.021.113,27 dan tindak lanjut 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp160.116.536,18, maka jumlah pengurangan pada tahun 2016 sebesar Rp202.137.649,49 dan koreksi lebih/kurang saji sebesar Rp511,45.

3. Rincian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah pada Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.70
Rincian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tahun 2017

No.	Nama	SALDO PER 31 DESEMBER 2021	Tindak Lanjut s.d. 31 Desember 2022		KETERANGAN
			DISETOR (Rp)	SISA YANG BELUM DIBAYAR	
1	DINAS PEKERJAAN UMUM	303,893,244.14	-	303,893,244.14	Pihak Ketiga
2	DINKES	349,795,300.00	-	349,795,300.00	Bendahara Pengeluaran
3	DINKES	100,507,000.00	-	100,507,000.00	Pihak Ketiga
TOTAL PENGEMBALIAN KE KAS DAERAH		754,195,544.14	-	754,195,544.14	



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

4. Rincian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah pada Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.71. Rincian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tahun 2018

NO. URUT	NAMA OPD	PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB	SALDO PER 31 DESEMBER 2021	TINDAKLANJUT S.D. 31 DESEMBER 2022			KETERANGAN
				TGL SETOR	DISETOR (Rp)	SISA YANG BELUM DIBAYAR	
1	SEKRETARIAT DAERAH	CV. TIMBUL BARU JAYA (TBJ)	68,822,966.98		-	68,822,966.98	Pihak Ketiga
2	PEKERJAAN UMUM	PT. NETRALINDO JAYA MANDIRI (NJM)	(0.00)		-	(0.00)	Pihak Ketiga
3	PEKERJAAN UMUM	CV. MITRA UTAMA (MU)	35,126,076.65		-	35,126,076.65	Pihak Ketiga
4	PEKERJAAN UMUM	PT. GILANG PRATAMA JAYA (GPJ)	-		-	-	Pihak Ketiga
5	PEKERJAAN UMUM	CV. PRIMA JAYA (PJ)	6,756,894.40		-	6,756,894.40	Pihak Ketiga
6	PEKERJAAN UMUM	PT. ARNELINDO HAGA WISESA (AHW)	(0.00)		-	(0.00)	Pihak Ketiga
7	PEKERJAAN UMUM	CV. VEGATON (V)	169,519,735.08		-	169,519,735.08	Pihak Ketiga
8	PEKERJAAN UMUM	PT. HARIMAU IRAONO HUNA (HIH)	71,102,106.85		71,102,106.85	-	Pihak Ketiga
9	PEKERJAAN UMUM	CV. MARVEL JAYA (MJ)	25,967,113.59		-	25,967,113.59	Pihak Ketiga
10	PEKERJAAN UMUM	CV. IHAKA (I)	92,413,233.21		-	92,413,233.21	Pihak Ketiga
11	PEKERJAAN UMUM	PT. MESTIKA AGUNG RAYA (MAR)	300,912,565.80		300,912,565.80	0.00	Pihak Ketiga
12	PEKERJAAN UMUM	CV. WELDY (W)	(0.00)		-	(0.00)	Pihak Ketiga
13	PEKERJAAN UMUM	CV. GEWA (G)	43,601,096.54		-	43,601,096.54	Pihak Ketiga
14	PEKERJAAN UMUM	CV. USAHA BERSAMA MANDIRI (UBM)	20,353,011.84		-	20,353,011.84	Pihak Ketiga
15	PEKERJAAN UMUM	CV. PUTRA GUNUNG BATU (PGB)	(0.00)		-	(0.00)	Pihak Ketiga
16	DINAS PERHUBUNGAN	PT. TUNAS HARAPAN NIAS (THN)	-		-	-	Pihak Ketiga
17	DINAS KESEHATAN	NISWA OPRATIWI DUHA (BENDAHARA PENGELUARAN TA. 2018)	-			2,588,506,053.00	Bendahara Pengeluaran / Berdasarkan Surat BPK RI Nomor : 59/S/1/12/2020, tgl 23 Desember 2020
TOTAL PENGEMBALIAN KE KAS DAERAH			834,574,800.93	*	372,014,672.65	3,051,066,181.29	

Tindak lanjut sampai dengan 31 Desember 2022 mengalami pengurangan sebesar Rp372.014.672,65 dan koreksi lebih/kurang saji sebesar (Rp511,25).

5. Rincian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah pada Tahun 2006-2014 (aset lain-lain) dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.72. Rincian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tahun 2006-2014

No.	Nama	Saldo per 31 Desember 2021	Koreksi Pengurangan / Penambahan	Tindak lanjut s.d. 31 Desember 2022		KETERANGAN
				DISETOR (Rp)	SISA YANG BELUM DIBAYAR	
1.	Kas di Bendahara Pengeluaran	1,340,784,562.88	-	1,579,000.00	1,339,205,562.88	
1.1.	Sekretariat Daerah Tahun 2006	334,307,291.88	-	-	334,307,291.88	Bendahara Pengeluaran - Belum ada SKTJM
1.2.	Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2008	600,000,000.00	-	-	600,000,000.00	Bendahara Pengeluaran - Belum ada SKTJM
1.3.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2007	158,623,396.00	-	-	158,623,396.00	Bendahara Pengeluaran - Belum ada SKTJM
1.4.	Sekretariat DPRD Tahun 2007	3,375,825.00	-	-	3,375,825.00	Bendahara Pengeluaran - Belum ada SKTJM
1.5.	Sekretariat DPRD Tahun 2009	164,000,000.00	-	-	164,000,000.00	Bendahara Pengeluaran - Belum ada SKTJM
1.6.	Sekretariat DPRD Tahun 2011	47,976,500.00	-	-	47,976,500.00	Bendahara Pengeluaran - Belum ada SKTJM
1.7.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2013	158,300.00	-	-	158,300.00	Bendahara Pengeluaran - Belum ada SKTJM
1.8.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPM-PD) Tahun 2014 - Kesbangpol	1,579,000.00	-	1,579,000.00	-	Bendahara Pengeluaran - Belum ada SKTJM
1.9.	Kantor Camat Fanayama Tahun 2014	3,710,000.00	-	-	3,710,000.00	Bendahara Pengeluaran - Belum ada SKTJM
1.10.	Dinas Perhubungan Tahun 2013	25,154,250.00	-	-	25,154,250.00	Bendahara Pengeluaran - Belum ada SKTJM
1.11.	Dinas Pendidikan Tahun 2013	1,900,000.00	-	-	1,900,000.00	Bendahara Pengeluaran - Belum ada SKTJM
2.	Kas di Bendahara Penerimaan	308,256,950.00	-	-	308,256,950.00	
2.1.	Sekretariat Daerah (Bagian Umum) Tahun 2013	306,093,950.00	-	-	306,093,950.00	Bendahara Pengeluaran - Belum ada SKTJM
2.2.	Dinas PSDA Tahun 2012	2,163,000.00	-	-	2,163,000.00	Bendahara Pengeluaran - Belum ada SKTJM
3.	TP/TGR yang ada SKTJM	15,000,000.00	-	-	15,000,000.00	Bendahara Pengeluaran - Belum ada SKTJM
Reklasifikasi Aset Lain-Lain Kas di Bendahara pada LKPD Audited TA. 2020 ke Tagihan Jangka Panjang Kas di Bendahara Pengeluaran di beberapa OPD		1,664,041,512.88	-	1,579,000.00	1,662,462,512.88	

Rincian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dapat dilihat pada lampiran V.25e.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

Tuntutan Ganti Rugi Daerah terhadap Pihak Ketiga di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPM-PD) pada tahun 2014 mengalami pengurangan sebesar Rp1.579.000,00 karena telah ditindak lanjutin dan disetor oleh Badan Kesbangpol pada tanggal 28 Desember 2022.

5.3.1.3.8 Aset Tidak Berwujud Lainnya	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
	302.079.400,00	27.909.400,00

Saldo Aset Tidak Berwujud Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar 302.079.400,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.73. Rekapitulasi Nilai Aset Tidak Berwujud Lainnya

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2021 (Rp)	Pertambahan Tahun 2022 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2022 (Rp)
1	Software	27.909.400,00	274.170.000,00	302.079.400,00
Jumlah		27.909.400,00	274.170.000,00	302.079.400,00

Rincian mutasi Aset Tidak Berwujud Lainnya per OPD dapat dilihat pada lampiran V.26

Pertambahan Software merupakan aplikasi pajak daerah dengan nilai Rp131.535.000,00 dan aplikasi Retribusi Daerah dengan nilai Rp142.635.000,00.

5.3.1.4.4 Aset Lain-Lain	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
	6.235.315.560,29	31.736.702.791,26

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.235.315.560,29 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.74. Rekapitulasi Rincian Aset Lain-Lain Tahun 2022

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2022 (Rp)
1	Tanah	4.886.113.111,00	0,00	3.808.333.111,00	1.077.780.000,00
2	Gedung dan Bangunan	13.509.221.342,93	170.683.663,12	9.323.973.234,33	4.355.931.771,72
3	Jalan Irigasi dan Jaringan	7.915.572.955,33	453.598.879,85	7.567.568.046,61	801.603.788,57
4	Aset Tetap Lainnya	5.425.795.382,00	0,00	5.425.795.382,00	0,00
Jumlah		31.736.702.791,26	624.282.542,97	26.125.662.682,66	6.235.315.560,29

Rincian mutasi saldo untuk masing-masing OPD dapat dilihat pada lampiran V.27

- Mempedomani PSAP Nomor 07 paragraf 78 yang menyatakan bahwa aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah tidak memenuhi defenisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Dalam Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 104 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan Berbasis Akrua, menyatakan bahwa aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-Lain menurut nilai tercatatnya.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

- Aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena menunggu proses pemindahtanganan. Dalam Buletin Teknis Nomor 02 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah menyatakan bahwa pos aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dikelompokkan ke dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, dan kemitraan dengan pihak ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah. Informasi atas aset lain-lain ini antara lain aset yang tidak ada atau tidak diketahui, aset yang telah dihibahkan namun masih dicatat, tidak memenuhi kriteria aset tetap, aset yang secara pemanfaatan dan pemeliharaannya telah diserahkan kepada kelompok masyarakat, aset yang telah hancur fisiknya karena kondisi alam.
- Terhadap aset lain-lain ini, Pengguna Barang melakukan inventarisasi dan hasil inventarisasi mengajukan penghapusan nilai buku. Pengurangan nilai aset lain-lain merupakan penghapusan nilai buku setelah persetujuan Bupati yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Keputusan Pengelola Barang dengan Nomor 900/20116/6165/BPKPAD/2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa aset lain-lain dari Daftar Pengguna Barang dan Daftar Barang Milik Daerah.
- Terdapat penambahan aset lain-lain sebesar Rp624.282.542,97 yang bersumber dari pengembalian atas kurang volume pekerjaan pada TA.2022 dan telah disetorkan ke kas daerah sehingga menjadi pengurang nilai perolehan aset tetap tersebut. Adapun rincian sebagaimana pada lampiran V.28.

5.3.1.4.5 Aset Tetap Ekstrakomptabel	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	38.681.157.801,19	33.993.075.028,36

Saldo Aset Tetap Ekstrakomptabel per 31 Desember 2022 sebesar Rp38.681.157.801,19. Aset tetap Ekstrakomptabel merupakan aset peralatan dan mesin yang nilainya dibawah nilai minimum kapitalisasi aset tetap sebagaimana Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 151 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencatatan Kapitalisasi dan Penyusutan Aset Tetap Barang Milik Daerah Kabupaten Nias Selatan. Rincian saldo aset tetap Ekstrakomptabel untuk masing-masing OPD dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.75. Rekapitulasi Mutasi Nilai Aset Tetap Ekstrakomptabel

Saldo Awal 31-12-2021	Rp	33.993.075.028,36
Penambahan	Rp	4.688.082.772,83
Saldo Awal 31-12-2022	Rp	38.681.157.801,19
Akumulasi Penyusutan Tahun Sebelumnya	Rp	(20.171.040.008,10)
Hitung Ulang Akumulasi Penyusutan Tahun Sebelumnya	Rp	(19.161.753.350,47)
Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan	Rp	1.009.286.657,63
Beban Penyusutan Tahun 2022	Rp	6.711.616.130,52
Akumulasi Penyusutan Sampai Tahun 2022	Rp	(25.873.369.480,99)
Nilai Buku Per 31-12-2022	Rp	12.807.788.320,20

Rincian nilai Aset Tetap Ekstrakomptabel dapat dilihat pada lampiran V.29.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

5.3.1.4.6 Aset Tetap Bernilai Sejarah

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 paragraf 65 menyatakan bahwa beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah (*heritage assets*) dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala seperti candi dan karya seni. Pemerintah Kabupaten Nias Selatan juga memiliki aset tetap bernilai sejarah berupa batu megalitikum sebanyak 37 buah yang berada pada 5 (lima) Kecamatan. Terhadap aset bersejarah tidak terdapat nilai harga wajar. Lokasi aset bersejarah tersebut diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.76. Lokasi Aset Tetap Bernilai Sejarah

No	Jenis Benda	Jumlah	Lokasi
1	Batu Megalit	25	Kecamatan Teluk Dalam, Onolalu dan Maniamolo
2	Batu Megalit	5	Kecamatan Siduaõri
3	Batu Megalit	3	Kecamatan Idanõtae
4	Batu Megalit	2	Kecamatan Huruna
5	Batu Megalit	2	Kecamatan Hilimegai Desa Togizita
	Jumlah	37	

Beberapa foto batu megalit yang berada di Kabupaten Nias Selatan ditampilkan pada gambar di bawah ini :

- Desa Olayama Kecamatan Huruna



- Desa Lahusa Satua Kecamatan Idanõtae



5.3.1.4.7 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Tahun 2022
(Rp)
(79.761.520,00)

Tahun 2021
(Rp)
(20.454.700,00)

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022 sebesar (Rp79.761.520,00) dibandingkan dengan saldo tahun 2021 sebesar (Rp20.454.700,00).



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

5.3.1.4.8 Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
	2.492.742.077,00	0,00

Dijelaskan bahwa Dana *Transfer Treasury Deposit Facility* (TDF) - Pokok DBH/DAU sebesar Rp2.492.742.077,00 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 10/KM.5/2022 tentang Pembentukan dan Pengelolaan *Treasury Deposit Facility* dalam Rangka Penyaluran Dana Bagi Hasil TA.2022 Dalam Bentuk Non Tunai. Selanjutnya pencatatan pelaporannya disesuaikan berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.14.1/7481/Keuda, tanggal 15 Maret 2023, Hal: Pengelolaan DBH dan/atau DAU melalui Fasilitas TDF. *Rincian Dana Transfer Treasury Deposit Facility* (TDF) dapat dilihat pada lampiran V.30.

5.3.2. Kewajiban	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
	27.028.414.740,42	99.011.761.137,56

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Nias Selatan per 31 Desember 2022 sebesar Rp27.028.414.740,42 yang terdiri dari utang perhitungan pihak ketiga (PFK), utang belanja, dan utang jangka pendek lainnya.

5.3.2.1. Utang PFK	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
	2.195.184.920,82	3.901.808.047,00

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 09 paragraf 5 menyatakan bahwa utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) merupakan utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Iuran Wajib Pegawai, Iuran Askes, Taspen, dan Iuran Taperum. Selain itu juga termasuk potongan BPJS, dimana pada akhir periode akuntansi belum disetorkan. Saldo utang perhitungan pihak ketiga per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.195.184.920,82 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.77. Rekapitulasi Utang PFK

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2021 (Rp)
1	PPN dan PPh pada Bendahara Pengeluaran	197.331.799,00	197.044.463,00
2	Pengakuan Iuran BPJS TA.2022 yang belum dibayarkan per 31 Desember 2022	1.934.030.948,00	0,00
3	Iuran Kesehatan atas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) TA. 2020 sebesar 1%	63.822.173,82	0,00
4	Iuran Kesehatan atas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) TA. 2020	0,00	875.128.656,00
5	Iuran Kesehatan atas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) TA. 2021	0,00	867.413.940,00
6	Iuran Kesehatan atas Tunjangan Profesi Guru (TPG) TA. 2020	0,00	930.662.512,00
7	Iuran Kesehatan atas Tunjangan Profesi Guru (TPG) TA. 2021	0,00	1.031.558.476,00
Jumlah		2.195.184.920,82	3.901.808.047,00



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

Dijelaskan bahwa Utang PFK :

1. PPN dan PPh pada Bendahara Pengeluaran sebesar Rp197.331.799,00 terdiri dari :
 - a. Dinas Pendidikan TA 2013 sebesar Rp149.820.233,00
 - b. Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PSDA) TA.2013 sebesar Rp10.575.230,00
 - c. Badan Kepegawaian Daerah TA.2016 dan TA.2017 sebesar Rp35.798.000,00, telah di setor lunas ke kas negara pada tanggal 08 Februari 2023 dengan Nomor NTPN : F5CC90T6CQFL90T4.
 - d. Kantor Camat Teluk Dalam TA.2022 sebesar Rp525.909,00 telah di setor lunas ke kas negara pada tanggal 06 Januari 2023.
 - e. Kantor Camat Pulau-Pulau Utara TA.2022 sebesar Rp612.427,00 belum disetor sampai dengan tanggal 29 April 2023 ke kas Negara.
2. Pengakuan Iuran BPJS TA.2022 yang belum dibayarkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.934.030.948,00 adalah merupakan Beban Iuran Jaminan Kesehatan Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) Pemerintah Daerah antara KPPN, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Gunung Sitoli Tahun Tagihan 2022 berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Nomor:121/BA/I-13/0223 dan Nomor: 900/0657/BPKPAD/2023, tanggal 08 Februari 2023.
3. Iuran Kesehatan atas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) TA. 2020 sebesar 1% sebesar Rp63.822.173,82 adalah merupakan sisa utang atas koreksi kurang saji utang PFK (BPJS) sebesar Rp218.782.164,00 berdasarkan Surat BPJS Nomor:791/I-13/0822, tanggal 03 Agustus 2022 dan Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Iuran Jaminan Kesehatan Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) Pemerintah Daerah antara KPPN, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Gunung Sitoli Triwulan-II Tahun 2022 Nomor:S35/BH/I-13/0722, tanggal 22 Juli 2022. Selanjutnya telah dilakukan pembayaran oleh Pemerintah Kabupaten Nias Selatan kepada BPJS pada tanggal 13 Desember 2022 sebesar Rp154.959.990,00 berdasarkan Surat Pernyataan Utang yang dikeluarkan oleh Pps. Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Gunung Sitoli (Ibu Risti Anadewi Harahap) pada tanggal 03 Mei 2023, sehingga sisa besaran utang PPU 1% di tahun 2020 sebesar Rp63.822.713,82.
4. Penjelasan Lainnya atas pembayaran Utang PFK pada LKPD Tahun 2021 adalah Iuran Kesehatan atas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) TA. 2020 sebesar Rp875.128.656,00 dan TA. 2021 sebesar Rp867.413.940,00, Iuran Kesehatan atas Tunjangan Profesi Guru (TPG) TA. 2020 sebesar Rp930.662.512,00, dan TA. 2021 sebesar Rp1.031.558.476,00 telah dibayarkan sebesar Rp3.500.000.000,00 pada tanggal 14 Juni 2022 dan sebesar Rp204.763.584,00 pada tanggal 21 November 2022.

5.3.2.2 Utang Belanja

Tahun 2022	Tahun 2021
(Rp)	(Rp)
785.878.000,00	511.806.810,00

Saldo utang belanja 31 Desember 2022 sebesar Rp785.878.000,00 merupakan utang belanja subsidi tahun 2022 sebagaimana diuraikan berikut ini.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 5.78. Rekapitulasi Utang Belanja

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2021 (Rp)
1	Utang Belanja Barang dan Jasa T.A. 2021 di BPKPAD	0,00	511.806.810,00
2	Utang Belanja Subsidi T.A. 2021 dan 2022 di Dinas Perhubungan	785.878.000,00	0,00
Jumlah		785.878.000,00	511.806.810,00

Rincian utang belanja dapat dilihat pada lampiran V.31.

5.3.2.3 Utang Jangka Pendek Lainnya	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	24.047.351.819,60	94.598.146.280,56

Saldo utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp24.047.351.819,60. Utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2022 yang terdiri dari Dana Jamkesmas dan Jampersal, utang belanja berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Nias Selatan Nomor 700/01/LHP-ITKAB/2018 tanggal 20 November 2018 atas hasil verifikasi bahwa utang belanja tahun 2014, utang belanja tahun 2015, utang dana desa tahun 2015, utang Dana Desa tahun 2016 dan utang jangka pendek lainnya pada Dinas PUPR. Utang jangka pendek lainnya dapat diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 5.79. Utang Jangka Pendek Lainnya

No.	Jenis Utang	Sisa Utang per Desember 2021	Terbayar/Penyelesaian pada Tahun 2022	Penambahan Utang T.A. 2022	Sisa Utang per 31 Desember 2022
1	Klaim Jampersal dan Jamkesmas Tahun 2012	17,177,644.81	17,177,644.81	-	-
2	Utang Belanja (SP2D Tahun 2014)	1,523,864,370.00	-	-	1,523,864,370.00
3	Utang Belanja (SP2D Tahun 2015)	19,464,838,629.00	-	-	19,464,838,629.00
4	Utang Dana Desa T.A 2015	47,641,961,655.00	47,641,961,655.00	-	-
5	Utang Dana Desa TA 2016	20,821,312.00	20,821,312.00	-	-
6	Utang Jangka Pendek Lainnya pada Dinas PUPR T.A 2020, 2021, dan 2022	25,929,482,669.75	25,690,177,502.75	2,819,343,653.60	3,058,648,820.60
TOTAL		94,598,146,280.56	73,370,138,114.56	2,819,343,653.60	24,047,351,819.60

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada lampiran V.32.

5.3.3. Ekuitas	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	2.116.176.437.056,97	2.063.056.864.097,41

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal pelaporan. Saldo Ekuitas Pemerintah Kabupaten Nias Selatan per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.116.176.437.056,97.

5.4. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

5.4.1 EKUITAS	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	2.116.176.437.056,97	2.063.056.864.097,41



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Saldo akhir ekuitas pada TA.2022 adalah sebesar Rp2.116.176.437.056,97 yang terdiri dari Ekuitas Awal sebesar Rp2.063.056.864.097,41, Surplus/Defisit LO sebesar Rp151.592.176.296,72, Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar (Rp98.472.603.337,16) yaitu Koreksi Ekuitas Lainnya.

5.4.2 Ekuitas Awal	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
	<u>2.063.056.864.097,41</u>	<u>1.936.839.242.386,55</u>

Ekuitas Awal Tahun 2022 sebesar Rp2.063.056.864.097,41 merupakan saldo akhir ekuitas Tahun 2021.

5.4.3 Surplus/Defisit – LO	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
	<u>151.592.176.296,72</u>	<u>108.665.395.876,48</u>

Surplus-LO sebesar Rp151.592.176.296,72 merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada neraca Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022.

5.4.4 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
	<u>(98.472.603.337,16)</u>	<u>17.552.225.834,38</u>

Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar (Rp98.472.603.337,16) merupakan nilai akun koreksi ekuitas lainnya. Koreksi ekuitas lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Koreksi ekuitas lainnya sebesar (Rp7.170.280.425,51) dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.80. Nilai Koreksi Ekuitas Lainnya

No.	OPD	Nilai Penyesuaian
1	Dinas Pendidikan	(521.161.444,00)
2	Dinas Kesehatan	(299.046.000,00)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(4.050.369.445,00)
4	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Perlindungan Masyarakat	(33.700.000,00)
5	Dinas Sosial	2.288.950,56
6	Dinas Lingkungan Hidup	(1.667.859.630,03)
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(949.999,99)
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(29.285.708,66)
9	Dinas Perhubungan	0,01
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	38.846.400,03
11	Dinas Kebudayaan Pariwisata Dan Kepemudaan Olahraga	128.816.500,08
12	Dinas Perpustakaan	1.000.000,24
13	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,	(41.234.742,50)



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
14	Dinas Pertanian	44.962.112,53
15	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	(70.409.173,14)
16	Sekretariat Daerah	(646.095.242,24)
17	Sekretariat DPRD	19.637.999,73
18	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3,18
19	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah	17.177.644,41
20	Inspektorat	(15.579.788,35)
21	Kecamatan Maniamolo	34.619.130,98
22	Kecamatan Toma	6.966.000,00
23	Kecamatan Aramo	(0,05)
24	Kecamatan Uluusua	(0,02)
25	Kecamatan Tanah Masa	(0,89)
26	Kecamatan Idanotae	(0,01)
27	Kecamatan Pulau-Pulau Batu	0,01
28	Kecamatan Amandraya	(19.575.000,28)
29	Kecamatan Susua	(18.226.914,99)
30	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	(51.102.076,92)
Jumlah		(7.170.280.425,31)

- b. Koreksi ekuitas atas piutang sebesar (Rp1.610.537.885,00) merupakan koreksi atas pembayaran utang pada tahun 2022 pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
- c. Koreksi ekuitas atas penyisihan piutang sebesar Rp569.703.131,40 pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
- d. Koreksi ekuitas atas Aset Tetap sebesar (Rp58.485.709.715,38), Rincian koreksi dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.81. Nilai Koreksi Ekuitas Aset Tetap

No.	OPD	Nilai Penyesuaian
1	Dinas Pendidikan	(2.719.043.126,79)
2	Dinas Kesehatan	1.464.679.559,35
3	Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang	(59.740.014.641,20)
4	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	0,01
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.929.989,83
6	Dinas Perhubungan	2.514.427.153,00
7	Dinas Perpustakaan	(1.000.000,00)
8	Sekretariat Daerah	0,10
9	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah	31.435.200,00
10	Kecamatan Lolomatua	(35.728.000,00)
11	Kecamatan Toma	0,33
12	Kecamatan Umbunasi	1,46
13	Kecamatan Fanayama	(0,47)
14	Kecamatan Hibala	(16.200.000,00)
15	Kecamatan Pulau-Pulau Batu	5.804.149,00
Jumlah		(58.485.709.715,38)

- e. Koreksi ekuitas atas Akumulasi Penyusutan sebesar (Rp32.277.862.300,60) Rincian koreksi dapat dirinci sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 5.82. Nilai Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan

No.	OPD	Nilai Penyesuaian
1	Dinas Pendidikan	(31.891.946.856,81)
2	Dinas Kesehatan	(0,02)
3	Dinas Lingkungan Hidup	0,02
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(785.059,79)
5	Dinas Perhubungan	(381.932.440,41)
6	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga	(55.088.849,83)
7	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	(0,01)
8	Sekretariat Daerah	0,01
9	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah	16.162.906,30
10	Inspektorat	0,01
11	Kecamatan Lolomatua	35.728.000,00
12	Kecamatan Susua	(0,07)
Jumlah		(32.277.862.300,60)

- f. Koreksi ekuitas atas Investasi Jangka Panjang sebesar Rp2.284,00, pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
- g. Koreksi ekuitas atas aset lainnya sebesar (Rp1.869.066.882,70), Rincian koreksi dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 5.83. Nilai Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan

No.	OPD	Nilai Penyesuaian
1	Dinas Pendidikan	(1.490.940,00)
1	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Perlindungan Masyarakat	33.700.000,00
2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(133.372.000,00)
3	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah	(1.767.903.942,69)
4	Kecamatan Siduaori	(0,01)
Jumlah		(1.869.066.882,70)

- h. Koreksi ekuitas atas Kewajiban Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp2.371.148.455,43 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

5.4.5. Ekuitas Akhir	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
	<u>2.116.176.437.056,97</u>	<u>2.063.056.864.097,41</u>

Ekuitas Akhir sebesar Rp2.116.176.437.056,97 adalah merupakan ekuitas akhir Pemerintah Kabupaten Nias Selatan pada Tahun 2022.

5.5. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam Pendapatan, Beban, Surplus/Defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Laporan



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

Operasional pada TA.2022 memperoleh Surplus-LO sebesar Rp151.592.177.005,48.

5.5.1 Pendapatan-LO	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	<u>1.028.888.581.236,85</u>	<u>1.120.566.701.610,62</u>

Jumlah pendapatan-LO selama tahun 2022 sebesar Rp1.028.888.581.236,85. Pendapatan-LO terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO sebesar Rp40.636.523.756,96, Pendapatan Transfer – LO sebesar Rp985.056.609.625,53, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO sebesar Rp3.195.447.854,36.

5.5.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	<u>40.636.523.756,96</u>	<u>34.730.841.822,62</u>

Pendapatan Asli Daerah (PAD)–LO per 31 Desember 2022 sebesar Rp40.636.523.756,96. Rincian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)–LO TA. 2022 sebagai berikut.

Tabel 5.84. Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Pajak Hotel- LO	662.226.893,00	545.226.000,00
2	Pajak Restoran dan sejenisnya -LO	4.472.592.803,49	3.929.875.454,82
3	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya- LO	138.175.087,00	7.936.000,00
4	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya -LO	74.625.000,00	58.465.000,00
5	Pajak Reklame Papan/ Billboard/ ideotron/ Megatron- LO	1.047.386.685,00	884.132.668,00
6	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri – LO	3.461.401.572,00	2.707.747.429,00
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya- LO	1.096.358.618,01	1.453.760.469,80
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)- LO	1.049.409.125,00	1.037.398.392,00
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)- Pemindahan Hak- LO	338.450.943,00	389.687.727,00
10	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan- LO	17.734.000,00	15.668.500,00
11	Retribusi Pelayanan Parkir ditepi jalan umum- LO	0,00	0,00
12	Retribusi Pelayanan Pasar- LO	56.778.000,00	55.893.500,00
13	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah- LO	0,00	42.000.000,00
14	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	29.500.000,00	0,00
15	Retribusi Pemakaian Alat	52.400.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
16	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan- LO	6.500.000,00	36.186.000,00
17	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan- LO	13.859.625,00	18.984.630,00
18	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan Modal pada BUMN- LO	0,00	1.770.398.984,00
19	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan Modal pada BUMD- LO	5.350.484.156,00	3.926.782.873,00
20	Hasil Penjualan Alat Angkutan- LO	0,00	821.317.621,00
21	Jasa Giro- LO	1.775.705.061,23	1.990.809.671,00
22	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara - LO	(532.131.208,83)	(21.999.500,00)
23	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain- LO	6.558.642.474,47	4.315.366.081,00
24	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain – LO	4.789.725.266,00	22.681.821,00
25	Pendapatan Denda PBBP2 – LO	52.765.819,00	15.021.424,00
26	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) – LO	9.729.373.150,00	10.707.501.077,00
27	Lain-lain PAD yang Sah - LO	604.565,76	0,00
Jumlah		40.636.523.756,96	34.730.841.822,62

5.5.2.1 Pendapatan Pajak Daerah – LO

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
	12.202.451.639,50	10.982.458.140,62

Jumlah Pendapatan Pajak Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp12.202.451.639,50. Rincian realisasi Pendapatan Pajak Daerah tahun 2022 sebagai berikut.

Tabel 5.85. Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LO

No	Uraian	Pendapatan Pajak - LO Per 31 Desember 2022 (Rp)	Pendapatan Pajak - LO Per 31 Desember 2021 (Rp)
1	Pajak Hotel	662,226,893.00	545,226,000.00
2	Pajak Restoran	4,472,592,803.49	3,937,811,454.82
3	Pajak Hiburan	74,625,000.00	58,465,000.00
4	Pajak Papan Reklame/Bill Board	1,047,386,685.00	884,132,668.00
5	Pajak Penerangan Jalan	3,461,401,572.00	2,707,747,429.00
6	Pajak Mineral bukan logam dan batuan Lainnya	1,096,358,618.01	1,453,760,469.80
7	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	1,049,409,125.00	1,037,398,392.00
8	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	338,450,943.00	389,687,727.00
Jumlah		12,202,451,639.50	11,014,229,140.62



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

5.5.2.2 Pendapatan Retribusi Daerah – LO	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	176.771.625,00	168.732.630,00

Pendapatan Retribusi Daerah-LO per 31 Desember 2022 sebesar Rp176.771.625,00. Rincian realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO tahun 2022 sebagai berikut.

Tabel 5.86. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah - LO

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Persampahan	17,734,000.00	15,668,500.00
2	Retribusi Los	56,778,000.00	55,893,500.00
3	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	29,500,000.00	0.00
4	Retribusi Pemakaian Alat	52,400,000.00	0.00
5	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0.00	42,000,000.00
6	Retribusi Pelayanan Pelabuhan	6,500,000.00	36,186,000.00
7	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	13,859,625.00	18,984,630.00
Jumlah		176,771,625.00	168,732,630.00

5.5.2.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan– LO	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	5.350.484.156,00	5.697.181.857,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan– LO per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.350.484.156,00. Sumber Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah tahun 2022 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.87. Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMN – LO	0,00	1.770.398.984,00
2	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah – LO	5.350.484.156,00	3.926.782.873,00
Jumlah		5.350.484.156,00	5.697.181.857,00

5.5.2.4. Lain-Lain PAD yang Sah – LO	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	22.906.816.336,46	17.850.698.195,00

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO per 31 Desember 2022 sebesar Rp22.906.816.336,46. Rincian realisasi Lain- Lain PAD yang Sah - LO tahun 2022 sebagai berikut.

Tabel 5.88. Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah– LO

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin- LO	0,00	821.317.621,00
2	Jasa Giro Kas Daerah – LO	1.775.705.061,23	1.990.809.671,00
3	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara – LO	(532.131.208,83)	(21.999.500,00)
4	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara, atau Pejabat lain – LO	7.090.773.683,30	4.315.366.081,00
5	Penerimaan Komisi, Potongan, atau bentuk lain – LO	4.789.725.266,00	22.681.821,00



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
6	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan – LO	52.765.819,00	15.021.424,00
7	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya – LO	0,00	0,00
8	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	9.729.373.150,00	10.707.501.077,00
9	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	604.565,76	0,00
Jumlah		22.906.816.336,46	17.850.698.195,00

Dijelaskan bahwa Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO merupakan Dana *Transfer Treasury Deposit Facility* (TDF) - Remunerasi DBH/DAU sebesar Rp604.565,76 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 10/KM.5/2022 tentang Pembentukan dan Pengelolaan *Treasury Deposit Facility* dalam Rangka Penyaluran Dana Bagi Hasil TA.2022 Dalam Bentuk Non Tunai. Selanjutnya pencatatan pelaporannya disesuaikan berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.14.1/7481/Keuda, tanggal 15 Maret 2023, Hal: Pengelolaan DBH dan/atau DAU melalui Fasilitas TDF.

5.5.3. Pendapatan Transfer - LO	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	985.056.609.625,53	958.465.839.180,00

Jumlah Pendapatan Transfer per 31 Desember 2022 sebesar Rp985.056.609.625,53. Rincian realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2022 sebagai berikut.

Tabel 5.89. Rincian Pendapatan Transfer– LO

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –LO	947.545.445.178,53	906.990.498.510,00
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO	35.018.422.370,00	51.475.340.670,00
3	Pendapatan Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) - Pokok DBH/DAU	2.492.742.077,00	0,00
Jumlah		985.056.609.625,53	958.465.839.180,00

Dijelaskan bahwa Pendapatan Dana *Transfer Treasury Deposit Facility* (TDF) - Pokok DBH/DAU sebesar Rp2.492.742.077,00 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 10/KM.5/2022 tentang Pembentukan dan Pengelolaan *Treasury Deposit Facility* dalam Rangka Penyaluran Dana Bagi Hasil TA.2022 Dalam Bentuk Non Tunai. Selanjutnya pencatatan pelaporannya disesuaikan berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.14.1/7481/Keuda, tanggal 15 Maret 2023, Hal : Pengelolaan DBH dan/atau DAU melalui Fasilitas TDF.

5.5.3.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	950.038.187.225,53	906.990.498.510,00



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan per 31 Desember 2022 sebesar Rp950.038.187.225,53. Rincian realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat-dana perimbangan tahun 2022 sebagai berikut.

Tabel 5.90. Rincian Pendapatan Dana Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Dana Bagi Hasil Pajak	15,269,168,578.00	13,952,815,830.00
	DBH PBB - LO	9,609,796,173.00	8,223,853,077.00
	DBH PPh Pasal 21- LO	4,660,174,462.00	5,072,079,126.00
	DBH PPh Pasal 25 & 29 Wajib Pajak Orang Pribadi - LO	808,858,687.00	520,505,800.00
	DBH Cukai Hasil Tembakau	190,339,256.00	136,377,827.00
2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	14,909,090,248.00	8,671,549,179.00
	DBH SDA Minyak Bumi - LO	33,201,500.00	4,181,800.00
	DBH SDA Gas Bumi - LO	46,549,308.00	18,526,000.00
	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi - LO	271,608,342.00	249,020,142.00
	DBH SDA Mineral dan Batubara- Landrent - LO	0.00	1659,286,535.00
	DBH SDA Mineral dan Batubara- Royalty - LO	8,685,696,687.00	3,764,348,849.00
	DBH SDA Kehutanan-PSDH - LO	3,913,723,411.00	1,520,857,259.00
	DBH SDA Kehutanan-IIUPH - LO	0.00	327,009,594.00
	DBH SDA Perikanan	1,958,310,000.00	1,128,319,000.00
3	Dana Alokasi Umum	616,629,359,999.53	617,556,640,000.00
	Dana Alokasi Umum	616,629,359,999.53	617,556,640,000.00
4	Dana Alokasi Khusus	303,230,568,430.00	266,809,493,501.00
	DAK Fisik Bidang Pendidikan	67,160,343,567.00	51,136,252,968.00
	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB	28,750,800,749.00	48,051,396,237.00
	DAK Bidang Perumahan dan Pemukiman- Penyediaan Rumah	0.00	2,613,770,700.00
	DAK Fisik Bidang Pertanian- Penugasan Pembangunan/ Renovasi	0.00	5,201,088,251.00
	DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan - LO	0.00	1418,182,200.00
	DAK Fisik Bidang Pariwisata	0.00	9,973,258,000.00
	DAK Fisik Bidang Jalan-Reguler-Jalan - LO	9,731,117,770.00	11,204,837,658.00
	DAK Fisik Bidang Jalan-Penugasan-Jalan - LO	0.00	3,935,000,874.00
	DAK Fisik Bidang Air Minum - Penugasan	10,340,946,204.00	5,842,816,487.00
	DAK Fisik Sanitasi- Penugasan Bidang - LO	7,136,980,000.00	11,592,641,000.00
	DAK Fisik Bidang Irigasi- Penugasan Bidang - LO	0.00	6,565,965,551.00
	DAK Fisik Bidang Transportasi dan Perdesaan - LO	0.00	2,032,680,318.00
	DAK Non Fisik-BOS Reguler - LO	64,962,470,991.00	0.00
	DAK Non Fisik-BOS Kinerja - LO	2,200,000,000.00	0.00
	DAK Non Fisik-TPG PNSD - LO	22,516,105,500.00	24,722,032,080.00
	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD - LO	1,359,600,000.00	1,094,500,000.00
	DAK Non Fisik-TKG PNSD - LO	28,784,786,000.00	31,060,846,150.00
	DAK Non Fisik-BOP PAUD - LO	5,364,987,000.00	3,779,100,000.00
	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan - LO	511,400,000.00	268,750,000.00
	DAK Non Fisik-BOKB- BOK - LO	44,263,370,712.00	37,774,396,368.00
	DAK Non Fisik-PK2UKM - LO	401,660,880.00	565,464,300.00
	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan - LO	0.00	2,150,189,359.00
	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata - LO	609,926,100.00	806,753,000.00
	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal - LO	353,696,000.00	185,491,000.00
	DAK Non Fisik-BOKB- KB - LO	6,164,134,880.00	4,489,081,000.00
	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian - LO	125,500,000.00	345,000,000.00
	Pendapatan Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) - Pokok DBH/DAU - LO	2,492,742,077.00	0.00
	Jumlah	950,038,187,255.53	906,990,498,510.00

5.5.3.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO

Tahun 2022
(Rp)
35.018.422.370,00

Tahun 2021
(Rp)
51.475.340.670,00

Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2022 sebesar 35.018.422.370,00 dengan rincian sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 5.91. Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO	10.459.866.059,00	40.081.266.042,00
	Pajak Kendaraan Bermotor	5.381.892.013,00	20.040.984.338,00
	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.333.942.498,00	6.921.746.130,00
	Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2.668.142.317,00	6.040.717.425,00
	Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Umum	75.889.231,00	227.934.367,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LO	21.161.387.058,00	18.243.958.410,00
	Pajak Rokok	21.161.387.058,00	18.243.958.410,00
3	Bantuan Keuangan Khusus- LO	3.397.169.253,00	0,00
	Bantuan Khusus dari Pemerintah Provinsi - LO	3.397.169.253,00	0,00
	Jumlah	35.018.422.370,00	51.475.340.670,00

5.5.4 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah- LO	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	<u>3.195.447.854,36</u>	<u>127.370.020.608,00</u>

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.195.447.854,36. Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.92. Rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pendapatan Hibah - LO	3.195.447.854,36	54.601.159.470,00
2	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan -LO	604.565,76	72.768.861.138,00
	Jumlah	3.196.052.420,12	127.370.020.608,00

Dijelaskan bahwa Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO merupakan Dana *Transfer Treasury Deposit Facility* (TDF) - Remunerasi DBH/DAU sebesar Rp604.565,76 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 10/KM.5/2022 tentang Pembentukan dan Pengelolaan *Treasury Deposit Facility* dalam Rangka Penyaluran Dana Bagi Hasil TA.2022 Dalam Bentuk Non Tunai. Selanjutnya pencatatan pelaporannya disesuaikan berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.14.1/7481/Keuda, tanggal 15 Maret 2023, Hal: Pengelolaan DBH dan/atau DAU melalui Fasilitas TDF.

5.5.4.1 Pendapatan Hibah- LO	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	<u>3.195.447.854,36</u>	<u>54.601.159.470,00</u>

Jumlah Pendapatan Hibah per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.195.447.854,36. Rincian Pendapatan Hibah diuraikan sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 5.93. Rincian Pendapatan Hibah yang Sah - LO

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat- LO	2.371.247.854,36	54.129.265.650,00
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah- LO	114.800.000,00	467.943.020,00
3	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/ Perorangan Dalam Negeri- LO	709.400.000,00	3.950.800,00
Jumlah		3.195.447.854,36	54.601.159.470,00

5.5.3.2	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan- LO	Tahun 2022 (Rp) <hr/> 0,00	Tahun 2021 (Rp) <hr/> 72.768.861.138,00
----------------	---	---	--

Jumlah Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan per 31 Desember 2022 sebesar Rp72.768.861.138,00. Rincian Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.94. Rincian Lain-Lain Pendapatan

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pendapatan Hibah dari Dari Dana BOS- LO	0,00	72.768.861.138,00
Jumlah		0,00	72.768.861.138,00

5.5.5.	Beban	Tahun 2022 (Rp) <hr/> 847.309.874.923,71	Tahun 2021 (Rp) <hr/> 956.181.423.922,75
---------------	--------------	---	---

Jumlah beban operasional Pemerintah Kabupaten Nias Selatan per 31 Desember 2022 sebesar Rp847.309.874.923,71.

5.5.5.1	Beban Pegawai	Tahun 2022 (Rp) <hr/> 361.318.274.988,84	Tahun 2021 (Rp) <hr/> 369.777.592.976,00
----------------	----------------------	---	---

Beban Pegawai merupakan beban untuk pegawai, baik yang terkait kegiatan secara langsung maupun tidak terkait dengan kegiatan. Beban pegawai diterima oleh aparatur Pemerintah, yaitu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap dan Uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan. Beban pegawai berupa gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan, honorarium kegiatan dan lembur. Realisasi beban pegawai selama TA.2022 sebesar Rp361.318.274.988,84. Rincian beban pegawai dapat diuraikan sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 5.95. Beban Pegawai

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN – LO	228.652.201.916,00	226.221.703.321,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN – LO	32.822.445.723,00	52.143.128.398,00
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya – LO	58.169.411.427,84	55.475.951.177,00
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD – LO	16.824.560.742,00	16.821.000.431,00
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH – LO	166.328.620,00	126.196.164,00
6	Beban Penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH – LO	431.380.560,00	359.863.416,00
7	Beban Pegawai BOS – LO	24.251.946.000,00	18.629.750.069,00
Jumlah		361.318.274.988,84	369.777.592.976,00

5.5.5.2. Beban Persediaan

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
	68.527.396.767,00	78.639.058.425,30

Beban Persediaan selama TA.2022 sebesar Rp68.527.396.767,00. Rincian Beban Persediaan dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.96. Beban Persediaan

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	7,980,000.00	2,310,000.00
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2,764,607,843.00	2,337,277,914.00
Beban Bahan-Bahan Baku	2,140,266,500.00	2,136,655,000.00
Beban Bahan-Isi Tabung Gas	100,000,000.00	15,000,000.00
Beban Bahan-Bahan Lainnya	1,825,176,410.00	7,704,599,884.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis	11,102,487,870.00	18,497,914,381.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan	8,239,770.00	-
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6,989,382,099.00	5,993,407,067.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	541,446,000.00	450,518,800.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan	900,000.00	8,850,000.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan	108,720,000.00	2,199,500.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot	500,329,765.00	510,031,372.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	467,799,925.00	522,281,784.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan	97,826,689.00	45,016,260.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-	190,836,750.00	-
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan	1,907,689,191.00	801,377,199.00
Beban Obat-Obatan-Obat	3,758,798,698.00	5,952,997,360.00
Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	948,653,338.00	500,000,000.00
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada	14,137,070,885.00	11,514,760,213.00
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak	29,970,000.00	-
Beban Makanan dan Minuman Rapat	16,957,893,562.00	17,503,151,611.30
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2,853,171,800.00	2,675,083,000.00
Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan	266,040,000.00	35,337,000.00
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	26,660,000.00	6,804,000.00
Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	125,094,350.00	125,675,480.00
Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota	-	434,280,000.00
Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	32,353,500.00	28,015,000.00
Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	106,771,560.00	97,700,000.00
Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	217,587,752.00	465,716,600.00
Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	231,174,350.00	22,650,000.00
Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	4,198,910.00	2,500,000.00
Beban Pakaian Pelatihan Kerja	-	74,410,000.00
Beban Pakaian Olahraga	8,000,000.00	73,440,000.00
Beban Pakaian Paskibraka	70,269,250.00	99,099,000.00
Total	68,527,396,767.00	78,639,058,425.30

Rincian beban persediaan per OPD dapat di lihat pada lampiran V.10



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

Dijelaskan bahwa penyajian beban persediaan secara aplikasi sebagaimana pada tabel 5.96 diatas, sudah termasuk makan minum dan pakaian dinas. Namun menurut Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor: 104 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan bahwa yang termasuk beban persediaan adalah Belanja Bahan Pakai Habis, Belanja Bahan/Material, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat / pihak ke tiga dan Obat-Obatan/Alkon, sehingga total nilai beban persediaan yang sesungguhnya TA.2022 sebagaimana pada *Lampiran V.10* sebesar Rp 45.864.286.486,35.

5.5.5.3. Beban Jasa	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
	113.626.574.699,42	139.428.892.346,25

Beban Jasa selama TA.2022 sebesar Rp113.626.574.699,42. Rincian Beban Jasa dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.97. Beban Jasa

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Beban Jasa Kantor	54,502,963,986.00	76,022,644,773.00
2	Beban Iuran Jaminan/ Asuransi	4,108,518,135.00	3,117,452,200.00
3	Beban Iuran Jaminan Kesehatan	1,997,853,121.82	-
4	Beban Sewa Tanah	38,500,000.00	239,300,000.00
5	Beban Sewa Peralatan dan mesin	1,931,208,000.00	1,355,250,000.00
6	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	422,850,000.00	485,135,000.00
7	Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-
8	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	511,546,600.00	831,450,000.00
9	Beban Jasa Konsultasi Konstruksi	550,840,100.00	2,056,719,850.00
10	Beban Jasa Konsultas Non Konstruksi	-	-
11	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	-	-
12	Beban Kursus/ Pelatihan, Sosialisasi, bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	436,515,118.00	1,051,969,000.00
13	Beban Uang yang diberikan kepada pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat	0.00	7,479,720,968.00
14	Beban Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain / Masyarakat	5,597,616,133.00	4,963,736,113.25
15	Beban Barang dan Jasa BOS	43,528,163,505.60	41,931,714,442.00
Jumlah		113,626,574,699.42	139,535,092,346.25

Dijelaskan bahwa Beban Iuran Jaminan Kesehatan sebesar Rp1.997.853.121,82 merupakan penambahan atas beban utang kepada BPJS yang belum dibayarkan per 31 Desember 2022 yang meliputi: (1). sebesar Rp1.934.030.948,00 adalah Beban Iuran Jaminan Kesehatan Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) Pemerintah Daerah antara KPPN, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Gunung Sitoli Tahun Tagihan 2022 berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Nomor:121/BA/I-13/0223 dan Nomor: 900/0657/BPKPAD/2023, tanggal 08 Februari 2023. (2). Iuran Kesehatan atas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) TA. 2020 sebesar 1% sebesar Rp63.822.173,82 adalah merupakan sisa utang atas koreksi kurang saji utang PFK (BPJS) sebesar Rp218.782.164,00 berdasarkan Surat BPJS Nomor:791/I-13/0822, tanggal 03 Agustus 2022 dan Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Iuran



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

Jaminan Kesehatan Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) Pemerintah Daerah antara KPPN, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Gunung Sitoli Triwulan-II Tahun 2022 Nomor:S35/BH/I-13/0722, tanggal 22 Juli 2022. Selanjutnya telah dilakukan pembayaran oleh Pemerintah Kabupaten Nias Selatan kepada BPJS pada tanggal 13 Desember 2022 sebesar Rp154.959.990,00 berdasarkan Surat Pernyataan Utang yang dikeluarkan oleh Pps. Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Gunung Sitoli (Ibu Risti Anadewi Harahap) pada tanggal 03 Mei 2023, sehingga sisa besaran utang PPU 1% di tahun 2020 sebesar Rp63.822.713,82.

5.5.5.4. Beban Pemeliharaan	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	<u>5.593.145.601,00</u>	<u>4.881.623.970,00</u>

Beban Pemeliharaan selama TA.2022 sebesar Rp5.593.145.601,00. Rincian Beban Pemeliharaan dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.98. Beban Pemeliharaan

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Beban Pemeliharaan Tanah	-	72,800,000.00
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4,021,338,661.00	3,767,422,545.00
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	207,290,760.00	343,811,700.00
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	1,357,691,180.00	528,470,000.00
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	6,825,000.00	62,919,725.00
Jumlah		5,593,145,601.00	4,775,423,970.00

5.5.5.5. Beban Perjalanan Dinas	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	<u>75.599.804.653,00</u>	<u>84.751.378.916,00</u>

Beban Perjalanan Dinas selama TA.2022 sebesar Rp75.599.804.653,00. Rincian Beban Perjalanan Dinas dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.99. Beban Perjalanan Dinas

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	48,212,510,907.00	15,431,729,362.00
2	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	27,387,293,746.00	69,319,649,554.00
Jumlah		75,599,804,653.00	84,751,378,916.00

5.5.5.6. Beban Subsidi	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	<u>2.681.430.000,00</u>	<u>2.206.950.000,00</u>

Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau lokasi anggaran yang diberikan Pemerintah daerah kepada perusahaan untuk jasa yang dihasilkan dapat



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

terjangkau oleh masyarakat. Belanja subsidi merupakan belanja untuk subsidi angkutan laut sesuai dengan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Belanja Subsidi Angkutan Laut. Realisasi beban Subsidi selama TA.2022 sebesar Rp2.681.430.000,00. Rincian beban Subsidi sebagai berikut.

Tabel 5.100. Beban Subsidi

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Beban Subsidi BUMN	0,00	532.000.000,00
2	Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	2.681.430.000,00	1.674.950.000,00
Jumlah		2.681.430.000,00	2.206.950.000,00

5.5.5.7. Beban Hibah

Tahun 2022
(Rp)

7.552.513.861,00

Tahun 2021
(Rp)

14.987.498.266,00

Beban Hibah merupakan belanja hibah kepada instansi vertikal, badan/ lembaga/ organisasi kemasyarakatan/swasta. Beban hibah ini juga termasuk Beban Beasiswa Pendidikan Bidang Kesehatan dan Pendidikan Lainnya yang dilaksanakan berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah oleh masing-masing lembaga/ organisasi dan sebagai dinas teknis pengawasan beasiswa ini adalah Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. Realisasi beban hibah - LO selama TA.2022 sebesar Rp7.552.513.861,00. Rincian beban hibah sebagai berikut.

Tabel 5.101. Beban Hibah

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar	30.000.000,00	4.000.000.000,00
2	Beban Hibah Uang Dana BOS yang diterima oleh Satdikdas Negeri	0,00	8.255.128.700,00
3	Beban Hibah Uang Dana BOS yang diterima oleh Satdikdas Swasta	0,00	1.288.550.000,00
4	Beban Hibah Kepada Partai Politik	1.299.993.340,00	1.443.819.566,00
5	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	6.222.520.521,80	0,00
6	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
7	Beban Hibah kepada Badan/Lembaga/ Organisasi Kemasyarakatan /Swasta	0,00	0,00
8	Beban Hibah Pemilu KDH/WKDH	0,00	0,00
9.a	Hibah Kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	0,00	0,00
9.b	Hibah Kepada Panwaslu Provinsi/ Kabupaten/ Kota	0,00	0,00
10	Beban Hibah Kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00
Jumlah		7.552.513.861,80	14.987.498.266,00

5.5.5.8. Beban Bantuan Sosial

Tahun 2022
(Rp)

19.586.412.643,00

Tahun 2021
(Rp)

4.012.161.531,00

Beban Bantuan Sosial merupakan belanja bantuan sosial yang dapat diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Nias Selatan kepada perorangan atau kelompok



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

organisasi masyarakat. Beban bantuan sosial ini juga termasuk Beban Beasiswa Pendidikan Bidang Kesehatan dan Pendidikan Lainnya dan sebagai dinas teknis pengawasan beasiswa ini adalah Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta *monitoring* dan evaluasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Nias Selatan telah diatur dalam Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 37 Tahun 2021. Beban bantuan sosial selama TA. 2022 sebesar Rp19.586.412.643,00. Rincian realisasi beban bantuan sosial diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.102. Beban Bantual Sosial

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	1.600.000.000,00	0,00
2	Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	0,00	150.000.000,00
3	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan, dan Bidang Lainnya)	17.986.412.643,00	3.862.161.531,00
Jumlah		19.586.412.643,00	4.012.161.531,00

5.5.5.9. Beban Penyisihan Piutang	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	<u>50.134.691,95</u>	<u>2.876.103.864,15</u>

Beban Penyisihan piutang merupakan beban penyisihan piutang pajak dan penyisihan transfer pusat Kabupaten Nias Selatan yang diperkirakan tidak dapat ditagih. Beban penyisihan piutang sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp50.134.691,95 yang terdiri dari beban penyisihan piutang/Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah sebesar Rp13.067.899,95 dan beban lain-lain/Beban Penurunan Nilai Investasi sebesar Rp37.066.792,00 untuk mencatat kerugian yang dibukukan oleh PT. BNC Tahun 2022.

5.5.5.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	<u>126.363.102.014,70</u>	<u>122.691.865.056,05</u>

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban yang ditanggung oleh aset tetap akibat nilai manfaat dan ekonomis dari aset tersebut semakin berkurang dibanding dengan nilai perolehannya. Pengaturan penyusutan telah diatur dalam Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 104 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual. Beban Penyusutan periode sampai dengan tahun 2022 sebesar Rp126.363.102.014,70. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 5.103. Beban Penyusutan dan Amortisasi

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Tanah	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	40.734.758.851,34	41.812.160.841,97
3	Gedung dan Bangunan	20.793.254.729,36	17.802.144.086,64
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	64.777.271.136,48	63.073.832.777,44
5	Aset Lainnya	0,00	0,00
6	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	57.815.880,00	3.727.350,00
Jumlah		126.363.102.014,70	122.691.865.056,05

5.5.5.11. Beban Transfer

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<u>66.411.085.003,00</u>	<u>131.928.298.572,00</u>

Beban Transfer merupakan beban Transfer kepada Pemerintah Desa. Jumlah desa penerima Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tahun 2022 sebanyak 459 desa dari 35 Kecamatan. Realisasi beban bantuan keuangan ke desa selama TA.2022 sebesar Rp66.411.085.003,00.

Tabel 5.104. Beban Transfer

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	66.411.085.003,00	131.928.298.572,00
Jumlah		66.411.085.003,00	131.928.298.572,00

5.5.5.12 Surplus

**Penjualan/Pertukaran
/Pelepasan Aset Non
Lancar - LO**

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<u>(3.782.763.433,00)</u>	<u>0,00</u>

Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO sebesar (Rp3.782.763.433,00) merupakan penghapusan alat berat atas penjualan secara lelang dengan kode jurnal 02/JPBMD/2022 sebesar (Rp3.699.855.433,00) dan Penghapusan aset genset karena penjualan secara lelang dengan kode Jurnal 03/JPBMD/2022 sebesar (Rp82.908.000,00).

**5.5.5.13 Defisit Dari Kegiatan
Non Operasional
Lainnya - LO**

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<u>23.939.660.083,42</u>	<u>55.558.485.281,39</u>

Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO merupakan Defisit Penghapusan Aset Lainnya sebesar Rp23.939.660.083,42, untuk lebih jelas rinciannya dapat dilihat pada *Lampiran V.33*.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

5.5.5.14 Beban Tak Terduga	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	<u>2.264.106.500,00</u>	<u>161.396.530,00</u>

Beban Tak Terduga - LO merupakan Pembayaran Sisa Dana BOS Tahun Anggaran 2011 pada BPKPAD Kabupaten Nias Selatan TA. 2022 sebesar Rp2.264.106.500,00 sesuai dengan SK Direktur Jendral Perimbangan Keuangan Nomor KEP-20/PK/2022 Tentang Rincian Sisa Dana Bantuan Operasional Sekolah TA 2011.

5.5.6 Surplus / Defisit- LO	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	<u>151.592.176.296,72</u>	<u>108.665.395.876,48</u>

Surplus/Defisit LO adalah selisih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus Laporan Operasional (LO) Pemerintah Kabupaten Nias Selatan per 31 Desember 2022 sebesar Rp151.592.176.296,72.

5.6. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas (*cashflow statement*) bertujuan memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Periode pelaporan arus kas Pemerintah Kabupaten Nias Selatan untuk TA.2022 yaitu 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2022. Laporan arus kas disajikan dengan menggunakan metode langsung (*directmethod*) yaitu metode penyajian arus kas dimana pengelompokkan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto harus diungkapkan. Pengklasifikasian arus kas terdiri dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

5.6.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih dari aktivitas operasi per 31 Desember 2022 berasal dari :

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Arus Masuk Kas	1.352.651.456.133,03	1.400.323.929.994,16
Arus Keluar Kas	1.094.842.561.282,60	1.166.282.754.236,08
Arus Kas Bersih	257.808.894.850,43	234.041.175.758,08

a. Arus Masuk Kas

Arus masuk kas dari aktivitas operasi sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.352.651.456.133,03. Dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.105. Arus Masuk Kas Arus dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Penerimaan Pajak Daerah	10.119.323.120,50	8.806.322.592,62
2	Penerimaan Retribusi Daerah	176.771.625,00	168.732.630,00



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
3	Penerimaan HPKD yang dipisahkan	5.350.484.156,00	5.697.181.857,00
4	Lain-Lain PAD yang Sah	18.749.953.292,53	17.329.099.671,54
5	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.271.842.426.941,00	1.255.472.466.063,00
6	Pendapatan Antar Daerah	46.412.496.998,00	40.081.266.042,00
7	Pendapatan Hibah	0,00	0,00
8	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	72.768.861.138,00
Jumlah		1.352.651.456.133,03	1.400.323.929.991,16

b. Arus Keluar Kas

Arus keluar kas dari aktivitas operasi sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.094.842.561.282,60 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.106. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Belanja Pegawai	365.005.664.573,00	366.078.209.392,00
2	Belanja Barang dan Jasa	264.828.304.494,60	298.935.202.417,08
3	Belanja Subsidi	2.051.730.000,00	3.203.700.000,00
4	Belanja Hibah	2.735.493.340,00	14.987.498.266,00
5	Belanja Bantuan Sosial	19.586.412.643,00	4.012.161.531,00
6	Belanja Tidak Terduga	2.264.106.500,00	161.396.530,00
7	Belanja Bantuan Keuangan	438.370.849.732,00	478.904.586.100,00
Jumlah		1.094.842.561.282,60	1.166.282.754.236,08

5.6.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas bersih dari aktivitas investasi per 31 Desember 2022 berasal dari :

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Arus Masuk Kas	4.688.389.687,00	821.317.621,00
Arus Kas Keluar	191.302.931.909,23	245.999.389.955,17
Arus Kas Bersih	(186.614.542.222,23)	(245.178.072.334,17)

a. Arus Masuk Kas

Arus masuk kas dari aktivitas investasi sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar 4.688.389.687,00.

Tabel 5.107. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	4.688.389.687,00	821.317.621,00
Jumlah		4.688.389.687,00	821.317.621,00

b. Arus Keluar Kas

Arus keluar kas dari aktivitas investasi sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp191.302.931.909,23 dengan rincian sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 5.108. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Belanja Modal Tanah	159.082.000,00	0,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	37.113.220.044,00	44.732.853.314,00
3	Belanja Gedung dan Bangunan	90.793.400.619,44	99.210.146.287,79
4	Belanja Jalan, Jembatan, Irigasi, Instalasi dan Jaringan	62.560.184.274,79	98.819.290.526,38
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	677.044.971,00	2.345.286.641,00
6	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	891.813.186,00
Jumlah		191.302.931.909,23	245.999.389.955,17

5.6.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan per 31 Desember 2022 berasal dari :

Tabel 5.109. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Arus Masuk Kas	0,00	0,00
Arus Keluar Kas	0,00	891.813.816,00
Arus Kas Bersih	0,00	(891.813.816,00)

a. Arus Masuk Kas

Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.

b. Arus Keluar Kas

Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.110. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Pembayaran Pokok utang (utang belanja tahun 2015)	0,00	0,00
2	Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo Kepada Pemerintah Daerah Lain	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00

5.6.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris per 31 Desember 2022 berasal dari:

Tabel 5.111. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Arus Kas Masuk	64.439.283.113,50	61.337.945.547,64
Arus Kas Keluar	64.438.144.777,50	61.338.324.982,64
Arus Kas Bersih	1.138.336,00	(379.435)



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

a. Arus Masuk Kas

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp64.439.283.113,50 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.112. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Penerimaan PFK	64.439.283.113,50	61.337.945.547,64
2	Saldo Sisa Uang Transitoris	0,00	0,00
3	Koreksi SiLPA FKTP	0,00	0,00
Jumlah		64.439.283.113,50	61.337.945.547,64

b. Arus Keluar Kas

Arus keluar kas dari aktivitas transitoris sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp64.438.144.777,50 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.113. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Pengeluaran PFK	64.438.144.777,50	61.337.094.547,64
	Saldo Sisa Uang Transitoris	0,00	0,00
2	Koreksi SiLPA	0,00	379.435,00
Jumlah		64.438.144.777,50	61.338.324.982,64

5.6.5. Saldo Awal Kas

Saldo Awal kas per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.253.467.704,86 yaitu Saldo Akhir kas di kas daerah Tahun 2022 sebesar Rp72.867.346.274,66, Kas di Bendahara Penerimaan Rp391.914.810,00, Kas di Bendahara Pengeluaran Rp10.186.150,00, Saldo Akhir Kas di Bendahara Dana BOS Tahun 2022 sebesar Rp373.085.590,40, Saldo Akhir Kas di Bendahara FKTP Tahun 2022 sebesar Rp157.855,00, dan Kas Lainnya sebesar Rp197.331.799,00.

5.6.6. Saldo Akhir Kas

Saldo akhir kas per 31 Desember 2022 sebesar Rp73.840.022.479,06 merupakan kas Pemerintah Kabupaten Nias Selatan pada akhir TA.2022 yang dapat digunakan pada tahun anggaran berikutnya. Saldo akhir kas diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.114. Rincian Saldo Akhir Kas

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	72.867.346.274,66	763.634.861,86
2	Kas di Bendahara Penerimaan	391.914.810,00	0,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	10.186.150,00	9.840.000,00
4	Kas Dana BOS	373.085.590,40	1.282.491.611,00
5	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	157.855,00	456.769,00
6	Kas Lainnya	197.331.799,00	197.044.463,00
Saldo Akhir Kas		73.840.022.479,06	2.253.467.704,86



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN

Kabupaten Nias Selatan merupakan salah satu kabupaten di wilayah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang berdomisili di Jalan Arah Lagundri KM.5 Kecamatan Fanayama. Kabupaten Nias Selatan merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Nias, yang telah disahkan menjadi daerah otonom dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pak-Pak Barat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara, dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri di Medan pada tanggal 28 Juli 2003.

Sifat operasi yang diperankan oleh Pemerintah Kabupaten Nias Selatan bukan berorientasi mencari untung (*profit oriented*), melainkan mengedepankan implementasi pelayanan yang bersifat administratif operasional pemerintahan, melakukan pembangunan, kemasyarakatan dan pelayanan publik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nias Selatan. Oleh karena itu, kegiatan pokoknya adalah menjalankan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pelayanan publik.

Sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Pemerintahan Daerah Kabupaten Nias Selatan membentuk Perangkat Daerah yang baru dibentuk sebagai akibat pemekaran satuan kerja sebelumnya pada tanggal 16 November tahun 2016 melalui Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias.

Untuk menjalankan roda pemerintahan, melalui pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah dilaksanakan tanggal 09 Desember 2020 telah dilakukan pemilihan umum kepala daerah yang baru dan saat ini Kabupaten Nias Selatan dipimpin oleh **Dr. Hilarius Duha, S.H., M.H.** sebagai Bupati Nias Selatan dan **Firman Giawa, S.H., M.H.** sebagai Wakil Bupati Nias Selatan sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-1074 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-354 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Utara. Wakil masyarakat terpilih sebanyak 35 orang yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan, yang diketuai oleh **Elisati Halawa, S.T.**

Kabupaten Nias Selatan berada di bagian barat Sumatera Utara. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Barat, sebelah timur dengan Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Tapanuli Tengah, sebelah selatan dengan Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat, dan sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia. Kabupaten Nias Selatan mempunyai luas wilayah 1.825,2 km² dan wilayah terdiri dari 104 buah pulau, 35 Kecamatan, 2 Kelurahan dan 459 Desa.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

BAB VII
PENUTUP

Demikianlah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan per 31 Desember 2022, yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan ini disusun berdasarkan laporan keuangan entitas akuntansi kemudian entitas pelaporan melakukan penggabungan untuk menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dalam penyusunannya dilakukan melalui proses akuntansi, baik secara manual maupun melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) - Financial Management Information System (FMIS).

Laporan ini disusun mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akruwal pada Pemerintah Daerah serta dengan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 104 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan dan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 105 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan. Semoga laporan keuangan ini dapat bermanfaat dan sebagai dasar akuntabilitas kepada pengguna laporan dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) di Kabupaten Nias Selatan.

BUPATI NIAS SELATAN,

Dr. HILARIUS DUHA, SH., MH